

Berita Jumat, 23 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada Jumat, 23 Oktober 2026, menunjukkan bahwa kondisi perekonomian dunia masih menghadapi tantangan berupa kenaikan harga energi, tekanan inflasi, ketidakpastian geopolitik, dan perbedaan arah kebijakan moneter antarnegara. Meskipun demikian, sejumlah negara masih memperlihatkan ketahanan ekonomi yang cukup baik. Inggris, misalnya, mencatat pertumbuhan sektor swasta pada laju tercepat dalam delapan bulan terakhir, dengan indeks PMI S&P Global meningkat menjadi 53,1 pada Oktober 2026 dari 52 pada bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor jasa dan manufaktur, bertambahnya pesanan baru, serta peningkatan penjualan yang berkaitan dengan investasi dalam kecerdasan buatan. Selain itu, perusahaan-perusahaan Inggris mulai menambah tenaga kerja setelah mengalami penurunan lapangan kerja selama lebih dari dua tahun. Namun, perkembangan positif tersebut masih dibayangi oleh kenaikan harga energi, biaya produksi, dan ketidakpastian menjelang pengumuman anggaran pemerintah pada 28 Oktober 2026. Tekanan harga yang masih tinggi juga memperkuat kemungkinan Bank of England menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Dengan demikian, kondisi Inggris memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pasar tenaga kerja dapat berlangsung bersamaan dengan tekanan biaya yang berpotensi membatasi perkembangan ekonomi pada periode berikutnya.

Berbeda dengan Inggris yang menunjukkan penguatan aktivitas usaha, Singapura justru memberikan gambaran mengenai keberhasilan menjaga inflasi tetap terkendali di tengah kenaikan harga minyak dunia. Inflasi inti Singapura pada September 2026 turun menjadi 2% secara tahunan dari 2,2% pada Agustus, sedangkan inflasi umum tercatat sebesar 2,2%, lebih rendah daripada perkiraan para analis. Perlambatan inflasi tersebut menjadi salah satu alasan yang mendukung keputusan Otoritas Moneter Singapura untuk mempertahankan kebijakan moneternya karena langkah-langkah sebelumnya dinilai masih memadai untuk meredam kenaikan harga barang impor. Meskipun demikian, risiko kenaikan biaya energi dan pangan akibat cuaca buruk tetap perlu diperhatikan karena Singapura bergantung pada pasokan dari luar negeri. Sementara itu, Jepang menghadapi tekanan inflasi yang lebih kuat, dengan indeks harga konsumen di luar bahan pangan segar meningkat 2,1% pada September dan indikator yang tidak memasukkan bahan pangan segar maupun energi naik 2,4%. Kenaikan harga jasa, pangan, dan sejumlah produk perusahaan memperkuat perkiraan bahwa Bank of Japan berpotensi menaikkan suku bunga pada Desember 2026. Kedua negara tersebut menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga global dapat berbeda sesuai kondisi ekonomi, ketergantungan impor, serta efektivitas kebijakan masing-masing negara dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

Tantangan ekonomi internasional juga terlihat di Rusia, yang mempertahankan suku bunga acuan sebesar 14% karena tekanan inflasi masih tinggi, sementara pertumbuhannya diperkirakan hanya mencapai 0,6% pada 2026. Bank sentral Rusia bahkan menaikkan perkiraan inflasi tahunan menjadi 7,1%–7,6%, lebih tinggi daripada perkiraan sebelumnya, akibat gangguan produksi, kenaikan harga bahan bakar, dan peningkatan tarif utilitas. Harga bensin dilaporkan naik 21% sejak awal tahun, sedangkan harga solar meningkat 13,4%, sehingga menambah beban masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan suku bunga tinggi memang diperlukan untuk menahan inflasi, tetapi pada saat yang sama dapat membatasi investasi, meningkatkan biaya pinjaman, dan memperlambat pemulihan ekonomi. Tekanan tersebut semakin besar karena defisit anggaran Rusia diperkirakan mencapai 3,2% dari produk domestik bruto pada 2026, didorong oleh peningkatan belanja pemerintah, terutama untuk kebutuhan militer. Di pasar keuangan global, kekhawatiran terhadap besarnya investasi kecerdasan buatan dan keberlanjutan sektor teknologi turut mendorong investor mencari aset yang dianggap lebih aman, sehingga yen Jepang menguat ke sekitar 156,28 per dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, kenaikan harga minyak akibat ketegangan di Timur Tengah menambah risiko bagi negara pengimpor energi dan

memengaruhi pergerakan mata uang. Keseluruhan perkembangan ini menegaskan bahwa stabilitas ekonomi internasional tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan produksi, tetapi juga oleh kemampuan negara mengendalikan inflasi, mengelola anggaran, menjaga kepercayaan investor, dan menghadapi perubahan harga komoditas dunia.

Berbagai tekanan ekonomi internasional tersebut turut memengaruhi perekonomian Indonesia, terutama melalui pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak, dan ketidakpastian arus modal asing. Pada perdagangan Jumat, 23 Oktober 2026, rupiah ditutup pada posisi Rp18.057 per dolar Amerika Serikat setelah memangkas sebagian pelemahannya, tetapi secara tahunan masih mengalami depresiasi sebesar 7,70% dibandingkan akhir 2025. Pergerakan tersebut mencerminkan tekanan yang dihadapi rupiah di tengah penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan geopolitik, kenaikan harga minyak mentah, dan keluarnya dana asing dari pasar keuangan domestik. Harga minyak Brent kembali meningkat hingga sekitar US\$113,98 per barel, seiring kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi setelah serangan terhadap Arab Saudi dan kemungkinan meningkatnya ketegangan dengan Iran. Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan biaya impor energi serta menambah beban pemerintah dalam menjaga harga bahan bakar minyak melalui subsidi dan kompensasi. Apabila kebutuhan subsidi meningkat, ruang anggaran untuk membiayai program pembangunan lainnya dapat menjadi lebih terbatas. Selain itu, tekanan terhadap nilai tukar dapat meningkatkan biaya barang impor dan memengaruhi harga kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, pengelolaan pasokan energi, serta upaya menjaga kepercayaan investor agar tekanan eksternal tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

Untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, Bank Indonesia mengambil langkah penyesuaian kebijakan moneter dengan menurunkan Giro Wajib Minimum dan menaikkan suku bunga fasilitas simpanan. Giro Wajib Minimum bank konvensional direncanakan turun secara bertahap dari 9% menjadi 7%, sedangkan bank syariah dan unit usaha syariah diturunkan dari 7,5% menjadi 5,5%. Penurunan tersebut diharapkan menambah likuiditas perbankan sehingga bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat dan dunia usaha. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga fasilitas simpanan sebesar 25 basis poin menjadi 5%, sehingga jaraknya terhadap suku bunga acuan menjadi lebih simetris dengan batas atas koridor suku bunga. Penyesuaian ini bertujuan memperkuat transmisi kebijakan moneter agar pergerakan suku bunga pasar uang dapat berjalan searah dengan kebijakan Bank Indonesia dan diteruskan secara lebih efektif ke sektor perbankan, kegiatan ekonomi, serta pengendalian inflasi. Di sisi lain, Bank Indonesia memperkirakan inflasi hingga akhir 2026 masih dapat dijaga di bawah 3,5%, meskipun nilai tukar rupiah menghadapi tekanan dari kondisi global dan domestik. Pada September, inflasi indeks harga konsumen tercatat sebesar 3,28%, inflasi inti mencapai 2,84%, sedangkan inflasi pangan bergejolak berada di angka 5,03%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga pangan masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan Bank Indonesia tidak hanya bergantung pada penyesuaian suku bunga dan likuiditas, tetapi juga pada kemampuan menjaga kestabilan rupiah, memperkuat penyaluran kredit produktif, dan mengendalikan kenaikan harga kebutuhan masyarakat.

Selain stabilitas nilai tukar dan inflasi, perkembangan jumlah uang beredar juga menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kondisi perekonomian Indonesia. Bank Indonesia mencatat jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 pada September 2026 mencapai Rp10.587,9 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 8,3%, meningkat dari 8,2% pada Agustus. Pertumbuhan tersebut didukung oleh uang beredar dalam arti sempit atau M1 yang mencapai Rp6.029,3 triliun dengan pertumbuhan 9%, serta uang kuasi yang mencapai Rp4.498,8 triliun dengan pertumbuhan 7,3%. Selain itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh 24,4% secara tahunan, sementara penyaluran kredit masih tumbuh 12,7%. Meskipun peningkatan jumlah uang beredar dapat memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi, perkembangan tersebut belum tentu menunjukkan bahwa sektor riil telah mengalami penguatan secara merata. Perlambatan pertumbuhan uang primer dari 16,3% pada Agustus

menjadi 9,3% pada September mengindikasikan bahwa peningkatan likuiditas perlu dilihat berdasarkan sumbernya, bukan hanya dari besarnya jumlah uang yang beredar. Salah satu faktor yang diduga mendorong pertumbuhan M2 adalah peningkatan belanja pemerintah atau pencairan stimulus yang menambah saldo rekening masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter perlu memastikan bahwa tambahan likuiditas benar-benar mendukung kegiatan produktif, memperluas pembiayaan usaha, mendorong konsumsi yang sehat, serta memperkuat investasi. Dengan penyaluran dana yang lebih efektif, pertumbuhan uang beredar diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap produksi, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mencerminkan bertambahnya likuiditas dalam sistem keuangan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam perekonomian nasional adalah ketahanan pangan, terutama karena ketersediaan produksi yang melimpah belum selalu menjamin harga kebutuhan pokok terjangkau di seluruh wilayah. Penilaian Center of Reform on Economics menunjukkan bahwa sejumlah komoditas, seperti beras, cabai, telur, daging ayam, jagung, dan bawang merah, secara agregat memiliki produksi nasional yang mencukupi, tetapi masyarakat masih menghadapi fluktuasi harga dan perbedaan harga antarwilayah. Harga beras medium nasional, misalnya, masih berada pada kisaran Rp14.600–Rp15.000 per kilogram, bahkan mengalami kenaikan di lebih dari seratus kabupaten dan kota. Permasalahan ini berkaitan dengan panjangnya rantai distribusi, hambatan pengiriman antarpulau, ketimpangan informasi antara petani, pedagang, dan konsumen, serta struktur industri penggilingan beras yang terkonsentrasi pada pelaku usaha besar. Persaingan antara Perum Bulog dan perusahaan swasta dalam memperoleh gabah juga dapat meningkatkan harga bahan baku, sehingga penggilingan kecil yang memiliki keterbatasan modal dan jaringan pasokan semakin sulit bersaing. Akibatnya, kenaikan harga gabah di tingkat petani tidak selalu diikuti penurunan harga beras di tingkat konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan swasembada pangan perlu dilengkapi dengan pembenahan distribusi, peningkatan efisiensi rantai pasok, pengurangan kehilangan hasil panen, dan pengelolaan cadangan pangan sesuai kebutuhan setiap daerah. Dengan demikian, keberhasilan ketahanan pangan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah produksi nasional, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan masyarakat memperoleh pangan secara stabil, merata, dan terjangkau.

Sejalan dengan persoalan keterjangkauan pangan tersebut, pemerintah memperkuat rantai pasok dan menyiapkan berbagai langkah pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Kebijakan ini menjadi penting karena inflasi pangan pada September tercatat sebesar 5,03%, disertai kenaikan harga cabai merah besar sebesar 25,8%, cabai merah keriting sebesar 22%, dan cabai rawit sebesar 5,07%. Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, pemerintah mengarahkan optimalisasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, perluasan kerja sama antardaerah antara wilayah surplus dan defisit, pemberian dukungan pembiayaan bagi petani dan nelayan, serta penguatan irigasi dan sistem peringatan dini untuk menghadapi risiko El Niño. Pemerintah juga menyiapkan Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun, yang mencakup insentif, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Bantuan beras sebanyak 10 kilogram ditujukan kepada 33,24 juta penerima manfaat, sementara program magang dan vokasi menjangkau 150 ribu peserta. Di sisi lain, pemerintah berencana memperluas kuota Kredit Rakyat menjadi Rp400 triliun pada 2027, dari Rp332 triliun pada 2026, dengan sasaran meningkatkan total pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi Rp1.900 triliun hingga Rp2.000 triliun. Program tersebut diproyeksikan menjangkau sekitar 28 juta keluarga, terutama petani, nelayan, pelaku usaha di pedesaan, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun tambahan plafon Kredit Rakyat tidak secara langsung menambah anggaran pendapatan dan belanja negara, peningkatan kuota Kredit Usaha Rakyat tetap berpotensi memengaruhi kebutuhan subsidi bunga. Oleh sebab itu, efektivitas program-program tersebut sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kelancaran distribusi, dan kemampuan mengubah dukungan pemerintah menjadi peningkatan produksi, pendapatan, serta daya beli masyarakat.

Berbagai kebijakan nasional dalam menjaga keterjangkauan pangan dan memperkuat kegiatan ekonomi juga tercermin dalam upaya pemerintah daerah di Jawa Tengah, khususnya melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Sragen dan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan oleh Bulog Cabang Banyumas. Pemerintah Kabupaten Sragen menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-46 sebagai bagian dari kegiatan serentak di kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Kegiatan tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, termasuk beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, bawang merah, bawang putih, buah-buahan, produk olahan perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Bulog, kelompok tani, pelaku usaha, dan berbagai pihak lainnya untuk mendekatkan akses pangan kepada masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Sementara itu, Bulog Cabang Banyumas telah menyalurkan 31.904,3 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sepanjang 2026 untuk membantu menjaga ketersediaan dan kestabilan harga beras. Stok beras di gudang Bulog Banyumas dilaporkan mencapai sekitar 61.000 ton dan dinyatakan aman untuk mendukung penugasan stabilisasi pangan. Namun, harga beras medium curah di Kabupaten Banyumas masih berada pada kisaran Rp15.000–Rp16.000 per kilogram karena terbatasnya pasokan gabah dari petani yang sebagian menyimpan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan selama masa paceklik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan stok pemerintah perlu disertai distribusi yang tepat, pemantauan harga secara berkala, dan kerja sama dengan pemerintah daerah agar pasokan benar-benar sampai kepada konsumen. Dengan demikian, Gerakan Pangan Murah dan penyaluran beras stabilisasi menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.

Selain menjaga kestabilan harga pangan, Jawa Tengah juga menunjukkan perkembangan ekonomi yang positif melalui peningkatan investasi dan penguatan kawasan industri sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis nilai investasi sepanjang 2026 dapat mencapai Rp110 triliun, menyamai capaian tahun sebelumnya, seiring meningkatnya minat investor dalam negeri maupun luar negeri. Nilai investasi tercatat sebesar Rp23 triliun pada triwulan pertama, meningkat menjadi Rp59,94 triliun pada triwulan kedua, dan mencapai Rp72,54 triliun pada triwulan ketiga 2026. Optimisme tersebut didukung oleh pelaksanaan forum bisnis dan investasi, kerja sama antardaerah, hubungan dengan wilayah mitra di luar negeri, serta pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Jawa Tengah memiliki sekitar tujuh kawasan industri yang telah beroperasi di sejumlah daerah, termasuk Semarang, Demak, Kendal, Batang, dan Brebes, serta menyiapkan sekitar 12 kawasan baru untuk memperluas pusat kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah juga memperkirakan masuknya perusahaan dari Vietnam dapat mendukung pencapaian target investasi tersebut. Perkembangan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang dilaporkan mencapai 5,80%, lebih tinggi daripada rata-rata nasional, sehingga memperlihatkan besarnya potensi daerah dalam menarik investasi dan memperluas kegiatan usaha. Meskipun demikian, peningkatan investasi perlu diikuti dengan penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pemerataan manfaat pembangunan agar pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan industri tertentu. Secara keseluruhan, rangkaian berita internasional, nasional, dan Jawa Tengah memperlihatkan bahwa perekonomian menghadapi dua kebutuhan yang harus berjalan bersamaan, yaitu menjaga stabilitas di tengah tekanan global dan memperkuat sumber pertumbuhan dari dalam negeri. Ketahanan ekonomi Indonesia memerlukan pengendalian inflasi, kestabilan nilai tukar, penyaluran kredit produktif, serta perbaikan distribusi pangan, sedangkan Jawa Tengah perlu memanfaatkan peningkatan investasi dan memperkuat program pangan murah agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, petani, dan pelaku usaha kecil, peluang pertumbuhan ekonomi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus menjaga daya beli, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian global.

Ringkasan

- Indeks aktivitas bisnis Inggris naik menjadi 53,1 dari 52 pada bulan sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan sektor jasa dan manufaktur, bertambahnya pesanan baru, serta investasi di bidang kecerdasan buatan. Meskipun demikian, kenaikan harga energi dan biaya produksi masih menjadi tantangan yang dapat memengaruhi inflasi serta keputusan suku bunga Bank of England.
- Inflasi inti turun menjadi 2% secara tahunan dari 2,2% pada Agustus, sedangkan inflasi umum mencapai 2,2%. Perlambatan ini menunjukkan bahwa tekanan harga mulai mereda dan kebijakan moneter yang diterapkan masih dinilai memadai. Namun, kenaikan harga energi global dan gangguan pasokan pangan tetap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan biaya hidup masyarakat.
- Inflasi inti Jepang mencapai 2,1% pada September 2026, melampaui target Bank of Japan sebesar 2%. Kenaikan harga sejumlah barang dan jasa menunjukkan bahwa tekanan harga masih berlangsung, meskipun harga beras mengalami penurunan. Kondisi ini memperkuat perkiraan bahwa Bank of Japan dapat menaikkan suku bunga pada Desember, sementara pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat melalui rencana pengurangan sementara pajak penjualan bahan pangan.
- Bank Sentral Rusia mempertahankan suku bunga sebesar 14% dan menaikkan perkiraan inflasi 2026 menjadi 7,1%–7,6%. Tekanan harga dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar, tarif utilitas, dan keterbatasan produksi. Di sisi lain, suku bunga tinggi dapat membatasi investasi dan kegiatan usaha. Rusia juga menghadapi tekanan fiskal karena defisit anggaran diperkirakan meningkat menjadi 3,2% dari produk domestik bruto.
- Pada perdagangan Jumat, rupiah melemah 0,08% menjadi Rp18.060 per dolar Amerika Serikat. Sejak akhir 2025, pelemahannya telah mencapai 7,70%, lebih besar dibandingkan beberapa mata uang kawasan, seperti ringgit Malaysia. Sementara itu, won Korea Selatan dan yuan China menunjukkan penguatan sepanjang tahun. Perbedaan ini mencerminkan kondisi ekonomi dan tekanan pasar yang tidak sama di setiap negara.
- Yen naik 0,3% menjadi 156,28 per dolar Amerika Serikat karena investor mencari aset yang dianggap lebih aman. Kekhawatiran terhadap besarnya investasi kecerdasan buatan turut mendorong pembelian obligasi pemerintah Amerika Serikat. Pada saat yang sama, harga minyak Brent sempat menembus US\$114 per barel akibat kekhawatiran gangguan pasokan energi di Timur Tengah. Perkembangan ini meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan dan memperbesar risiko kenaikan biaya energi.
- Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum atau GWM secara bertahap agar perbankan memiliki lebih banyak dana untuk mendukung penyaluran kredit. GWM bank konvensional direncanakan turun dari 9% menjadi 7%, sedangkan bank syariah turun dari 7,5% menjadi 5,5%. Kebijakan ini disertai penyesuaian suku bunga fasilitas simpanan menjadi 5% dan penurunan insentif likuiditas makroprudensial dari 6% menjadi 5%. Langkah tersebut diharapkan memperlancar penyaluran kebijakan moneter ke sektor perbankan dan kegiatan ekonomi.
- Bank Indonesia memperkirakan inflasi tidak akan melampaui 3,5%, sesuai dengan sasaran pemerintah sebesar 2,5% dengan toleransi satu poin persentase. Pada September, inflasi tercatat 3,28%, sedangkan inflasi inti mencapai 2,84%. Tekanan terbesar berasal dari kelompok pangan bergejolak yang mengalami inflasi 5,03%. Meskipun rupiah menghadapi tekanan akibat ketidakpastian global dan keluarnya modal asing, Bank Indonesia tetap berupaya menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi melalui pengelolaan suku bunga serta likuiditas.
- Pada Jumat, rupiah mengalami pelemahan terbatas sebesar 0,04% setelah harga minyak Brent naik 0,7% menjadi US\$113,98 per barel. Kenaikan harga minyak dipengaruhi oleh serangan terhadap Arab Saudi dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Bagi Indonesia, kondisi

ini berpotensi meningkatkan biaya impor energi dan beban subsidi bahan bakar. Jika harga minyak terus naik dan konsumsi bahan bakar bersubsidi meningkat, pengeluaran pemerintah dapat bertambah dan memberikan tekanan tambahan terhadap anggaran negara serta nilai tukar rupiah.

- Sejumlah komoditas, seperti beras, cabai, telur, daging ayam, jagung, dan bawang merah, memiliki produksi nasional yang mencukupi. Namun, harga di tingkat konsumen masih tinggi akibat kendala distribusi, panjangnya rantai pasok, dan perbedaan harga antarwilayah. Harga beras medium nasional berada pada kisaran Rp14.600–Rp15.000 per kilogram. Persaingan antara Perum Bulog dan perusahaan swasta dalam memperoleh gabah juga dapat meningkatkan biaya bahan baku dan menyulitkan penggilingan kecil. Karena itu, pemerintah perlu memperbaiki distribusi, mengurangi kehilangan hasil panen, serta memperkuat peran pelaku usaha kecil agar pangan lebih mudah dijangkau masyarakat.
- Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti luas mencapai Rp10.587,9 triliun pada September 2026, tumbuh 8,3% secara tahunan. Namun, pertumbuhan uang primer melambat menjadi 9,3% dari 16,3% pada Agustus. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan uang beredar belum tentu berasal dari peningkatan kegiatan usaha masyarakat. Salah satu faktor yang diduga mendorong pertumbuhan tersebut adalah kenaikan tagihan bersih kepada pemerintah pusat sebesar 24,4%. Dengan demikian, belanja pemerintah dan pencairan stimulus kemungkinan berperan besar dalam meningkatkan likuiditas selama September.
- Pemerintah meningkatkan koordinasi distribusi pangan untuk mengantisipasi kenaikan permintaan dan risiko perubahan iklim. Inflasi pangan tercatat 5,03%, dengan kenaikan harga cabai merah besar sebesar 25,8% dan cabai merah keriting sebesar 22%. Langkah yang disiapkan meliputi optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, pemberian pembiayaan bagi petani dan nelayan, serta kerja sama distribusi antardaerah. Pemerintah juga menyiapkan stimulus Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima dan program magang bagi 150 ribu peserta.
- Pemerintah berencana meningkatkan plafon Kredit Rakyat menjadi Rp400 triliun pada 2027, dibandingkan Rp332 triliun pada tahun berjalan. Total pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Kredit Usaha Rakyat maupun pembiayaan lainnya ditargetkan mencapai Rp1.900 triliun hingga Rp2.000 triliun. Peningkatan ini diharapkan membantu pelaku usaha memperoleh modal untuk mengembangkan kegiatan produksi dan memperluas pasar. Pemerintah menyatakan bahwa penambahan plafon tersebut tidak secara langsung menambah beban belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, meskipun kebutuhan subsidi bunga masih perlu diperhitungkan.
- Pemerintah Kabupaten Sragen mengadakan Gerakan Pangan Murah dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-46. Kegiatan ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, bawang, buah-buahan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah bekerja sama dengan Perum Bulog, kelompok tani, dan pelaku usaha agar masyarakat dapat membeli bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pendapatan.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis dapat mencapai target investasi karena minat investor terus berkembang. Nilai investasi tercatat Rp23 triliun pada triwulan pertama, meningkat menjadi Rp59,94 triliun pada triwulan kedua, dan mencapai Rp72,54 triliun pada triwulan ketiga. Capaian tersebut didukung oleh promosi investasi, forum bisnis, dan kerja sama antardaerah. Pemerintah juga berupaya memperluas kesempatan investasi agar kegiatan usaha semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah.
- Jawa Tengah memiliki sekitar tujuh kawasan industri, antara lain di Semarang, Demak, Kendal, Batang, dan Brebes, serta menyiapkan pengembangan dua belas kawasan baru. Pengembangan ini diharapkan menarik lebih banyak investor, memperluas kegiatan produksi, dan membuka

peluang kerja. Pemerintah juga terus mempromosikan potensi daerah melalui berbagai forum investasi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang disebut mencapai 5,80% menjadi salah satu dasar optimisme untuk mempertahankan daya tarik investasi dan memperluas pusat pertumbuhan ekonomi.

- Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas telah menyalurkan 31.904,3 ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sepanjang 2026. Penyaluran dilakukan melalui pasar, toko pedagang, Rumah Pangan Kita, dan kegiatan penjualan pangan bersama pemerintah daerah. Bulog juga memiliki stok sekitar 61.000 ton untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Namun, harga beras medium curah di Banyumas masih berada pada kisaran Rp15.000–Rp16.000 per kilogram, antara lain karena terbatasnya pasokan gabah selama masa paceklik. Oleh karena itu, penyaluran beras dan penguatan distribusi tetap diperlukan agar ketersediaan pangan terjaga dan harga lebih terjangkau.

Implikasi

- Kenaikan indeks aktivitas bisnis Inggris menjadi 53,1 pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa kegiatan sektor jasa dan manufaktur masih berkembang, disertai peningkatan pesanan baru dan perekrutan tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan bahwa investasi teknologi, termasuk kecerdasan buatan, dapat mendukung aktivitas ekonomi meskipun harga energi sedang tinggi. Namun, apabila tekanan biaya terus meningkat dan mendorong kenaikan suku bunga, biaya pinjaman bagi perusahaan dan rumah tangga juga berpotensi bertambah sehingga dapat membatasi pertumbuhan pada periode berikutnya.
- Inflasi inti Singapura turun menjadi 2% pada September 2026, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga memberikan ruang bagi bank sentral untuk mempertahankan kebijakan moneter. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga domestik masih dapat dikendalikan, tetapi ketergantungan Singapura terhadap barang impor membuat negara tersebut tetap rentan terhadap kenaikan harga energi dan pangan dunia. Bagi negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa kelancaran perdagangan dan kestabilan harga komoditas internasional sangat penting untuk menjaga biaya produksi serta daya beli masyarakat.
- Inflasi konsumen Jepang di luar bahan pangan segar mencapai 2,1% secara tahunan pada September, sedangkan indikator inflasi yang tidak mencakup bahan pangan segar maupun energi meningkat 2,4%. Kondisi tersebut memperkuat perkiraan bahwa Bank of Japan dapat menaikkan suku bunga pada Desember apabila tekanan harga masih bertahan. Jika suku bunga Jepang meningkat, keputusan investor dalam menempatkan dananya di berbagai negara dapat berubah, sehingga negara berkembang perlu menjaga kepercayaan pasar dan kestabilan ekonominya agar tidak mengalami tekanan arus modal yang berlebihan.
- Bank sentral Rusia mempertahankan suku bunga sebesar 14% dan menaikkan perkiraan inflasi tahun 2026 menjadi 7,1–7,6%, sementara pertumbuhan ekonominya diperkirakan hanya mencapai 0,6%. Kebijakan suku bunga tinggi diperlukan untuk menahan tekanan harga, tetapi pada saat yang sama meningkatkan biaya pinjaman bagi perusahaan dan pemerintah. Implikasinya, investasi produktif dan ekspansi usaha dapat tertunda karena pembiayaan menjadi lebih mahal, sedangkan ruang pemerintah untuk membiayai program pembangunan juga semakin terbatas ketika defisit anggaran meningkat.
- Rupiah melemah menjadi sekitar Rp18.060 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan 23 Oktober 2026 dan tercatat turun 7,70% sejak akhir 2025. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya impor, terutama untuk barang, bahan baku, dan kebutuhan energi yang dibayar menggunakan mata uang asing. Apabila kenaikan biaya tersebut diteruskan kepada konsumen, harga barang dalam negeri berpotensi meningkat dan daya beli masyarakat dapat tertekan. Oleh karena itu, kestabilan nilai tukar dan pengendalian inflasi menjadi faktor penting agar tekanan dari luar negeri tidak semakin membebani perekonomian domestik.

- Penguatan yen Jepang di tengah meningkatnya minat terhadap aset yang dianggap lebih aman menunjukkan bahwa investor sedang berhati-hati terhadap prospek investasi teknologi dan kondisi ekonomi global. Pada saat yang sama, harga minyak Brent yang menembus US\$114 per barel akibat kekhawatiran gangguan pasokan energi di Timur Tengah menambah tekanan terhadap negara-negara pengimpor minyak. Kombinasi kedua perkembangan ini dapat membuat arus modal dan nilai tukar bergerak tidak stabil, sehingga negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia, perlu mengantisipasi kenaikan biaya produksi, tekanan inflasi, dan kemungkinan bertambahnya kebutuhan pembiayaan impor.
- Penurunan Giro Wajib Minimum perbankan konvensional dari 9% menjadi 7% dan perbankan syariah dari 7,5% menjadi 5,5% berpotensi memberikan ruang likuiditas yang lebih besar bagi perbankan untuk menjalankan kegiatan pembiayaan. Namun, kenaikan suku bunga fasilitas simpanan menjadi 5% pada saat yang sama menunjukkan bahwa Bank Indonesia tetap berupaya menjaga keseimbangan kondisi likuiditas dan memperkuat penerusan kebijakan moneter ke pasar keuangan. Implikasinya, tambahan likuiditas diharapkan mendukung penyaluran kredit dan aktivitas ekonomi, tetapi manfaatnya akan bergantung pada kesediaan perbankan menyalurkan pembiayaan serta kemampuan dunia usaha untuk memanfaatkannya secara produktif.
- Nilai rupiah yang berada di sekitar Rp18.057–Rp18.060 per dolar Amerika Serikat serta harga minyak Brent yang berada di atas US\$113 per barel menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia menghadapi tekanan eksternal yang cukup besar. Rupiah yang melemah membuat pembelian barang impor menjadi lebih mahal, sementara harga minyak yang tinggi dapat meningkatkan biaya transportasi, distribusi, produksi, dan penyediaan energi. Apabila tekanan tersebut berlangsung lama, pemerintah berpotensi menghadapi kebutuhan belanja yang lebih besar untuk menjaga keterjangkauan energi, sedangkan masyarakat dan pelaku usaha dapat menghadapi kenaikan biaya hidup maupun biaya operasional.
- Bank Indonesia memperkirakan inflasi tetap berada di bawah 3,5%, dengan inflasi konsumen September 2026 sebesar 3,28% dan inflasi inti sebesar 2,84%. Meskipun perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga secara umum masih dapat dikelola, inflasi kelompok pangan bergejolak telah mencapai 5,03%, antara lain akibat penurunan produksi di sejumlah wilayah sentra dan gangguan cuaca. Implikasinya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter, tetapi juga membutuhkan perbaikan pasokan, kelancaran distribusi, dan koordinasi pemerintah pusat serta daerah agar kenaikan harga bahan pangan tidak mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Jumlah uang beredar dalam arti luas pada September 2026 mencapai Rp10.587,9 triliun, tumbuh 8,3% secara tahunan, sedangkan penyaluran kredit tumbuh 12,7%. Perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan likuiditas dalam perekonomian yang dapat mendukung konsumsi, investasi, dan kegiatan usaha. Namun, pertumbuhan uang beredar juga perlu dicermati berdasarkan sumbernya, termasuk peningkatan tagihan bersih kepada pemerintah pusat, agar tambahan likuiditas benar-benar mendorong produksi dan aktivitas sektor riil. Jika pertumbuhan likuiditas tidak diimbangi peningkatan ketersediaan barang dan jasa, tekanan terhadap harga berpotensi meningkat sehingga kestabilan harga tetap perlu dijaga.
- Inflasi pangan sebesar 5,03%, disertai kenaikan harga cabai merah besar sebesar 25,8%, cabai merah keriting sebesar 22%, dan cabai rawit sebesar 5,07%, menunjukkan bahwa komoditas pangan masih menjadi sumber tekanan harga. Upaya pemerintah memperkuat konektivitas antardaerah, mengoptimalkan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, memperluas kerja sama antara daerah surplus dan defisit, serta memperbaiki irigasi dan pola tanam dapat membantu mengurangi risiko kelangkaan. Jika langkah tersebut dilaksanakan secara tepat, pasokan pangan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan dengan lebih lancar, sehingga kenaikan permintaan menjelang hari besar tidak langsung menyebabkan lonjakan harga yang berlebihan.

- Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun mencakup insentif, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan, termasuk bantuan beras sebanyak 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat. Kebijakan ini berpotensi meringankan pengeluaran rumah tangga sekaligus mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja. Namun, dampaknya akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, dan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program perlu diawasi agar manfaatnya benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan dan mampu membantu menjaga konsumsi rumah tangga di tengah kenaikan biaya hidup.
- Rencana peningkatan plafon Kredit Rakyat menjadi Rp400 triliun pada 2027, disertai target total pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar Rp1.900–Rp2.000 triliun, membuka peluang bagi lebih banyak pelaku usaha untuk memperoleh modal. Akses pembiayaan yang lebih luas dapat digunakan untuk membeli bahan baku, menambah peralatan, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pemasaran. Meskipun demikian, penyaluran kredit perlu disertai penilaian kemampuan membayar dan pendampingan usaha agar pembiayaan tidak menimbulkan beban utang yang berlebihan. Selain itu, penyesuaian subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat tetap perlu diperhitungkan agar perluasan pembiayaan berjalan seimbang dengan kemampuan anggaran negara.
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Sragen menyediakan berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, bawang, buah, serta produk olahan perikanan dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan harga terjangkau. Kegiatan ini membantu masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, memperoleh kebutuhan sehari-hari tanpa harus sepenuhnya mengikuti harga pasar yang lebih tinggi. Selain itu, keterlibatan gabungan kelompok tani, Bulog, pelaku usaha, dan usaha mikro, kecil, dan menengah membuka peluang pemasaran bagi produsen lokal. Agar manfaatnya lebih luas, kegiatan serupa perlu menjangkau lebih banyak wilayah dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan komoditas yang paling dibutuhkan masyarakat.
- Bulog Banyumas telah menyalurkan 31.904,3 ton beras sepanjang 2026 dan memiliki persediaan sekitar 61.000 ton untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga. Jumlah tersebut menjadi modal penting untuk menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat, terutama ketika pasokan dari petani berkurang karena sebagian gabah disimpan untuk kebutuhan sendiri selama masa paceklik. Namun, harga beras medium curah yang berada pada kisaran Rp15.000–Rp16.000 per kilogram menunjukkan bahwa ketersediaan stok di gudang belum selalu membuat harga di pasar menjadi murah. Oleh karena itu, penyaluran perlu dilakukan secara tepat waktu dan merata, disertai pemantauan pasar serta koordinasi dengan pemerintah daerah agar beras dapat sampai kepada konsumen dengan harga terjangkau.
- Realisasi investasi Jawa Tengah yang mencapai Rp72,54 triliun pada triwulan III 2026 menunjukkan perkembangan yang mendukung optimisme pemerintah daerah untuk mencapai target tahunan. Jika minat investor dalam dan luar negeri terus meningkat, kegiatan pembangunan fasilitas produksi, kawasan industri, dan usaha pendukung dapat menciptakan peluang kerja serta meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa lokal. Namun, pencapaian target tersebut perlu diikuti dengan realisasi investasi yang benar-benar berjalan, bukan hanya berupa komitmen atau rencana. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, keterlibatan usaha lokal, dan peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi investasi.
- Keberadaan sekitar tujuh kawasan industri dan persiapan sekitar 12 kawasan baru berpotensi memperluas pusat kegiatan ekonomi di berbagai kabupaten dan kota. Pengembangan tersebut dapat menarik perusahaan baru, meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, serta membuka kesempatan bagi usaha lokal untuk memasok bahan baku, jasa transportasi, makanan, dan kebutuhan operasional perusahaan. Meskipun demikian, pembangunan kawasan industri perlu didukung oleh infrastruktur, akses transportasi, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan

pelayanan perizinan yang memadai. Pemerataan lokasi investasi juga penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan industri yang telah berkembang, tetapi turut mendorong kegiatan ekonomi di wilayah lain.

- Capaian pertumbuhan tersebut, yang disebut berada di atas rata-rata nasional dalam berita, menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang cukup kuat di daerah. Dukungan melalui forum investasi, kerja sama antardaerah, serta hubungan dengan wilayah dan negara mitra dapat membantu mempertahankan minat investor. Namun, pertumbuhan yang tinggi perlu diterjemahkan menjadi peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari besarnya investasi, tetapi juga dari kemampuan investasi tersebut memperkuat keterkaitan antara perusahaan besar, usaha kecil, dan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Berita Sabtu, 24 Oktober

Kesimpulan

Kondisi ekonomi internasional pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini terlihat di Amerika Serikat, ketika indeks sentimen konsumen turun menjadi 48 dari 48,1 pada September 2026, sekaligus menjadi tingkat terendah dalam lima bulan terakhir. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin khawatir terhadap kondisi keuangan mereka, terutama karena harga kebutuhan sehari-hari, biaya perumahan, dan harga bahan bakar masih tinggi. Selain itu, perkiraan inflasi selama satu tahun ke depan mencapai 4,7%, sedangkan perkiraan inflasi untuk lima hingga sepuluh tahun mendatang berada di angka 3,5%. Kekhawatiran masyarakat juga terlihat dari meningkatnya perkiraan suku bunga dan melemahnya minat untuk membeli barang tahan lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga dapat memengaruhi daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh kestabilan harga dan peningkatan pendapatan.

Di tengah tantangan ekonomi tersebut, hubungan perdagangan internasional juga perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan masyarakat. Hubungan Uni Eropa dan Vietnam menjadi salah satu contoh karena kerja sama perdagangan melalui Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa–Vietnam telah berjalan sejak Agustus 2020, kemudian diperkuat dengan kemitraan strategis komprehensif pada Januari 2026. Kerja sama ini membuka peluang bagi Vietnam untuk memperkuat perannya dalam rantai pasok dan kegiatan manufaktur internasional. Namun, hubungan tersebut masih menghadapi persoalan terkait hak pekerja, kebebasan berserikat, kebebasan media, serta perlindungan masyarakat sipil. Uni Eropa juga menaruh perhatian terhadap aturan keberlanjutan dalam perdagangan. Selain itu, defisit perdagangan barang Uni Eropa dengan Vietnam mencapai 51,7 miliar euro pada 2025, meningkat dibandingkan 24 miliar euro pada 2019. Dengan demikian, hubungan perdagangan yang kuat tidak hanya membutuhkan peningkatan nilai transaksi, tetapi juga aturan yang adil, perlindungan tenaga kerja, dan keseimbangan kepentingan bagi kedua pihak.

Perkembangan ekonomi internasional tersebut menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara lain sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi di dalam negeri. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melanjutkan kerja sama Indonesia dan Australia melalui program Prospera tahap kedua untuk periode 2026–2030. Program ini diarahkan untuk mendukung reformasi kelembagaan, memperbaiki kebijakan ekonomi, dan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Upaya tersebut juga berkaitan dengan target Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi pada 2028. Dalam prosesnya, Indonesia telah menyelesaikan 20 dari 25 bagian awal memorandum, atau sekitar 80%.

Selain itu, persetujuan untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik diperkirakan berlangsung pada November 2026. Kerja sama juga diarahkan pada pengembangan ekonomi digital, kecerdasan buatan, dan pariwisata. Berbagai langkah ini dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan investasi, tetapi manfaatnya akan sangat bergantung pada kesiapan tenaga kerja, kualitas regulasi, dan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang tersebut.

Peluang kerja sama internasional perlu diikuti dengan perbaikan struktur ekonomi nasional agar pertumbuhan tidak hanya terlihat dari besarnya nilai produk domestik bruto, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan pemberitaan, produk domestik bruto Indonesia berdasarkan paritas daya beli diperkirakan mencapai 5,48 triliun dolar Amerika Serikat, menempatkan Indonesia pada peringkat ketujuh dunia. Sementara itu, produk domestik bruto nominal diperkirakan sebesar 1,48 triliun dolar Amerika Serikat dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-17. Meskipun demikian, produk domestik bruto per kapita berdasarkan paritas daya beli masih berada di sekitar 18.657 dolar Amerika Serikat, sedangkan berdasarkan perhitungan nominal sekitar 5.360 dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menunjukkan bahwa besarnya perekonomian nasional belum tentu mencerminkan tingginya pendapatan setiap penduduk. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kembali sektor industri pengolahan, terutama industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah, dan menggunakan teknologi yang lebih maju. Pengembangan keterampilan pekerja, peningkatan produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja formal juga penting agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan secara lebih merata.

Selain memperbaiki struktur industri, Indonesia juga perlu menjaga kestabilan ekonomi karena perubahan kondisi global dapat memengaruhi nilai tukar, biaya pembiayaan, harga komoditas, dan daya beli masyarakat. Data September 2026 menunjukkan bahwa jumlah uang beredar dalam arti luas mencapai Rp10.587,9 triliun, tumbuh 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan uang primer yang disesuaikan melambat menjadi 9,3% dari 16,3% pada Agustus 2026. Pertumbuhan kredit perbankan juga turun menjadi 12,7% dari sebelumnya 13,3%. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar perlu diikuti dengan penyaluran pembiayaan yang benar-benar mendukung kegiatan ekonomi produktif. Apabila likuiditas tidak tersalurkan secara optimal kepada dunia usaha, penambahan uang beredar belum tentu menghasilkan peningkatan produksi dan lapangan kerja yang sebanding. Karena itu, kebijakan moneter perlu berjalan seimbang dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli, memperkuat kegiatan usaha, dan mengurangi dampak perubahan ekonomi global terhadap masyarakat.

Dalam menjaga kestabilan tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan likuiditas perbankan dengan mempertimbangkan pertumbuhan kredit, penghimpunan dana, serta kebutuhan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah. Pertumbuhan kredit tercatat sebesar 13,26%, sedangkan dana pihak ketiga tumbuh 8,22%, dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga mencapai 88,11%. Bank Indonesia merencanakan penurunan giro wajib minimum bagi bank konvensional dari 9% menjadi 8% pada 1 November, kemudian menjadi 7% pada 1 Desember 2026. Untuk bank syariah, ketentuan tersebut diturunkan dari 7,5% menjadi 6,5%, lalu menjadi 5,5%. Pada saat yang sama, suku bunga Deposit Facility dinaikkan 25 basis poin menjadi 5%, suku bunga acuan tetap sebesar 5,75%, dan suku bunga Lending Facility berada di angka 6,5%. Kebijakan ini menunjukkan upaya untuk menyediakan ruang likuiditas bagi perbankan agar penyaluran kredit tetap berjalan tanpa mengabaikan risiko inflasi dan tekanan terhadap rupiah. Pelaksanaannya perlu terus dipantau agar tambahan likuiditas benar-benar mendorong pembiayaan usaha, menjaga kepercayaan pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Dampak kondisi ekonomi juga terlihat pada harga pangan yang berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga. Inflasi pangan tercatat sebesar 5,03%, dengan kenaikan harga cabai merah besar mencapai 25,8%, cabai merah keriting 22%, dan cabai rawit 5,07%. Kenaikan harga tersebut

menunjukkan bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi masih menjadi persoalan penting dalam menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, memperluas akses pembiayaan bagi petani dan nelayan melalui Kredit Usaha Rakyat, serta meningkatkan kerja sama distribusi antarwilayah. Perbaikan irigasi, pengaturan waktu tanam, dan sistem peringatan dini terhadap dampak El Niño juga diperlukan agar produksi pangan lebih siap menghadapi perubahan cuaca. Selain itu, pemerintah menyiapkan stimulus tahap kedua sebesar Rp26,34 triliun, yang mencakup insentif, program magang dan pendidikan vokasi, serta bantuan pangan. Bantuan beras sebanyak 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima diharapkan membantu meringankan pengeluaran masyarakat, sementara perbaikan pelabuhan, rantai pendingin, dan konektivitas laut diperlukan untuk menjaga pasokan pangan, terutama ke wilayah yang menghadapi kendala distribusi.

Upaya menjaga daya beli masyarakat juga perlu disertai kebijakan yang mampu memperkuat usaha kecil dan menjaga keseimbangan persaingan di tingkat lokal. Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan kegiatan ekonomi, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta warung yang telah lebih dahulu melayani masyarakat. Berdasarkan pemberitaan, sekitar 29.000 koperasi telah selesai dibangun, sementara 8.000 koperasi lainnya diperkirakan mulai beroperasi secara bertahap sejak 15 Oktober 2026. Agar program tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan, koperasi perlu memiliki pengelolaan yang baik, modal yang memadai, serta jaringan pemasok yang dapat diandalkan. Perbedaan biaya pembiayaan juga perlu diperhatikan, mengingat bunga pembiayaan Mekaar sebesar 8%, sedangkan Kredit Usaha Rakyat sebesar 6%. Koperasi sebaiknya tidak hanya bersaing dengan warung dan usaha kecil, tetapi juga membuka peluang pasar baru melalui kerja sama dengan pelaku usaha setempat, termasuk dalam penyediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis. Dengan pendekatan tersebut, program koperasi dapat memperluas kegiatan ekonomi desa tanpa mengurangi kesempatan usaha masyarakat yang sudah berjalan.

Berbagai kebijakan nasional tersebut memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi Jawa Tengah yang menunjukkan pertumbuhan dan aktivitas investasi cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara kumulatif pada semester pertama 2026 tercatat sebesar 5,80%, dengan pertumbuhan triwulan pertama mencapai 5,89%, yang dalam pemberitaan disebut sebagai tingkat tertinggi sejak 2011. Hingga triwulan ketiga 2026, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp72,54 triliun dari 82.420 proyek dan menyerap 340.334 tenaga kerja. Investasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri sebesar Rp31,77 triliun dan penanaman modal asing sebesar Rp40,77 triliun. Sejumlah daerah yang mencatat nilai investasi besar antara lain Kabupaten Kendal sebesar Rp13,61 triliun, Kota Semarang Rp9,07 triliun, Kabupaten Batang Rp8,54 triliun, Kabupaten Temanggung Rp5,05 triliun, dan Kabupaten Demak Rp4,29 triliun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan investasi mencapai Rp110 triliun hingga akhir tahun 2026. Untuk mendukung target tersebut, pengembangan kawasan industri perlu terus dilanjutkan, termasuk melalui tujuh kawasan industri yang telah ada dan persiapan dua belas kawasan baru. Namun, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk, melainkan juga dari jumlah tenaga kerja yang terserap, keterlibatan usaha lokal, dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah perlu diarahkan agar menghasilkan pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah tercatat sebesar 4,24% pada Februari 2026, lebih rendah daripada tingkat nasional sebesar 4,68%. Selain itu, beroperasinya kilang baru Pertamina di Cilacap sejak April 2026 menjadi bagian dari perkembangan kegiatan industri di daerah. Pemerintah juga mempertahankan harga sejumlah kebutuhan energi bersubsidi, seperti Paltalite sebesar Rp10.000 per liter, Solar Rp6.800 per liter, serta tarif listrik dan harga elpiji tiga kilogram sesuai kebijakan yang berlaku. Di sektor pangan, cadangan beras Bulog mencapai 4,5 juta ton pada Oktober 2026, yang dapat mendukung upaya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga beras. Program Makan

Bergizi Gratis juga berpotensi memperluas pasar bagi petani dan pemasok lokal, dengan 3.826 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Jawa Tengah hingga Maret 2026 yang dalam pemberitaan dikaitkan dengan penyerapan lebih dari 164.000 tenaga kerja lokal. Sementara itu, pengembangan kawasan industri, termasuk Industropolis Batang, perlu diikuti peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal dan alih teknologi agar masyarakat setempat memperoleh manfaat yang lebih besar. Dengan demikian, keterkaitan antara perkembangan ekonomi internasional, kebijakan ekonomi nasional, dan pertumbuhan Jawa Tengah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh investasi dan pertumbuhan produk domestik bruto, tetapi juga oleh kemampuan menjaga stabilitas harga, memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat usaha kecil, serta memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Ringkasan

- Indeks sentimen konsumen Amerika Serikat turun menjadi 48 pada Oktober 2026 dari 48,1 pada September. Masyarakat memperkirakan inflasi mencapai 4,7% dalam satu tahun ke depan dan 3,5% dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Tingginya harga kebutuhan pokok, biaya kredit perumahan, serta harga bensin yang masih di atas 4 dolar Amerika Serikat per galon semakin menekan pengeluaran rumah tangga. Kondisi ini membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam berbelanja dan khawatir terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga.
- Kerja sama melalui Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa–Vietnam yang berlaku sejak Agustus 2020 memperkuat hubungan perdagangan dan membuka peluang bagi Vietnam sebagai pusat manufaktur serta rantai pasok Asia. Namun, Uni Eropa masih menyoroti pembatasan kebebasan berserikat, media independen, dan aktivitas masyarakat sipil di Vietnam. Manfaat perdagangan juga belum dirasakan secara merata karena perusahaan besar dinilai lebih mampu memenuhi persyaratan pasar Eropa dibandingkan usaha kecil. Selain itu, defisit perdagangan barang Uni Eropa dengan Vietnam meningkat menjadi 51,7 miliar euro pada 2025, sehingga keseimbangan perdagangan, perlindungan pekerja, dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan menjadi perhatian kedua pihak.
- Melalui program Australia–Indonesia Partnership for Economic Development tahap kedua untuk periode 2026–2030, kedua negara berupaya meningkatkan kualitas kelembagaan, mempercepat proses keanggotaan Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, serta memperluas kerja sama perdagangan. Proses keanggotaan Indonesia dalam organisasi tersebut ditargetkan selesai pada 2028, dengan 20 dari 25 bagian awal memorandum telah diselesaikan. Indonesia juga menargetkan persetujuan untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik pada November 2026. Kerja sama ini turut mencakup pengembangan ekonomi digital, kecerdasan buatan, pariwisata, dan penambahan penerbangan langsung agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha.
- Berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional edisi Oktober 2026, produk domestik bruto Indonesia berdasarkan paritas daya beli mencapai 5,48 triliun dolar Amerika Serikat sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ketujuh dunia. Namun, berdasarkan produk domestik bruto nominal, Indonesia berada pada peringkat ke-17 dengan nilai 1,48 triliun dolar Amerika Serikat. Produk domestik bruto per kapita berdasarkan paritas daya beli tercatat sekitar 18.657 dolar Amerika Serikat, sedangkan nilai nominalnya sekitar 5.360 dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya perekonomian nasional belum sepenuhnya mencerminkan tingginya pendapatan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat industri padat karya, meningkatkan nilai tambah produk, memperluas pekerjaan formal, memperbaiki keterampilan tenaga kerja, dan mendorong penggunaan teknologi agar pertumbuhan ekonomi lebih merata.
- Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti luas mencapai Rp10.587,9 triliun pada September 2026, tumbuh 8,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan uang

primer yang disesuaikan melambat menjadi 9,3% dari 16,3% pada Agustus, sedangkan pertumbuhan kredit perbankan melambat menjadi 12,7% dari 13,3%. Perkembangan ini menunjukkan bahwa peningkatan likuiditas belum tentu diikuti peningkatan kegiatan usaha secara kuat, terutama jika dana lebih banyak berasal dari ekspansi fiskal pemerintah daripada aktivitas sektor swasta. Oleh sebab itu, penyaluran dana perlu diarahkan pada kegiatan produktif, seperti pengembangan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

- Hingga September 2026, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 13,26%, sedangkan dana pihak ketiga tumbuh 8,22%, dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga sebesar 88,11%. Untuk memberikan ruang pendanaan bagi perbankan, Bank Indonesia menurunkan giro wajib minimum bank konvensional dari 9% menjadi 8% mulai 1 November dan menjadi 7% mulai 1 Desember 2026. Untuk bank syariah, ketentuannya diturunkan dari 7,5% menjadi 6,5%, kemudian 5,5%. Pada saat yang sama, suku bunga Deposit Facility dinaikkan menjadi 5%, suku bunga acuan dipertahankan sebesar 5,75%, dan suku bunga Lending Facility tetap 6,5%. Kebijakan ini ditujukan untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas perbankan dengan upaya menjaga inflasi dan kestabilan rupiah.
- Inflasi pangan tercatat sebesar 5,03%, dengan harga cabai merah besar meningkat 25,8%, cabai merah keriting 22%, dan cabai rawit 5,07%. Kenaikan harga tersebut menekan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah perlu memperkuat stabilisasi pasokan, memperbaiki distribusi antarwilayah, serta mendukung petani dan nelayan melalui pembiayaan dan perbaikan sarana produksi. Pemerintah juga menyiapkan stimulus tahap kedua sebesar Rp26,34 triliun, yang mencakup insentif, program magang dan pendidikan vokasi, serta bantuan pangan. Bantuan beras sebanyak 10 kilogram untuk 33,24 juta penerima diharapkan membantu meringankan pengeluaran rumah tangga. Selain itu, perbaikan pelabuhan, fasilitas penyimpanan dingin, dan konektivitas laut diperlukan agar distribusi pangan lebih lancar, terutama ke wilayah yang memiliki kendala pasokan.
- Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditujukan untuk memperkuat ekonomi desa, tetapi berisiko mengurangi pasar usaha mikro, kecil, dan menengah serta warung rakyat apabila hanya mengambil alih kegiatan perdagangan yang sudah ada. Sekitar 29.000 koperasi telah selesai dibangun, sementara 8.000 koperasi ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap sejak 15 Oktober 2026. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh jumlah koperasi, tetapi juga oleh kelayakan usaha, kemampuan pengelola, ketersediaan modal, dan kelancaran rantai pasok. Pemerintah perlu memastikan koperasi mampu berkembang secara mandiri dan membuka pasar baru, termasuk dengan melibatkan usaha kecil sebagai pemasok program Makan Bergizi Gratis. Dari sisi pembiayaan, bunga program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera turun menjadi 8%, sedangkan bunga Kredit Usaha Rakyat sebesar 6%, tetapi biaya pinjaman yang rendah tetap harus didukung pengelolaan usaha yang baik.
- Hingga triwulan ketiga 2026, realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp72,54 triliun melalui 82.420 proyek dan menyerap 340.334 tenaga kerja. Nilai tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri sebesar Rp31,77 triliun dan penanaman modal asing sebesar Rp40,77 triliun. Daerah dengan realisasi investasi tertinggi meliputi Kabupaten Kendal sebesar Rp13,61 triliun, Kota Semarang Rp9,07 triliun, Kabupaten Batang Rp8,54 triliun, Kabupaten Temanggung Rp5,05 triliun, dan Kabupaten Demak Rp4,29 triliun. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi optimistis target investasi Rp110 triliun dapat tercapai melalui kerja sama pemerintah, investor, dan dunia usaha. Upaya ini didukung oleh tujuh kawasan industri yang telah ada serta persiapan dua belas kawasan baru untuk membuka pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
- Perekonomian Jawa Tengah tumbuh secara kumulatif sebesar 5,80% pada semester pertama 2026, sementara pertumbuhan triwulan pertama mencapai 5,89%. Tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini tercatat sebesar 4,24% pada Februari 2026, lebih rendah daripada angka nasional sebesar 4,68%. Pembangunan kilang baru Pertamina di Cilacap yang dimulai pada

April 2026 turut mendukung penguatan industri dan ketahanan energi. Pemerintah juga menjaga harga Peralite sebesar Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter, serta mempertahankan kebijakan harga elpiji tiga kilogram dan tarif listrik. Di sektor pangan, cadangan beras Bulog mencapai 4,5 juta ton pada Oktober 2026. Program Makan Bergizi Gratis juga membuka peluang bagi petani lokal untuk menjadi pemasok dan mendukung kegiatan ekonomi desa. Hingga Maret 2026, sebanyak 3.826 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah beroperasi di Jawa Tengah dan menyerap lebih dari 164.000 tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah perlu terus diarahkan pada penciptaan pekerjaan yang layak, peningkatan keterampilan, alih teknologi, serta keterlibatan usaha kecil agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.

Implikasi

- Perubahan kondisi ekonomi Amerika Serikat dapat memengaruhi perkembangan ekonomi negara lain. Perubahan tingkat inflasi, kepercayaan konsumen, dan suku bunga dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk berbelanja serta keputusan perusahaan untuk berinvestasi. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena perubahan permintaan di Amerika Serikat dapat berdampak pada perdagangan dunia.
- Perubahan permintaan pasar global dapat memengaruhi kegiatan ekspor dan impor berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika permintaan dari negara tujuan melemah, penjualan produk ekspor berpotensi menurun dan memengaruhi pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produknya agar tidak terlalu bergantung pada satu negara tujuan.
- Kerja sama perdagangan antara Uni Eropa dan Vietnam menunjukkan pentingnya kesiapan negara dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional. Peluang perdagangan dapat semakin terbuka apabila negara mampu memenuhi ketentuan mengenai mutu produk, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Hal ini menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar pasar internasional.
- Perkembangan neraca perdagangan suatu negara dapat menjadi gambaran mengenai hubungan antara kegiatan ekspor dan impor. Ketika impor meningkat lebih cepat daripada ekspor, tekanan terhadap neraca perdagangan dapat bertambah. Karena itu, Indonesia perlu meningkatkan produksi dalam negeri, memperkuat industri pengolahan, dan mendorong ekspor produk bernilai tambah agar manfaat perdagangan dapat dirasakan secara lebih luas.
- Kerja sama ekonomi Indonesia dengan Australia dan upaya mendekati standar organisasi ekonomi internasional dapat membuka peluang bagi peningkatan kualitas kebijakan dan perdagangan. Kerja sama tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki kemampuan usaha, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperluas akses pasar. Dengan persiapan yang baik, pelaku usaha Indonesia diharapkan mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat.
- Pertumbuhan ekonomi nasional perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi belum tentu dirasakan secara merata apabila kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat belum meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mendorong kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat di berbagai daerah.
- Perkembangan jumlah uang beredar dan penyaluran kredit menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan kestabilan ekonomi. Kredit yang meningkat dapat membantu perusahaan mengembangkan usaha dan membuka lapangan kerja. Namun, penyalurannya tetap perlu memperhatikan kemampuan membayar agar tidak menimbulkan masalah keuangan bagi masyarakat maupun dunia usaha.
- Kebijakan Bank Indonesia mengenai likuiditas perbankan dapat membantu menjaga kelancaran penyaluran dana kepada masyarakat dan perusahaan. Ketersediaan dana yang memadai dapat

mendukung kegiatan produksi, investasi, dan konsumsi. Meski demikian, kebijakan tersebut perlu berjalan seimbang dengan upaya menjaga inflasi dan kestabilan sistem keuangan.

- Kenaikan harga pangan dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi rumah tangga yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemerintah perlu menjaga ketersediaan bahan pokok, memperlancar distribusi, dan mengawasi perkembangan harga. Bantuan pangan juga perlu disalurkan secara tepat sasaran agar dapat membantu masyarakat yang paling membutuhkan.
- Program stimulus ekonomi dan pelatihan kerja dapat membantu memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kemampuan masyarakat. Program tersebut akan memberikan manfaat lebih besar apabila disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan sektor usaha. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan usaha.
- Pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih perlu memperhatikan keberadaan usaha kecil yang telah berjalan. Koperasi diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat perekonomian desa. Namun, pelaksanaannya perlu melibatkan pedagang kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah agar tidak menimbulkan persaingan yang merugikan usaha yang sudah ada.
- Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi langkah penting untuk menjaga ekonomi masyarakat. Dukungan berupa akses pembiayaan, pendampingan, pemasaran, dan kemudahan perizinan dapat membantu usaha kecil berkembang. Jika usaha kecil semakin kuat, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan tidak hanya terkumpul pada perusahaan besar.
- Peningkatan investasi di Jawa Tengah membuka peluang untuk memperluas kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Hingga triwulan ketiga 2026, nilai investasi di provinsi ini mencapai sekitar Rp72,54 triliun, sedangkan target hingga akhir tahun sebesar Rp110 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah perlu menjaga kepercayaan investor dan memastikan proses penanaman modal berjalan dengan baik.
- Pengembangan kawasan industri baru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah Jawa Tengah. Kawasan tersebut berpotensi menarik perusahaan, meningkatkan kegiatan produksi, dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Agar manfaatnya lebih besar, pembangunan kawasan perlu disertai kesiapan infrastruktur dan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
- Investasi perlu memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, bukan hanya meningkatkan nilai penanaman modal. Pemerintah daerah dapat mendorong perusahaan untuk merekrut tenaga kerja setempat dan bekerja sama dengan pelaku usaha lokal. Langkah ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara perusahaan dan lingkungan sekitarnya.
- Keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kegiatan industri perlu terus diperluas. Pelaku usaha lokal dapat memperoleh peluang sebagai pemasok bahan baku, penyedia makanan, maupun penyedia jasa pendukung perusahaan. Dengan dukungan pembinaan dan akses pasar, usaha kecil dapat ikut berkembang seiring dengan bertambahnya investasi di Jawa Tengah.
- Kestabilan harga kebutuhan pokok penting untuk menjaga daya beli masyarakat Jawa Tengah. Ketika harga pangan meningkat, pengeluaran rumah tangga dapat bertambah dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan pengawasan harga perlu terus diperhatikan oleh pemerintah daerah.
- Program Makan Bergizi Gratis dapat mendukung petani dan membuka lapangan kerja di Jawa Tengah. Keterlibatan petani lokal sebagai pemasok dapat membantu menyediakan pasar bagi hasil pertanian mereka. Selain itu, operasional 3.826 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang

tercatat telah berjalan hingga Maret 2026 menyerap lebih dari 164.000 tenaga kerja lokal, sehingga program ini turut menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah.

- Penurunan tingkat pengangguran di Jawa Tengah merupakan perkembangan positif yang perlu dipertahankan. Pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini tercatat sebesar 4,24 persen, lebih rendah daripada angka nasional sebesar 4,68 persen. Ke depan, peningkatan investasi perlu diikuti dengan penciptaan pekerjaan yang layak agar masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil.

Berita Minggu, 25 Oktober

Kesimpulan

Perekonomian dunia dan Indonesia pada akhir Oktober 2026 masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian hubungan antarnegara, tekanan inflasi, kenaikan harga energi, hingga perubahan kebijakan bank sentral. Meskipun demikian, sejumlah indikator menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masih berjalan dan peluang pertumbuhan tetap terbuka. Di Indonesia, pemerintah berupaya menjaga kestabilan ekonomi dengan memperkuat investasi, meningkatkan ekspor, mendorong kegiatan industri, serta mempertahankan daya beli masyarakat. Sementara itu, perkembangan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan peluang yang cukup besar melalui peningkatan investasi dan kerja sama antardaerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh kebijakan yang tepat, pengelolaan anggaran yang baik, dan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat.

Di tingkat internasional, kunjungan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ke Dandong, China, dan keberadaan jembatan baru yang menghubungkan kedua negara menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan. China merupakan mitra dagang terbesar Korea Utara sehingga pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mempermudah hubungan kedua negara dan meningkatkan kegiatan perdagangan. Kunjungan ini juga memiliki arti penting dalam hubungan diplomatik, terutama ketika Korea Utara semakin mempererat kerja sama militer dengan Rusia dan berupaya menjaga hubungan dengan China. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur lintas batas tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi dan politik di kawasan Asia Timur.

Selain hubungan antarnegara, arah kebijakan bank sentral dunia menjadi perhatian penting karena berpengaruh terhadap inflasi, investasi, dan kondisi pasar keuangan. Bank Sentral Amerika Serikat, Bank Sentral Eropa, dan Bank Sentral Jepang diperkirakan mempertahankan suku bunga pada pekan tersebut, meskipun masih menghadapi risiko kenaikan harga. Harga minyak yang bertahan di sekitar 100 dolar Amerika Serikat per barel serta dampak fenomena El Nino berpotensi meningkatkan biaya energi dan harga pangan. Di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi dan data inflasi akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan berikutnya, sedangkan Eropa juga menghadapi tantangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor. Perkembangan tersebut dapat memengaruhi negara-negara berkembang di Asia karena suku bunga yang tinggi dan imbal hasil investasi di negara maju dapat mendorong keluarnya modal asing. Oleh sebab itu, negara-negara berkembang perlu menjaga kestabilan mata uang, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan kepercayaan investor di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya stabil.

Di Indonesia, kondisi ekonomi dinilai masih cukup kuat meskipun tekanan dari luar negeri dan pasar keuangan tetap perlu diperhatikan. Pemerintah melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berada di atas 5 persen, sementara indeks aktivitas manufaktur pada September 2026 mencapai 52,4 yang menunjukkan bahwa kegiatan industri masih berkembang. Investasi pada semester pertama

2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, neraca perdagangan masih mencatat surplus dan peringkat kredit Indonesia tetap berada pada tingkat layak investasi dengan prospek stabil. Namun, sejumlah ekonom masih melihat adanya risiko terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama jika tekanan nilai tukar, kondisi pasar keuangan, dan ketidakpastian global terus berlanjut. Artinya, capaian ekonomi yang positif perlu diikuti dengan kebijakan yang konsisten agar kepercayaan masyarakat dan investor tetap terjaga.

Untuk mempertahankan pertumbuhan sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup, pemerintah menyiapkan berbagai program stimulus pada kuartal keempat 2026. Program tersebut meliputi bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat, subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan bagi 13,3 juta pekerja, serta potongan biaya transportasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah juga merencanakan program magang nasional dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja pada 2027. Berbagai program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga kegiatan konsumsi agar tetap berjalan. Namun, manfaatnya akan lebih besar apabila bantuan disalurkan secara tepat sasaran dan disertai upaya memperluas kesempatan kerja, sehingga dukungan pemerintah tidak hanya membantu masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk memperoleh penghasilan secara berkelanjutan.

Di sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat 5,75 persen di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar saham. Bank Indonesia memilih memperkuat pengelolaan likuiditas perbankan dan menjaga kestabilan nilai tukar daripada langsung menaikkan suku bunga acuan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menurunkan Giro Wajib Minimum bersih sebesar satu poin persentase hingga Desember 2026, yang diperkirakan dapat menambah likuiditas perbankan dan mendukung penyaluran kredit. Meskipun demikian, tekanan terhadap pasar saham juga menunjukkan pentingnya transparansi kepemilikan saham dan perbaikan tata kelola pasar keuangan. Oleh karena itu, menjaga kestabilan ekonomi tidak cukup hanya melalui kebijakan suku bunga dan nilai tukar, tetapi juga membutuhkan aturan yang jelas, informasi yang terbuka, serta kepastian bagi investor. Kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi menjadi penting agar modal tetap tersedia untuk mendukung kegiatan usaha dan pembangunan nasional.

Tantangan lainnya terlihat pada lambatnya penyerapan anggaran pemerintah daerah. Hingga 24 Oktober 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp737 triliun atau 58,35 persen dari total anggaran sebesar Rp1.263,12 triliun. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025 dan 2024, sehingga masih terdapat anggaran yang cukup besar untuk direalisasikan sebelum tahun berakhir. Lambatnya belanja dapat mengurangi perputaran uang di daerah karena kegiatan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta pekerjaan yang melibatkan usaha kecil dan tenaga kerja ikut tertunda. Keadaan tersebut juga dipengaruhi oleh penurunan transfer dari pemerintah pusat, penyesuaian anggaran, kendala pengadaan, dan ketidakpastian jadwal penyaluran dana. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperbaiki perencanaan dan mempercepat pelaksanaan program sejak awal tahun, tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan pengawasan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, anggaran daerah dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi setempat.

Untuk memperkuat sumber pertumbuhan baru, pemerintah Indonesia juga mendorong investasi di bidang teknologi, pusat data, semikonduktor, energi, dan ekonomi kreatif. Kerja sama dengan India diarahkan untuk mendukung pengembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan, desain cip, dan teknologi pendukung lainnya. Kawasan Ekonomi Khusus seperti Nongsa, kawasan di Tangerang Selatan, Karawang, dan Singhasari diharapkan dapat menjadi tempat berkembangnya investasi, penelitian, inovasi, serta kegiatan usaha berbasis teknologi. Di sisi lain, penerapan biodiesel 50 sejak Juli 2026 dan pengembangan energi baru terbarukan diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Langkah tersebut

dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru apabila didukung oleh infrastruktur, pasokan energi, tenaga kerja terampil, dan kepastian perizinan. Dengan demikian, pengembangan industri dan teknologi perlu berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja agar manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih luas.

Di Jawa Tengah, peningkatan investasi menjadi salah satu pendorong utama untuk memperluas kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Hingga triwulan ketiga 2026, nilai investasi di provinsi tersebut mencapai sekitar Rp72,54 triliun, dan pemerintah daerah menargetkan nilainya dapat mencapai Rp110 triliun sampai akhir tahun. Target tersebut didukung oleh upaya menarik investor dalam negeri dan luar negeri, termasuk rencana masuknya perusahaan dari Vietnam, penyelenggaraan forum investasi, serta persiapan kawasan industri baru. Selain kawasan industri yang telah beroperasi di sejumlah wilayah, Jawa Tengah juga sedang menyiapkan sekitar 12 kawasan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Agar investasi tersebut memberikan hasil yang optimal, pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur, kemudahan perizinan, keamanan, kepastian hukum, dan ketersediaan tenaga kerja. Dengan dukungan tersebut, investasi tidak hanya meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga berpotensi memperluas kesempatan kerja dan menggerakkan usaha masyarakat di sekitar kawasan industri.

Selain menarik investasi, Jawa Tengah juga memperkuat kerja sama dengan Jawa Timur melalui berbagai kesepakatan di bidang ketahanan pangan, koperasi dan usaha kecil, industri, perdagangan, pertanian, peternakan, serta pengembangan tenaga kerja. Kerja sama ini penting karena kedua provinsi memiliki potensi yang dapat saling melengkapi. Sebagai contoh, Jawa Tengah dapat memenuhi kebutuhan gula kristal yang diproduksi di Banyumas, sedangkan Jawa Timur dapat mendukung pemenuhan kebutuhan susu di Jawa Tengah. Hubungan antardaerah tersebut diharapkan dapat memperluas pasar, memperlancar distribusi barang, dan membuka peluang usaha baru bagi pelaku usaha di kedua wilayah. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memperhatikan perubahan harga kebutuhan pokok. Pada 25 Oktober 2026, harga cabai rawit merah tercatat Rp102.950 per kilogram meskipun mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Harga sejumlah bahan pangan lainnya juga menunjukkan pergerakan yang berbeda-beda. Kondisi ini menegaskan pentingnya menjaga pasokan dan kelancaran distribusi agar kenaikan harga tidak terlalu membebani rumah tangga.

Secara keseluruhan, berita ekonomi pada 25 Oktober 2026 menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan masih terbuka, baik di tingkat internasional, nasional, maupun Jawa Tengah, tetapi peluang tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang baik. Ketidakpastian global, tekanan inflasi, perubahan kebijakan suku bunga, dan pergerakan modal asing menjadi faktor yang perlu diwaspadai Indonesia. Di dalam negeri, penguatan investasi dan ekspor, bantuan untuk masyarakat, perbaikan tata kelola pasar keuangan, serta percepatan belanja pemerintah dapat membantu menjaga kegiatan ekonomi tetap berjalan. Sementara itu, Jawa Tengah dapat memanfaatkan peningkatan investasi, pembangunan kawasan industri, dan kerja sama dengan Jawa Timur untuk memperluas kesempatan kerja serta menciptakan sumber pertumbuhan baru. Seluruh upaya tersebut perlu dilaksanakan secara terarah dan saling mendukung agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dari angka investasi dan produksi, tetapi juga memberikan manfaat nyata melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan daya beli masyarakat.

Ringkasan

- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi Dandong, China, dan meninjau jembatan baru yang menghubungkan kedua negara. Pembangunan jembatan ini menjadi simbol penguatan hubungan bilateral dan diharapkan dapat memperlancar perdagangan serta meningkatkan hubungan antarmasyarakat. Kunjungan tersebut juga menunjukkan upaya Korea Utara menjaga hubungan dengan China di tengah perkembangan kerja sama militernya dengan Rusia dan dinamika politik di kawasan Asia.

- Bank Sentral Amerika Serikat, Bank Sentral Eropa, dan Bank Sentral Jepang diperkirakan mempertahankan suku bunga pada pekan terakhir Oktober 2026. Meskipun demikian, ketiganya masih menghadapi risiko kenaikan inflasi akibat meningkatnya harga energi dan pangan. Kondisi tersebut membuat bank sentral harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan agar inflasi dapat dikendalikan tanpa terlalu menekan kegiatan ekonomi.
- Perekonomian Amerika Serikat diperkirakan tumbuh sebesar 3,5 persen secara tahunan, didukung oleh investasi bisnis yang kuat dan belanja konsumen yang tetap bertahan. Namun, perkembangan inflasi masih menjadi perhatian karena kenaikan harga dapat memengaruhi keputusan suku bunga berikutnya. Data pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi bank sentral dalam menentukan arah kebijakan moneter pada akhir tahun.
- Harga minyak dunia bertahan di sekitar 100 dolar Amerika Serikat per barel akibat kekhawatiran terhadap pasokan dari Timur Tengah. Pada saat yang sama, fenomena El Niño yang semakin intensif berpotensi mengganggu kondisi cuaca dan produksi pangan di sejumlah wilayah Asia. Jika pasokan energi dan pangan terganggu, biaya produksi serta harga kebutuhan masyarakat dapat meningkat sehingga menambah tekanan terhadap inflasi.
- Kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan kemungkinan suku bunga negara maju tetap tinggi dapat membuat investor lebih tertarik menempatkan dananya di negara maju. Kondisi ini berpotensi mendorong keluarnya modal asing dari negara berkembang dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar mata uang mereka. Oleh karena itu, bank sentral di Asia perlu menjaga stabilitas harga dan nilai tukar sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Pemerintah Inggris menghadapi tantangan untuk membantu masyarakat mengatasi krisis energi sekaligus menjaga disiplin anggaran agar kepercayaan investor tetap terpelihara. Sementara itu, sejumlah negara Eropa akan merilis data pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kepercayaan dunia usaha dan konsumen. Data tersebut penting untuk melihat kemampuan perekonomian Eropa bertahan di tengah ketidakpastian politik, tekanan harga, dan perlambatan pertumbuhan.
- Harga sejumlah bahan pangan masih mengalami perubahan. Pada 25 Oktober 2026, harga cabai rawit merah mencapai Rp102.950 per kilogram, meskipun turun Rp850 dibandingkan hari sebelumnya. Harga cabai rawit hijau dan cabai merah keriting juga mengalami penurunan, sedangkan cabai merah besar justru meningkat. Perbedaan pergerakan harga ini menunjukkan bahwa kondisi setiap komoditas belum sepenuhnya stabil, sehingga pemantauan pasokan dan distribusi perlu dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
- Penyerapan belanja pemerintah daerah masih berjalan lambat. Hingga 24 Oktober 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp737 triliun atau 58,35 persen dari total anggaran sebesar Rp1.263,12 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan 2025, sehingga pemerintah daerah masih harus merealisasikan anggaran dalam jumlah besar sebelum akhir tahun. Lambatnya belanja ini berpotensi menghambat kegiatan ekonomi karena pengeluaran pemerintah berperan mendukung pembangunan, usaha lokal, dan penyerapan tenaga kerja.
- Transfer dari pemerintah pusat kepada daerah turun dari Rp919,9 triliun pada 2025 menjadi Rp693 triliun pada 2026. Selain penyesuaian anggaran, pemerintah daerah juga menghadapi ketidakpastian jadwal penyaluran dana, proses pengadaan yang lambat, serta keterbatasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Akibatnya, sebagian daerah memilih menahan dana untuk memenuhi kebutuhan wajib, sedangkan percepatan belanja menjelang akhir tahun berisiko membuat proyek kurang optimal.
- Sejumlah ekonom menekankan pentingnya disiplin fiskal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunikasi kebijakan yang transparan untuk mempertahankan kepercayaan investor. Pengelolaan anggaran yang terarah juga diperlukan agar pemerintah dapat memenuhi

kewajiban keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan yang konsisten dan dapat dipercaya, Indonesia diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar di tengah tekanan ekonomi global.

- Hasil survei yang diberitakan menunjukkan bahwa sebagian ekonom menilai kondisi ekonomi berpotensi memburuk, terutama karena tekanan inflasi dan tantangan penciptaan lapangan kerja. Kekhawatiran tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memperhatikan perkembangan harga kebutuhan pokok, kemampuan belanja rumah tangga, dan kesempatan kerja agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas.
- Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada 5,75 persen dan menurunkan rasio giro wajib minimum bagi perbankan sebesar satu poin persentase. Kebijakan tersebut diperkirakan menambah likuiditas perbankan sekitar Rp97 triliun sehingga bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar serta tekanan inflasi.
- Pemerintah melaporkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester pertama 2026, didukung oleh aktivitas manufaktur yang berada pada tingkat ekspansif dengan indeks 52,4 dan kepercayaan konsumen sebesar 118,1. Cadangan devisa tercatat sebesar 146,3 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen dan jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang. Capaian tersebut menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif terjaga, meskipun pemerintah masih perlu memperkuat kepercayaan investor dan menjaga daya beli masyarakat.
- Program yang disiapkan mencakup bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat serta subsidi upah Rp300.000 per bulan selama tiga bulan bagi 13,3 juta pekerja. Pemerintah juga memberikan potongan biaya transportasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru untuk membantu mengurangi beban perjalanan masyarakat. Selain itu, program magang nasional dan pelatihan kerja direncanakan pada 2027 agar keterampilan tenaga kerja meningkat dan kesempatan memperoleh pekerjaan semakin luas.
- Pemerintah mendorong pengembangan pusat data, industri semikonduktor, dan ekonomi kreatif melalui pembangunan infrastruktur digital serta kerja sama dengan India. Kawasan seperti Nongsa, Tangerang Selatan, dan Karawang dinilai memiliki potensi untuk mendukung investasi pusat data dan teknologi. Pengembangan sektor ini diharapkan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, menciptakan peluang kerja baru, dan memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi global.
- Pemerintah berupaya meningkatkan ekspor dari berbagai sektor, terutama industri manufaktur, sekaligus mengatasi hambatan yang mengurangi kemampuan perusahaan menjangkau pasar internasional. Penerapan biodiesel 50 diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Di samping itu, pengembangan energi terbarukan serta perbaikan proses perizinan diharapkan dapat menarik investasi, menciptakan nilai tambah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Kedua provinsi menandatangani 10 nota kesepahaman yang mencakup ketahanan pangan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, perdagangan, pertanian, peternakan, serta pengembangan tenaga kerja. Kerja sama tersebut bertujuan menghubungkan potensi dan kebutuhan kedua wilayah agar kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih efektif. Sebagai contoh, Jawa Tengah dapat memenuhi kebutuhan gula kristal bagi Jawa Timur, sedangkan Jawa Timur dapat membantu memenuhi kebutuhan susu di Jawa Tengah.
- Hingga triwulan ketiga 2026, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp72,54 triliun, sementara pemerintah daerah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi Rp110 triliun pada akhir tahun. Pemerintah optimistis target dapat tercapai dengan dukungan promosi

investasi, forum bisnis, kerja sama antardaerah, dan rencana masuknya perusahaan dari Vietnam. Peningkatan investasi diharapkan memperkuat kegiatan usaha serta membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

- Saat ini terdapat sekitar tujuh kawasan industri yang telah beroperasi di sejumlah daerah, termasuk Semarang, Demak, Kendal, Batang, dan Brebes. Selain itu, pemerintah sedang menyiapkan sekitar 12 kawasan baru untuk menarik investasi dan mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di berbagai wilayah. Keberadaan kawasan industri diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan aktivitas usaha pendukung, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dilaporkan mencapai 5,80 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional menurut berita tersebut. Untuk mempertahankan capaian ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat promosi investasi dan menyiapkan kawasan industri yang mendukung kebutuhan dunia usaha. Dukungan aparat dalam menjaga keamanan serta kepastian hukum diharapkan meningkatkan keyakinan investor, sehingga investasi yang masuk dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Implikasi

- Pembangunan dan pembukaan jembatan baru antara Korea Utara dan China berpotensi memperkuat konektivitas perdagangan serta hubungan ekonomi kedua negara. Bagi Korea Utara, kedekatan dengan China sebagai mitra dagang utama dapat membuka peluang untuk memperlancar pertukaran barang dan memperkuat kegiatan ekonomi lintas batas. Namun, perkembangan ini juga menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi tetap berkaitan erat dengan kepentingan diplomatik dan situasi geopolitik kawasan.
- Sikap The Federal Reserve, Bank Sentral Eropa, dan Bank Sentral Jepang yang diperkirakan mempertahankan suku bunga menunjukkan bahwa pengendalian inflasi masih menjadi prioritas. Kondisi ini dapat membuat biaya pinjaman tetap tinggi bagi perusahaan dan masyarakat, sehingga keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan usaha, atau meningkatkan konsumsi perlu dipertimbangkan dengan lebih hati-hati. Jika tekanan inflasi kembali meningkat, peluang kenaikan suku bunga pada akhir 2026 juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dunia.
- Harga minyak yang bertahan tinggi serta gangguan cuaca akibat fenomena El Niño berpotensi meningkatkan biaya produksi, transportasi, dan distribusi barang. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor energi, tetapi juga sektor pertanian dan pangan yang bergantung pada kondisi cuaca serta kelancaran pasokan. Jika kenaikan biaya tersebut berlangsung lama, rumah tangga dapat menghadapi harga kebutuhan yang lebih mahal, sementara perusahaan berisiko mengalami peningkatan biaya operasional.
- Kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan prospek suku bunga negara maju yang tetap tinggi dapat membuat sebagian investor lebih tertarik menempatkan dananya di pasar keuangan negara maju. Akibatnya, negara berkembang di Asia berisiko mengalami keluarnya modal asing dan tekanan terhadap nilai tukar. Keadaan ini mendorong negara-negara tersebut untuk menjaga stabilitas keuangan, memperkuat kepercayaan investor, serta menyiapkan kebijakan yang mampu mengurangi dampak perubahan arus modal.
- Perkiraan pertumbuhan kawasan euro yang melambat menjadi 0,2 persen pada kuartal ketiga menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi Eropa masih menghadapi tantangan. Pemerintah perlu mempertimbangkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan biaya energi tanpa mengabaikan disiplin anggaran dan kepercayaan investor. Apabila pertumbuhan terus melemah, permintaan terhadap barang dan jasa dapat ikut berkurang, sehingga negara yang memiliki hubungan perdagangan dengan Eropa juga perlu mengantisipasi perubahan permintaan pasar.

- Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, aktivitas manufaktur, dan kepercayaan konsumen dari Amerika Serikat, China, Jepang, serta negara lainnya menjadi dasar penting bagi investor untuk menentukan langkah berikutnya. Perbedaan kondisi ekonomi antarnegara dapat memengaruhi arah suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, dan perdagangan internasional. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu terus menyesuaikan strategi dengan perkembangan global agar risiko ekonomi dapat dikendalikan dan peluang pasar tetap dimanfaatkan.
- Harga cabai rawit merah yang mencapai Rp102.950 per kilogram pada 25 Oktober 2026 menunjukkan bahwa sebagian komoditas pangan masih memiliki tekanan harga yang tinggi. Kondisi tersebut dapat menambah pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila harga pangan tetap tinggi, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga agar kenaikan biaya hidup tidak semakin membebani masyarakat.
- Realisasi belanja pemerintah daerah yang baru mencapai Rp737 triliun atau 58,35 persen dari pagu anggaran per 24 Oktober 2026 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih menghadapi kendala. Jika belanja barang, jasa, dan modal tidak segera dilaksanakan secara efektif, kontraktor lokal, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta tenaga kerja berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, percepatan anggaran perlu dilakukan melalui perencanaan dan pengadaan yang lebih baik, bukan sekadar menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun.
- Penurunan transfer ke daerah dari Rp919,9 triliun pada 2025 menjadi Rp693 triliun pada 2026 mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan prioritas belanjanya. Ketidakpastian jumlah dan waktu penyaluran dana juga dapat membuat pemerintah daerah menahan kas untuk menjaga pembayaran kebutuhan wajib. Implikasinya, pemerintah pusat perlu memberikan kepastian mengenai jadwal transfer dan menyederhanakan petunjuk teknis, sedangkan pemerintah daerah harus memperbaiki perencanaan agar anggaran dapat digunakan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas program.
- Survei ahli ekonomi yang menempatkan kredibilitas institusi dan kebijakan sebagai prioritas bagi 62 persen responden menunjukkan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Kejelasan arah kebijakan, pengelolaan defisit yang terukur, serta penggunaan anggaran yang efisien dapat membantu mempertahankan kepercayaan investor dan menjaga peringkat kredit negara. Sebaliknya, kebijakan yang berubah-ubah atau kurang transparan berisiko menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan kehati-hatian investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.
- Hasil survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang menunjukkan bahwa 52 persen ekonom menilai kondisi ekonomi memburuk dibandingkan tiga bulan sebelumnya perlu menjadi perhatian pemerintah. Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menjaga indikator makroekonomi, tetapi juga memperhatikan harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, pendapatan rumah tangga, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Kebijakan moneter Bank Indonesia, termasuk suku bunga acuan sebesar 5,75 persen dan dukungan likuiditas perbankan, memiliki peran dalam menjaga kestabilan ekonomi sekaligus mendukung penyaluran pembiayaan. Suku bunga yang terjaga dapat membantu mengendalikan tekanan harga dan mendukung stabilitas keuangan, sedangkan ketersediaan likuiditas dapat membantu perbankan memenuhi kebutuhan pembiayaan dunia usaha. Namun, pelaksanaannya perlu memperhatikan perkembangan inflasi, nilai tukar, dan kebutuhan sektor produktif agar upaya menjaga stabilitas tidak menghambat kegiatan usaha secara berlebihan.

- Paket stimulus kuartal keempat, seperti bantuan pangan, subsidi upah, dan insentif transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru, berpotensi membantu masyarakat mempertahankan daya belinya. Bantuan tersebut dapat mengurangi sebagian beban pengeluaran rumah tangga, sementara diskon perjalanan berpeluang mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas usaha yang berkaitan dengan transportasi. Agar dampaknya lebih optimal, penyaluran bantuan perlu tepat sasaran dan dilaksanakan sesuai jadwal sehingga manfaatnya dapat dirasakan ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
- Rencana penyelenggaraan program magang nasional bagi 150.000 peserta dan pelatihan vokasi bagi 300.000 tenaga kerja menunjukkan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut berpotensi membantu peserta memperoleh keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga peluang memasuki pasar kerja dapat meningkat. Namun, manfaatnya akan lebih besar apabila materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan industri dan disertai kerja sama dengan perusahaan agar keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara langsung.
- Dorongan pemerintah untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus, pusat data, semikonduktor, kecerdasan buatan, dan ekonomi kreatif berpotensi memperluas investasi pada sektor bernilai tambah tinggi. Pengembangan tersebut dapat menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru, meningkatkan kemampuan industri nasional, dan memperkuat hubungan kerja sama teknologi dengan negara lain, termasuk India. Meski demikian, keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur listrik dan komunikasi, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta kepastian regulasi yang mendukung kegiatan investasi.
- Upaya meningkatkan ekspor manufaktur dan menerapkan biodiesel B50 diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik serta mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Program B50 diperkirakan dapat menghemat devisa hingga Rp170 triliun sekaligus meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit. Apabila didukung oleh kelancaran produksi, kepastian kebijakan, dan peningkatan daya saing produk, langkah tersebut dapat membantu memperkuat perdagangan nasional serta mengurangi sebagian tekanan terhadap perekonomian akibat ketidakpastian global.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026, aktivitas manufaktur yang masih ekspansif, serta realisasi investasi yang meningkat menunjukkan adanya penopang bagi perekonomian nasional. Namun, capaian tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas lapangan kerja, penguatan usaha lokal, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas fiskal dan moneter serta memperkuat tata kelola pasar keuangan supaya ketahanan ekonomi dapat dipertahankan di tengah tekanan global.
- Penandatanganan sepuluh nota kesepahaman antara Jawa Tengah dan Jawa Timur membuka peluang untuk memperkuat kerja sama di bidang pangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, industri, perdagangan, pertanian, peternakan, serta pengembangan tenaga kerja. Kerja sama ini dapat membantu kedua provinsi memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi dari produksi masing-masing daerah, seperti pasokan susu dari Jawa Timur dan gula kristal dari Banyumas untuk memenuhi kebutuhan pasar Jawa Timur. Apabila ditindaklanjuti secara nyata, kolaborasi tersebut dapat memperluas pasar produk daerah, memperlancar distribusi, dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha.
- Realisasi investasi Jawa Tengah yang mencapai Rp72,54 triliun hingga triwulan ketiga 2026 menunjukkan adanya peluang untuk memperkuat kegiatan ekonomi daerah. Optimisme pemerintah provinsi untuk mencapai Rp110 triliun hingga akhir tahun, termasuk dengan rencana masuknya perusahaan dari Vietnam, dapat mendorong peningkatan kegiatan produksi dan menarik investasi baru. Jika investasi tersebut benar-benar terealisasi, manfaatnya berpotensi dirasakan melalui bertambahnya kesempatan kerja, meningkatnya permintaan

terhadap barang dan jasa lokal, serta berkembangnya kegiatan usaha pendukung di sekitar lokasi investasi.

- Keberadaan sekitar tujuh kawasan industri serta rencana menyiapkan dua belas kawasan baru menunjukkan upaya Jawa Tengah memperluas kapasitas untuk menampung investasi. Pengembangan kawasan tersebut dapat membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kabupaten dan kota, sekaligus memperluas kesempatan bagi industri untuk beroperasi. Namun, pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur, energi, akses transportasi, tenaga kerja yang sesuai, serta kepastian hukum agar pembangunan kawasan tidak berhenti pada tahap perencanaan dan benar-benar menghasilkan kegiatan ekonomi produktif.
- Komitmen pemerintah daerah bersama unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah dapat meningkatkan keyakinan investor dalam menjalankan usahanya. Lingkungan usaha yang aman membantu mengurangi risiko gangguan operasional, sementara kepastian hukum dan pelayanan perizinan yang baik dapat mempercepat proses realisasi investasi. Oleh karena itu, pengamanan kawasan industri perlu berjalan seiring dengan pelayanan pemerintah yang responsif, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, dan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,80 persen yang dilaporkan dalam berita menunjukkan perkembangan positif dan menjadi modal untuk memperluas kegiatan ekonomi daerah. Agar capaian tersebut berkelanjutan, pemerintah perlu menghubungkan investasi besar dengan usaha lokal, memperkuat keterampilan tenaga kerja, dan mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai pasok industri. Dengan demikian, manfaat investasi tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat perekonomian kabupaten serta kota di Jawa Tengah.
- Kerja sama antardaerah, forum investasi, serta pengembangan kawasan industri menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah berperan menyediakan kebijakan dan infrastruktur, dunia usaha membawa modal serta kegiatan produksi, sedangkan pelaku usaha lokal dapat mendukung penyediaan barang, jasa, dan tenaga kerja. Jika koordinasi tersebut dijalankan secara konsisten, Jawa Tengah berpeluang memperkuat daya saing, memperluas jaringan perdagangan antardaerah, dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.

Berita Senin, 26 Oktober

Kesimpulan

Perekonomian dunia masih menghadapi ketidakpastian karena tekanan inflasi dan perubahan kebijakan bank sentral, terutama di Amerika Serikat. Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,75%–4,00% dalam pertemuan 27–28 Oktober 2026. Meskipun demikian, keputusan tersebut belum tentu berlangsung lama karena inflasi masih meningkat, konsumsi masyarakat tetap kuat, dan investasi perusahaan terus tumbuh, terutama pada bidang teknologi kecerdasan buatan. Kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil juga menunjukkan bahwa perekonomian Amerika Serikat masih cukup kuat. Namun, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah dapat memperketat kondisi keuangan dan menambah beban pembiayaan. Oleh karena itu, Federal Reserve perlu menyeimbangkan upaya mengendalikan inflasi dengan menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjelaskannya secara jelas agar kepercayaan pasar tetap terjaga.

Ketidakpastian kebijakan moneter Amerika Serikat turut memengaruhi pergerakan pasar keuangan global. Pada 26 Oktober 2026, nilai tukar sejumlah mata uang utama dunia bergerak terbatas karena investor menunggu keputusan lima bank sentral, yaitu Federal Reserve, Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Jepang, Bank Sentral Kanada, dan Bank Sentral Selandia Baru. Pada saat yang sama, harga minyak mentah Brent turun lebih dari 1% ke kisaran 115 dolar Amerika Serikat per barel setelah sebelumnya mencapai tingkat tertinggi dalam enam bulan. Penurunan harga minyak terjadi di tengah upaya Qatar membantu meredakan ketegangan di Timur Tengah. Meskipun demikian, kekhawatiran terhadap kenaikan harga energi dan ketidakpastian permintaan teknologi kecerdasan buatan masih membuat investor berhati-hati dalam menempatkan dana pada aset berisiko. Keadaan ini menunjukkan bahwa pergerakan pasar tidak hanya ditentukan oleh keputusan suku bunga, tetapi juga oleh perkembangan geopolitik, harga komoditas, dan perkiraan arah perekonomian dunia.

Di tengah ketidakpastian global tersebut, Thailand menunjukkan kinerja ekspor yang kuat pada September 2026. Nilai ekspornya meningkat 24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didukung oleh permintaan terhadap produk elektronik yang berkaitan dengan kecerdasan buatan serta komoditas pertanian dan makanan. Ekspor Thailand ke Amerika Serikat meningkat 50,1%, sedangkan ekspor ke Tiongkok tumbuh 18,4%. Kinerja tersebut mendorong pemerintah Thailand menaikkan perkiraan pertumbuhan ekspor sepanjang 2026 menjadi 19%. Namun, peningkatan ekspor juga diikuti kenaikan impor sebesar 50,4%, sehingga defisit perdagangan melebar menjadi 5,86 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekspor yang tinggi belum tentu langsung memperkuat keseimbangan perdagangan apabila kebutuhan impor juga meningkat lebih cepat. Dengan demikian, pengalaman Thailand menunjukkan pentingnya meningkatkan daya saing produk, memperluas pasar ekspor, serta memperkuat kemampuan produksi dalam negeri agar manfaat perdagangan internasional dapat dirasakan secara lebih besar.

Perkembangan ekonomi global tersebut turut memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya defisit transaksi berjalan. Pada perdagangan 26 Oktober 2026, rupiah sempat berada di sekitar Rp18.087 per dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan dan kemudian ditutup melemah ke sekitar Rp18.124 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini berkaitan dengan tekanan eksternal serta kebutuhan Indonesia terhadap impor, khususnya energi, yang nilainya dapat meningkat ketika harga minyak dunia naik. Bank Indonesia menjelaskan bahwa defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua 2026 mencapai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,3% dari produk domestik bruto. Sementara itu, neraca pembayaran Indonesia masih mengalami defisit sebesar 900 juta dolar Amerika Serikat, meskipun nilainya lebih kecil dibandingkan defisit kuartal sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat ekspor, mengurangi ketergantungan pada barang impor yang dapat diproduksi di dalam negeri, serta memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kebutuhan terhadap dolar Amerika Serikat dan membantu menjaga kestabilan rupiah.

Selain menghadapi tekanan nilai tukar, Indonesia juga perlu memperbaiki pengelolaan anggaran negara dan kinerja badan usaha milik negara agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif. Pemerintah menetapkan target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 2,85% dari produk domestik bruto, sedangkan hingga September 2026 defisit tercatat sekitar Rp319 triliun atau 1,24% dari produk domestik bruto. Pada saat yang sama, pembahasan mengenai restrukturisasi badan usaha milik negara menunjukkan masih adanya persoalan kinerja dan pengelolaan aset yang perlu ditangani. Di antaranya menyampaikan bahwa 52% dari 1.074 badan usaha milik negara mengalami kerugian, dengan jumlah kerugian sekitar Rp20 triliun per tahun. Selain itu, terdapat persoalan transaksi antarbadan usaha yang dinilai tidak efisien dan penurunan nilai aset yang mencapai Rp135 triliun. Keadaan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap perusahaan yang berkinerja buruk, perbaikan tata kelola, dan peningkatan keterbukaan dalam pengelolaan aset. Apabila dilakukan secara tepat, restrukturisasi dapat membantu mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas

perusahaan, dan mendorong badan usaha milik negara memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian.

Di samping menjaga stabilitas keuangan dan memperbaiki pengelolaan perusahaan negara, pemerintah juga perlu memperhatikan daya beli masyarakat melalui pengendalian harga pangan. Pada pekan ketiga Oktober 2026, sebagian harga bahan pangan mengalami penurunan, tetapi harga sejumlah komoditas masih berada di atas batas yang ditetapkan pemerintah. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai rawit merah, yang di beberapa daerah mencapai Rp100.000 per kilogram, dengan harga rata-rata nasional sekitar Rp92.111 per kilogram. Harga pangan yang tinggi dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Karena itu, upaya menjaga pasokan perlu dilakukan melalui distribusi pangan, Gerakan Pangan Murah, serta penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Pemerintah juga perlu memperkuat produksi dan distribusi agar pasokan tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu. Dalam jangka panjang, pengendalian harga perlu didukung oleh peningkatan produktivitas, pengembangan industri pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya domestik. Dengan demikian, stabilitas harga dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional.

Di tengah tantangan ekonomi nasional dan global, Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sepanjang Januari hingga September 2026, realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp72,54 triliun atau tumbuh 9,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut terdiri atas penanaman modal asing sebesar Rp40,77 triliun dan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp31,77 triliun, atau sekitar 73,21% dari target resmi tahunan sebesar Rp99,09 triliun. Pada kuartal ketiga 2026 saja, investasi mencapai Rp24 triliun, meningkat 16,78% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut juga membuka 340.334 kesempatan kerja, dengan penyerapan tenaga kerja terbesar berasal dari industri barang berbahan kulit dan alas kaki serta industri tekstil. Capaian ini menunjukkan bahwa investasi memiliki peran penting dalam memperluas kegiatan usaha dan menyediakan pekerjaan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun optimistis dapat mencapai investasi hingga Rp110 triliun pada akhir tahun dengan memperhitungkan investasi usaha mikro dan kecil. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu terus menjaga keamanan daerah, mempermudah perizinan, serta memastikan investasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Salah satu faktor yang mendukung peningkatan investasi Jawa Tengah adalah keberadaan kawasan industri, terutama di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang. Pada Januari hingga September 2026, investasi asing di Kendal mencapai Rp11,65 triliun, sedangkan Batang mencatat Rp7,85 triliun. Jika digabungkan, keduanya memperoleh sekitar Rp19,5 triliun atau hampir 27% dari total investasi Jawa Tengah pada periode tersebut. Selain kedua daerah itu, Kota Semarang juga menjadi salah satu tujuan utama investasi, dengan nilai gabungan penanaman modal asing dan dalam negeri mencapai Rp9,08 triliun. Dari sisi asal investasi asing, Hong Kong menempati posisi pertama dengan Rp11,02 triliun, diikuti Singapura sebesar Rp9,59 triliun dan Tiongkok sebesar Rp6,74 triliun. Besarnya investasi yang masuk memperlihatkan bahwa kawasan industri dapat menjadi daya tarik bagi perusahaan yang ingin mengembangkan kegiatan produksi. Untuk memperluas peluang tersebut, pemerintah merencanakan penambahan 12 kawasan industri baru di sejumlah kabupaten dan kota. Jawa Tengah juga memiliki 1.557 sekolah menengah kejuruan dengan lebih dari 800.000 siswa, serta 2.002 lembaga pelatihan kerja. Ketersediaan tenaga kerja ini menjadi modal penting, tetapi pendidikan dan pelatihan tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri agar masyarakat setempat dapat memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas.

Selain investasi industri, kegiatan olahraga dan perbaikan peraturan daerah turut mendukung aktivitas ekonomi serta tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah pada 25–31 Oktober 2026 diikuti oleh 7.999 atlet dari 35 kabupaten dan kota yang bertanding dalam 58 cabang olahraga. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan

memperkuat persatuan antardaerah, tetapi juga meningkatkan perputaran ekonomi, terutama bagi hotel, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pelaku usaha lain yang melayani peserta dan pengunjung. Pada bidang pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyepakati perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan organisasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak serta retribusi. Pelaksanaannya masih perlu ditindaklanjuti melalui peraturan gubernur, sehingga dampaknya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah belum dapat dipastikan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal yang mendekati 8% memperlihatkan potensi daerah tersebut sebagai pusat kegiatan industri dan investasi. Namun, pembangunan Kendal tetap perlu didukung oleh pengembangan sektor pertanian, wilayah pesisir, kemandirian pangan dan energi, serta keterlibatan generasi muda dalam menciptakan usaha dan inovasi.

Secara keseluruhan, berita ekonomi internasional, nasional, dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan masih terbuka, tetapi keberhasilannya bergantung pada kemampuan menghadapi berbagai risiko dan mengelola sumber daya secara tepat. Di tingkat internasional, tekanan inflasi, kebijakan suku bunga, perubahan harga minyak, dan ketidakpastian pasar keuangan dapat memengaruhi arus modal serta perdagangan antarnegara. Di Indonesia, tekanan terhadap rupiah, defisit transaksi berjalan, persoalan kinerja badan usaha milik negara, dan kenaikan harga pangan menunjukkan perlunya kebijakan yang menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kemampuan produksi dalam negeri. Sementara itu, Jawa Tengah memiliki peluang untuk mendorong pertumbuhan melalui investasi, pengembangan kawasan industri, penciptaan lapangan kerja, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Agar manfaatnya lebih merata, investasi perlu diikuti peningkatan keterampilan tenaga kerja, keterlibatan usaha mikro dan kecil dalam rantai pasok industri, serta pengembangan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Generasi muda juga perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam menciptakan usaha, memperluas pemasaran, dan menghasilkan inovasi. Pada akhirnya, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dari besarnya investasi, tetapi juga menghasilkan lapangan kerja yang layak, harga kebutuhan yang lebih terjangkau, pengelolaan keuangan yang baik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ringkasan

- Bank Sentral Amerika Serikat diperkirakan mempertahankan suku bunga pada kisaran 3,75–4,00 persen dalam pertemuan 27–28 Oktober 2026. Keputusan ini dipengaruhi oleh inflasi yang masih tinggi dan kuatnya investasi di bidang kecerdasan buatan. Bank sentral perlu menjaga kestabilan harga tanpa terlalu menekan pertumbuhan ekonomi.
- Pasar keuangan dunia bergerak hati-hati menjelang keputusan lima bank sentral, yaitu Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Kanada, dan Selandia Baru. Pelaku pasar memperhatikan perkembangan inflasi, kondisi tenaga kerja, serta kepercayaan konsumen. Keputusan suku bunga dari negara-negara tersebut dapat memengaruhi nilai tukar, investasi, dan pergerakan pasar keuangan dunia.
- Harga minyak mentah Brent turun lebih dari 1 persen setelah sebelumnya mencapai tingkat tertinggi dalam enam bulan. Penurunan ini berkaitan dengan upaya mediasi Qatar untuk meredakan ketegangan. Sementara itu, imbal hasil obligasi menurun dan saham teknologi mengalami tekanan, menunjukkan bahwa investor masih berhati-hati menghadapi ketidakpastian global.
- Ekspor Thailand pada September 2026 meningkat 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama didorong oleh produk elektronik, komponen teknologi kecerdasan buatan, pertanian, dan makanan. Ekspor ke Amerika Serikat naik 50,1 persen, sedangkan ekspor ke Tiongkok

meningkat 18,4 persen. Namun, impor juga tumbuh 50,4 persen sehingga Thailand mencatat defisit perdagangan sebesar 5,86 miliar dolar Amerika Serikat.

- Rupiah ditutup melemah 0,37 persen ke posisi Rp18.124 per dolar Amerika Serikat pada 26 Oktober 2026. Tekanan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global, pergerakan dana investor asing, dan tingginya harga minyak. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan biaya impor dan memengaruhi harga barang di dalam negeri.
- Bank Indonesia menyampaikan bahwa defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua 2026 mencapai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 3,3 persen dari produk domestik bruto. Sementara itu, defisit neraca pembayaran tercatat 900 juta dolar Amerika Serikat, jauh lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Untuk memperkuat kondisi eksternal, Indonesia perlu meningkatkan ekspor, mengurangi ketergantungan pada barang impor, dan memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional.
- Danantara mengungkapkan bahwa sekitar 52 persen dari 1.074 badan usaha milik negara mengalami kerugian, dengan nilai kerugian sekitar Rp20 triliun per tahun. Selain itu, terdapat ketidakefisienan transaksi sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat per tahun dan penurunan nilai aset sebesar Rp135 triliun. Kondisi ini mendorong perlunya pembenahan tata kelola, efisiensi operasional, dan penataan kembali perusahaan agar aset negara dapat memberikan manfaat yang lebih besar.
- Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga September 2026 mencapai Rp319 triliun atau 1,24 persen dari produk domestik bruto, masih di bawah target defisit tahunan sebesar 2,85 persen. Pemerintah juga mengatur batas pembiayaan utang daerah pada 2027 sebesar 0,18 persen dari produk domestik bruto, meningkat dari 0,11 persen pada 2026. Pengaturan ini diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang pembiayaan pembangunan dengan tetap menjaga kesehatan keuangan daerah.
- Harga sejumlah bahan pangan mulai mengalami penurunan, tetapi cabai rawit merah masih tergolong mahal di beberapa pasar. Pada pekan ketiga Oktober, harga rata-rata nasionalnya mencapai Rp92.111 per kilogram, bahkan di sejumlah pasar mendekati Rp100.000 per kilogram. Pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan harga melalui distribusi pangan, Gerakan Pangan Murah, penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, serta penyediaan jagung untuk pakan ternak.
- Bank Indonesia menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang, pengembangan industri bernilai tambah, dan pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Upaya tersebut perlu didukung oleh penguatan rantai pasok, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta investasi yang menghasilkan manfaat nyata. Kerja sama antara pemerintah, Danantara, dan sektor swasta juga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
- Realisasi investasi Jawa Tengah pada Januari–September 2026 mencapai Rp72,54 triliun, meningkat 9,7 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya. Nilai tersebut terdiri atas penanaman modal asing sebesar Rp40,77 triliun dan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp31,77 triliun. Investasi ini telah mencapai 73,21 persen dari target Rp99,09 triliun serta menyerap 340.334 tenaga kerja, terutama pada industri alas kaki dan tekstil.
- Kabupaten Kendal mencatat investasi asing sebesar Rp11,65 triliun, sedangkan Kabupaten Batang mencapai Rp7,85 triliun. Kedua daerah tersebut menyumbang investasi asing sebesar Rp19,5 triliun atau sekitar 27 persen dari total investasi Jawa Tengah. Selain kedua wilayah tersebut, Kota Semarang juga menjadi tujuan investasi penting, sementara Hong Kong, Singapura, dan Tiongkok termasuk sumber utama penanaman modal asing.
- Jawa Tengah berencana menambah 12 kawasan industri baru untuk memperluas peluang usaha dan menarik lebih banyak investor. Rencana ini perlu didukung oleh kesiapan tenaga kerja melalui sekolah kejuruan dan lembaga pelatihan. Dengan 1.557 sekolah kejuruan yang menampung lebih dari 800.000 siswa serta 2.002 lembaga pelatihan kerja, pemerintah perlu memastikan keterampilan lulusan sesuai dengan kebutuhan industri.

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membahas perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Perubahan ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan memperjelas pelaksanaan kebijakan melalui peraturan gubernur. Namun, dampaknya terhadap pendapatan asli daerah masih perlu dikaji, sementara aturan mengenai sumbangan pihak ketiga juga mengalami pembatalan.
- Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah berlangsung pada 25–31 Oktober 2026 dengan melibatkan 7.999 atlet dari 35 kabupaten dan kota yang bertanding dalam 58 cabang olahraga. Kegiatan ini tidak hanya mendorong perkembangan olahraga daerah, tetapi juga berpeluang meningkatkan aktivitas ekonomi. Hotel, usaha makanan, transportasi, dan usaha mikro serta kecil dapat memperoleh manfaat dari kedatangan atlet dan pendamping.
- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal dilaporkan mendekati 8 persen, didukung oleh investasi dan perkembangan kawasan industri. Selain sektor industri, pertanian dan potensi wilayah pesisir tetap penting untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah juga mendorong kemandirian pangan dan energi serta mengembangkan kemampuan generasi muda dalam kewirausahaan digital dan kecerdasan buatan.

Implikasi

- Perkiraan bertahannya suku bunga Amerika Serikat pada tingkat 3,75–4,00 persen menunjukkan bahwa pengendalian inflasi masih menjadi perhatian utama. Kondisi ini dapat membuat biaya pinjaman tetap tinggi dan mendorong investor lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu mewaspadai perubahan arus modal dan nilai tukar yang dapat terjadi akibat kebijakan tersebut.
- Keputusan lima bank sentral besar dapat memengaruhi pergerakan mata uang, investasi, dan pasar keuangan internasional. Apabila kebijakan suku bunga berbeda dari perkiraan investor, perubahan harga aset dapat terjadi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu memperhatikan perkembangan kebijakan moneter global agar dapat menyesuaikan strategi keuangan dan mengurangi risiko.
- Penurunan harga minyak setelah munculnya upaya mediasi menunjukkan bahwa perkembangan politik internasional dapat memengaruhi harga energi dunia. Namun, ketidakpastian yang masih berlangsung membuat harga minyak tetap berisiko berubah. Negara pengimpor energi seperti Indonesia perlu memperhitungkan kemungkinan perubahan biaya impor, anggaran subsidi energi, dan biaya produksi apabila harga minyak kembali meningkat.
- Peningkatan ekspor Thailand menunjukkan bahwa produk elektronik, teknologi, pertanian, dan makanan memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Kondisi ini dapat menjadi dorongan bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar ekspor. Indonesia juga perlu memperkuat industri pengolahan agar tidak hanya mengandalkan penjualan bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan barang dengan nilai tambah lebih tinggi.
- Pelemahan rupiah hingga Rp18.124 per dolar Amerika Serikat dapat meningkatkan biaya pembelian barang dan bahan baku dari luar negeri. Jika kenaikan biaya tersebut diteruskan kepada konsumen, harga sejumlah produk dalam negeri berpotensi ikut meningkat. Karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga kestabilan nilai tukar, sementara pelaku usaha perlu mengelola kebutuhan valuta asing dan biaya produksi secara hati-hati.
- Defisit transaksi berjalan sebesar 12,5 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal kedua 2026 menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan penerimaan dan pembayaran dari luar negeri. Peningkatan ekspor serta pengurangan ketergantungan pada barang impor dapat membantu memperkuat kondisi tersebut. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional juga berpotensi mengurangi kebutuhan terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga ketahanan ekonomi nasional dapat semakin baik.

- Besarnya jumlah badan usaha milik negara yang mengalami kerugian menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan aset dan kegiatan operasional. Restrukturisasi, pengawasan yang lebih kuat, dan pengurangan transaksi yang tidak efisien dapat membantu menekan kerugian. Apabila dilakukan secara tepat, langkah tersebut berpotensi meningkatkan kontribusi perusahaan milik negara terhadap penerimaan negara dan pembangunan ekonomi.
- Defisit anggaran negara yang mencapai Rp319 triliun hingga September 2026 menunjukkan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara belanja pembangunan dan kemampuan pembiayaan. Pengaturan batas pembiayaan utang daerah juga mendorong pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam merencanakan program. Dengan pengelolaan yang baik, pembiayaan tetap dapat digunakan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan beban keuangan yang berlebihan.
- Tingginya harga cabai rawit merah di tengah penurunan harga sejumlah bahan pangan menunjukkan bahwa kestabilan harga belum merata pada semua komoditas. Jika harga pangan tertentu tetap tinggi, pengeluaran rumah tangga dapat meningkat dan daya beli masyarakat berpotensi tertekan. Oleh karena itu, distribusi pangan, pemantauan harga, dan pelaksanaan program stabilisasi perlu dilakukan secara tepat agar pasokan tersedia dan harga lebih terjangkau.
- Dorongan terhadap industrialisasi, pengolahan sumber daya alam, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh kegiatan produktif. Investasi yang diarahkan pada industri pengolahan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai barang yang dihasilkan di dalam negeri. Langkah ini juga perlu disertai peningkatan kemampuan tenaga kerja agar manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
- Realisasi investasi Jawa Tengah sebesar Rp72,54 triliun hingga September 2026 menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan kegiatan ekonomi. Penanaman modal yang meningkat dapat memperluas usaha, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi tidak hanya meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga memberikan kesempatan kerja yang layak dan manfaat ekonomi bagi penduduk setempat.
- Besarnya investasi di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang menunjukkan bahwa kawasan industri menjadi tujuan penting bagi investor. Kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Di sisi lain, pemerintah perlu memperluas promosi investasi ke daerah lain agar kesempatan kerja dan manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada beberapa kawasan, tetapi juga menjangkau lebih banyak kabupaten dan kota.
- Rencana penambahan 12 kawasan industri dapat memperluas kesempatan investasi dan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di Jawa Tengah. Agar rencana tersebut berjalan efektif, pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja perlu disesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Hubungan yang kuat antara pemerintah, sekolah, lembaga pelatihan, dan industri dapat membantu lulusan memperoleh pekerjaan serta mengurangi kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja.
- Perubahan peraturan pajak dan retribusi daerah dapat memengaruhi kepastian hukum bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pelaksanaan aturan yang jelas diperlukan agar pemungutan pajak dan retribusi berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan kebingungan. Pemerintah juga perlu mengkaji dampaknya terhadap pendapatan asli daerah agar kebijakan tersebut tetap mendukung pembiayaan pembangunan tanpa memberikan beban yang tidak perlu kepada masyarakat dan dunia usaha.
- Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi dengan ribuan atlet dari berbagai daerah dapat meningkatkan aktivitas ekonomi selama kegiatan berlangsung. Kebutuhan penginapan, makanan, transportasi, dan perlengkapan berpotensi memberikan tambahan pendapatan bagi

pelaku usaha setempat. Agar manfaatnya lebih luas, pelaku usaha mikro dan kecil perlu mendapat kesempatan untuk menawarkan produk dan layanan kepada peserta maupun pengunjung.

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal yang mendekati 8 persen menunjukkan besarnya peran investasi dan perkembangan kawasan industri dalam kegiatan ekonomi daerah. Meski demikian, pertumbuhan perlu diimbangi dengan pengembangan sektor pertanian dan wilayah pesisir agar sumber pendapatan masyarakat semakin beragam. Penguatan kemandirian pangan dan energi, disertai peningkatan keterampilan digital serta kewirausahaan generasi muda, dapat membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Berita Selasa, 27 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional menunjukkan bahwa kondisi perekonomian dunia masih mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh aktivitas industri, perdagangan, dan kemajuan teknologi. Di China, keuntungan industri meningkat sebesar 14,4% pada September 2026, terutama didukung oleh pertumbuhan sektor kecerdasan buatan (AI), komputasi, komunikasi, dan elektronik. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang mendorong aktivitas industri dan keuntungan perusahaan. Namun, pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata karena beberapa sektor, seperti furnitur dan baterai kendaraan listrik, masih menghadapi tekanan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa China masih perlu menjaga keseimbangan pertumbuhan antarsektor sekaligus menghadapi tantangan perdagangan global. Perkembangan industri China juga penting diperhatikan karena perubahan produksi dan perdagangan di negara tersebut dapat memengaruhi aktivitas ekonomi negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan dengannya.

Selain China, kondisi ekonomi Korea Selatan juga menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 1% pada kuartal III 2026 dibandingkan kuartal sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung oleh ekspor semikonduktor yang berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan teknologi dan kecerdasan buatan. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk teknologi masih berperan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi dan perdagangan internasional. Sementara itu, Jepang mengalami kenaikan harga produsen sektor jasa sebesar 3,7%, yang menunjukkan masih adanya tekanan harga dalam kegiatan ekonominya. Perbedaan kondisi tersebut menggambarkan bahwa setiap negara menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda, mulai dari mempertahankan pertumbuhan hingga mengendalikan kenaikan harga. Perkembangan di berbagai negara ini perlu diperhatikan karena perubahan perdagangan, harga, dan permintaan global dapat memengaruhi stabilitas pasar keuangan serta kegiatan ekonomi Indonesia.

Pengaruh perkembangan ekonomi global juga terlihat pada kondisi pasar keuangan Indonesia yang mengalami tekanan. Nilai tukar rupiah melemah sebesar 0,16% hingga mencapai Rp18.153 per dolar Amerika Serikat, sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun sebesar 3,36% ke posisi 5.192,42. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pasar keuangan domestik masih menghadapi tantangan di tengah ketidakpastian ekonomi dan pergerakan pasar internasional. Untuk menjaga stabilitas, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75% serta menggunakan berbagai instrumen kebijakan, termasuk Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung kondisi pasar keuangan. Meskipun demikian, perkembangan rupiah dan IHSG tetap perlu diperhatikan karena perubahan nilai tukar dapat memengaruhi biaya impor, sedangkan tekanan di pasar saham dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

Selain menghadapi tekanan pada pasar keuangan, Indonesia juga perlu menjaga kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap terkendali. Anggaran subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp376,8 triliun atau 84,3% dari alokasi yang tersedia. Besarnya penggunaan anggaran tersebut menunjukkan bahwa subsidi dan kompensasi menjadi salah satu komponen pengeluaran pemerintah yang perlu terus diperhatikan. Pada saat yang sama, kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah berpotensi menambah beban pengeluaran negara, terutama apabila kebutuhan pembiayaan energi meningkat. Kondisi ini menimbulkan risiko terhadap defisit APBN yang diperkirakan dapat mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 2,68%. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengelola pengeluaran secara cermat, menjaga ketepatan penyaluran subsidi, dan memperhatikan perkembangan harga energi serta nilai tukar. Pengelolaan anggaran yang baik diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa meningkatkan tekanan terhadap kondisi keuangan negara secara berlebihan.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi tersebut, aktivitas pembiayaan di Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan kredit sebesar 12,7% pada September 2026. Namun, pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hanya mencapai 2,7%, sedangkan kredit modal kerja UMKM mengalami penurunan sebesar 2,6%. Di sisi lain, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp232,66 triliun, sementara tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,65%. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pembiayaan yang merata bagi pelaku usaha kecil. Padahal, akses pembiayaan sangat penting untuk membantu UMKM memenuhi kebutuhan modal, mempertahankan kegiatan usaha, meningkatkan produksi, dan memperluas pemasaran. Oleh sebab itu, pemerintah dan lembaga keuangan perlu terus memperkuat akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Upaya tersebut juga perlu disertai peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Upaya menjaga perekonomian nasional juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Melalui PMK Nomor 76 Tahun 2026, batas kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar 0,18% dari PDB, meningkat dibandingkan batas 0,11% pada tahun 2026. Selain itu, batas defisit masing-masing daerah ditetapkan maksimal 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah, kecuali terdapat persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga diwajibkan memenuhi ketentuan pelaporan, dengan konsekuensi terhadap penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola pembiayaan, tetapi tetap menetapkan batas agar risiko keuangan dapat dikendalikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan, sekaligus memastikan belanja pembangunan dilaksanakan secara tepat sasaran. Pengelolaan APBD yang disiplin akan membantu menjaga kesinambungan pembangunan dan mengurangi risiko munculnya masalah keuangan daerah.

Dalam konteks daerah, perekonomian Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan sebesar 5,71% pada kuartal II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,29%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Jawa Tengah berkembang cukup kuat dan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional. Meskipun demikian, sejumlah persoalan masih perlu diperhatikan, terutama inflasi yang mencapai 3,18% pada September 2026, tingkat pengangguran sebesar 4,30%, dan tingkat kemiskinan sebesar 9,21% pada Maret 2026. Tingkat kemiskinan tersebut memang menurun dibandingkan 9,39% pada periode sebelumnya, tetapi penurunan ini masih perlu didukung oleh program yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu secara langsung meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat apabila kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan belum merata. Karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, memperluas kesempatan kerja,

dan meningkatkan produktivitas masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat di Jawa Tengah.

Salah satu upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terlihat dari perkembangan investasi di Kabupaten Temanggung. Realisasi investasi daerah tersebut mencapai Rp1,806 triliun atau sekitar 84% dari target Rp2,15 triliun, dengan jumlah 8.791 proyek dan penyerapan 22.307 tenaga kerja. Capaian ini menunjukkan bahwa investasi memiliki peran penting dalam mendorong kegiatan usaha, meningkatkan aktivitas produksi, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Untuk mendukung perkembangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengembangkan kawasan industri, mempermudah proses perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), serta memperkuat pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis sekaligus membantu menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan adanya hubungan yang lebih baik antara investasi, pendidikan, dan pelatihan, peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dapat meningkat. Oleh karena itu, keberhasilan investasi perlu dinilai tidak hanya dari besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga dari manfaatnya terhadap penyerapan tenaga kerja dan perkembangan usaha lokal.

Selain melalui investasi dan pengembangan industri, penguatan ekonomi Jawa Tengah juga dilakukan dengan mempromosikan produk lokal serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan Jepara Octofest 2026 melibatkan 117 galeri furnitur dan ukiran kayu serta 50 stan UMKM, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk dan memperluas jaringan pemasaran. Kegiatan tersebut juga dapat membantu meningkatkan perhatian masyarakat terhadap produk unggulan Jepara, khususnya furnitur dan kerajinan ukiran kayu yang menjadi bagian dari potensi ekonomi daerah. Sementara itu, upaya fasilitasi investasi di Magelang menunjukkan pentingnya pengembangan potensi lokal untuk menarik kegiatan ekonomi baru. Agar manfaatnya dapat berlangsung secara berkelanjutan, kegiatan promosi perlu didukung oleh peningkatan kualitas produk, inovasi, kemampuan pemasaran, dan akses pembiayaan yang memadai. Dengan demikian, pengembangan investasi dan UMKM dapat saling mendukung dalam memperkuat ekonomi daerah, memperluas pasar bagi produk lokal, serta menciptakan peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat.

Pada akhirnya, pembangunan ekonomi daerah perlu diarahkan agar pertumbuhan yang tercapai juga mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Wonosobo, tingkat kemiskinan turun dari 13,34% pada 2025 menjadi 13,12% pada 2026, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 1.620 orang menjadi 104.670 orang. Pemerintah daerah juga menjalankan berbagai program untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk renovasi 1.001 rumah, pemberian 663 beasiswa, dan penyediaan fasilitas sanitasi bagi 231 keluarga. Program-program tersebut menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga dengan perbaikan tempat tinggal, akses pendidikan, dan kualitas lingkungan. Namun, realisasi APBD Kabupaten Tegal yang baru mencapai 61% atau sekitar Rp1,8 triliun hingga 30 September, sementara targetnya 75%, menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran masih perlu dioptimalkan agar program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi internasional, kondisi keuangan nasional, dan pembangunan di Jawa Tengah saling berkaitan. Ketidakpastian global menuntut Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar dan anggaran, sedangkan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan investasi, pemberdayaan UMKM, penyerapan tenaga kerja, dan program pengentasan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang tepat dan pelaksanaan program yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Ringkasan

- Pada September 2026, keuntungan industri China naik 14,4%, terutama didukung oleh sektor kecerdasan buatan, komputasi, komunikasi, dan elektronik. Namun, beberapa sektor lain, seperti furnitur dan baterai kendaraan listrik, masih menghadapi tekanan yang menunjukkan bahwa pemulihan industri belum merata.
- Korea Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 1% pada kuartal III 2026, didukung oleh kinerja sektor semikonduktor. Sementara itu, harga produsen jasa Jepang meningkat 3,7%, sehingga perkembangan ekonomi kedua negara tetap menjadi perhatian pelaku pasar.
- Euro turun 0,21% menjadi US\$1,1179 di tengah kekhawatiran terhadap prospek ekonomi Eropa dan kondisi fiskal Prancis. Pelemahan ini menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi dan kebijakan pemerintah masih memengaruhi pergerakan mata uang internasional.
- Mata uang Brasil turut mengalami tekanan. Nilai tukar real Brasil melemah hingga sekitar 5,4 per dolar AS setelah muncul kejutan politik terkait pemilu. Kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal dan perkembangan politik meningkatkan ketidakpastian pasar terhadap kondisi ekonomi negara tersebut.
- Harga minyak Brent berada di kisaran US\$115–116 per barel, sehingga berpotensi meningkatkan biaya energi, transportasi, dan produksi. Kenaikan biaya tersebut dapat mendorong inflasi serta menambah beban bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
- Keputusan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang berpengaruh terhadap nilai tukar serta pergerakan modal internasional. Perubahan kebijakan tersebut juga dapat memengaruhi daya tarik investasi di negara berkembang, termasuk Indonesia.
- Rupiah melemah 0,16% menjadi Rp18.153 per dolar AS, sedangkan IHSG turun 3,36% ke level 5.192,42. Untuk menjaga stabilitas keuangan, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga sebesar 5,75% serta menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan tekanan terhadap rupiah.
- Hingga pekan yang berakhir pada 23 Oktober 2026, investor asing mencatat penjualan bersih saham sekitar US\$106,2 juta dan surat berharga negara sekitar US\$300,2 juta. Perkembangan ini menunjukkan adanya tekanan pada pasar keuangan domestik yang perlu diperhatikan untuk menjaga kepercayaan investor.
- BI menggunakan instrumen seperti Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan kebijakan Giro Wajib Minimum. Langkah tersebut bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendukung pengelolaan likuiditas dan daya tarik pasar keuangan Indonesia.
- Realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp376,8 triliun atau 84,3% dari total alokasi anggaran. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp244,6 triliun, sehingga pengelolaan anggaran subsidi perlu diperhatikan agar tetap mendukung masyarakat tanpa menambah tekanan fiskal secara berlebihan.
- Defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85% dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi daripada target sebesar 2,68%. Kondisi ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara agar kebutuhan pembangunan tetap terpenuhi.
- Pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2% dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari alokasi. Dengan realisasi tersebut, defisit tercatat Rp319 triliun atau 1,24% dari PDB, sementara penerimaan tumbuh 25,5% dan belanja meningkat 19% dibandingkan periode sebelumnya.
- Kredit perbankan tumbuh 12,7%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Agustus sebesar 13,3%. Kredit korporasi masih tumbuh kuat sebesar 20,3%, tetapi pertumbuhan kredit UMKM hanya 2,7% dan kredit modal kerja UMKM turun 2,6%, sehingga akses pembiayaan bagi usaha kecil masih perlu diperhatikan.

- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat mencapai Rp232,66 triliun kepada sekitar 3,61 juta debitur. Program tersebut turut mendukung sekitar 10,83 juta pekerja hingga 23 September 2026, sehingga KUR berperan dalam membantu pembiayaan usaha dan mempertahankan kesempatan kerja.
- Tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,65%, yang dalam berita disebut sebagai tingkat terendah sejak 1994. Dengan jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, penciptaan lapangan kerja yang produktif tetap diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
- Melalui PMK 76/2026, batas agregat defisit APBD tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar 0,18% dari PDB, dibandingkan 0,11% pada 2026. Pemerintah daerah juga perlu mematuhi ketentuan pelaporan dan batas defisit karena ketidakpatuhan dapat memengaruhi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71% pada kuartal II 2026, lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional sebesar 5,29%. Sementara itu, inflasi September tercatat 3,18%, tingkat pengangguran 4,30%, dan tingkat kemiskinan pada Maret sebesar 9,21%, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Target investasi daerah ditetapkan sebesar Rp110 triliun, sedangkan target pemerintah pusat mencapai Rp99,09 triliun. Realisasi investasi Januari–September mencapai Rp72,54 triliun, sementara investasi UMKM sebesar Rp11,4 triliun pada semester pertama turut menunjukkan peran usaha kecil dalam mendukung kegiatan ekonomi daerah.
- Jawa Tengah merencanakan pengembangan 12 kawasan industri untuk menarik investor dan memperkuat sektor manufaktur. Selain itu, sekitar 66.000 perizinan melalui sistem OSS-RBA telah menjadi bagian dari upaya mempermudah kegiatan usaha di sejumlah wilayah, termasuk Kendal, Batang, Demak, Rembang, dan Brebes.
- Jawa Tengah memiliki 1.557 SMK dengan lebih dari 800.000 siswa serta 2.002 lembaga pelatihan. Kerja sama antara sekolah, lembaga pelatihan, dan perusahaan diperlukan agar keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga peluang mendapatkan pekerjaan dapat meningkat.
- Realisasi investasi Temanggung mencapai Rp1,806 triliun atau sekitar 84% dari target Rp2,15 triliun. Investasi tersebut berasal dari 8.791 proyek dan dilaporkan menyerap 22.307 tenaga kerja, sehingga berpotensi mendorong aktivitas usaha serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
- Kegiatan Octofest 2026 melibatkan 117 galeri furnitur dan ukiran kayu serta 50 stan UMKM. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkenalkan produk unggulan Jepara, memperluas jangkauan pemasaran, dan meningkatkan peluang usaha bagi pelaku industri kreatif daerah.
- Pemerintah daerah memfasilitasi investasi pada sektor pariwisata, pertanian, industri rumah tangga, dan industri mikro. Upaya tersebut diharapkan dapat menarik pelaku usaha, memperkuat potensi ekonomi lokal, serta menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih beragam.
- Pendapatan retribusi dan pemanfaatan aset daerah tercatat Rp13,92 miliar dari target Rp27,86 miliar. Pemerintah daerah mendorong penggunaan sistem retribusi elektronik di Pasar Kliwon dan Bitingan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan, memperbaiki pencatatan transaksi, dan mendukung peningkatan pendapatan daerah.
- Tingkat kemiskinan turun dari 13,34% pada 2025 menjadi 13,12% pada 2026, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 1.620 orang menjadi 104.670 orang. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui perbaikan 1.001 rumah, pemberian 663 beasiswa, dan penyediaan fasilitas sanitasi bagi 231 keluarga.
- Hingga 30 September, realisasi anggaran mencapai 61% atau sekitar Rp1,8 triliun, sedangkan target realisasi pada periode tersebut sebesar 75%. Percepatan pelaksanaan program dan belanja daerah diperlukan agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

- Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jawa Tengah menyoroti pengaruh geopolitik serta kenaikan biaya energi dan pengiriman terhadap APBN. Oleh karena itu, anggaran perlu dikelola secara efektif dengan memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.

Implikasi

- Kenaikan laba industri China sebesar 14,4% pada September 2026 menunjukkan bahwa sektor teknologi, seperti komputer, komunikasi, dan elektronik, masih berkembang pesat. Namun, penurunan laba industri furnitur dan tekanan persaingan pada baterai kendaraan listrik menunjukkan bahwa tidak semua sektor menikmati pertumbuhan yang sama. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan produksi dan strategi usahanya dengan perubahan permintaan pasar.
- Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sebesar 1% pada kuartal III 2026 didukung oleh meningkatnya permintaan semikonduktor untuk teknologi kecerdasan buatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat mendorong ekspor dan investasi. Namun, konsumsi masyarakat yang masih lemah menjadi tantangan karena pertumbuhan ekonomi akan lebih kuat apabila didukung oleh ekspor dan belanja rumah tangga.
- Inflasi harga produsen jasa Jepang meningkat menjadi 3,7% pada September 2026, menunjukkan bahwa tekanan biaya di sektor jasa masih berlangsung. Jika perusahaan terus menaikkan harga untuk menutupi biaya tenaga kerja, tekanan inflasi dapat bertahan lebih lama. Kondisi ini dapat memperkuat alasan bagi Bank of Japan untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga apabila perkembangan inflasi mendukung kebijakan tersebut.
- Euro melemah terhadap dolar AS di tengah tingginya harga minyak dan kekhawatiran mengenai kondisi fiskal Prancis. Sebagai kawasan yang bergantung pada impor energi, Eropa berisiko mengalami peningkatan biaya impor ketika harga minyak naik. Akibatnya, tekanan terhadap inflasi dapat bertambah dan perusahaan berpotensi menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi.
- Nilai tukar real Brasil turun tajam setelah hasil pemilihan presiden mengejutkan investor dan memunculkan kemungkinan sengketa hasil pemilu. Selain faktor politik, kekhawatiran mengenai kondisi fiskal juga memengaruhi kepercayaan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian politik dan pengelolaan anggaran pemerintah penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap mata uang dan aset suatu negara.
- Harga minyak Brent yang berada di sekitar US\$115 per barel berpotensi menaikkan biaya transportasi, pengiriman, dan produksi barang. Kenaikan biaya tersebut dapat diteruskan kepada konsumen melalui harga barang dan jasa yang lebih mahal. Akibatnya, inflasi dapat meningkat dan daya beli masyarakat berisiko melemah, terutama di negara yang bergantung pada impor energi.
- Kebijakan suku bunga dari bank sentral Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan negara lainnya menjadi perhatian investor karena dapat memengaruhi nilai tukar serta keuntungan investasi. Perbedaan kebijakan antarnegara dapat mendorong perpindahan modal dari satu pasar ke pasar lain. Oleh sebab itu, negara berkembang seperti Indonesia perlu menjaga stabilitas ekonomi agar tetap menarik bagi investor.
- Perbedaan pertumbuhan industri, perubahan nilai tukar, dan tingginya harga energi menunjukkan bahwa kondisi usaha internasional masih menghadapi berbagai risiko. Perusahaan perlu mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperhatikan perubahan permintaan pasar. Langkah tersebut penting agar kegiatan produksi dan perdagangan tetap berjalan ketika kondisi ekonomi global berubah.
- Rupiah melemah menjadi Rp18.153 per dolar AS, sedangkan IHSG turun 3,36% ke level 5.192,42. Pelemahan rupiah dapat membuat barang impor dan bahan baku dari luar negeri

menjadi lebih mahal, terutama bagi perusahaan yang bergantung pada pasokan impor. Sementara itu, penurunan IHSG dapat memengaruhi kepercayaan investor sehingga stabilitas nilai tukar dan pasar saham perlu terus dijaga.

- Investor asing mencatat penjualan bersih saham sekitar US\$106,2 juta dan surat berharga negara sekitar US\$300,2 juta pada periode yang diberitakan. Jika tekanan penjualan berlanjut, pergerakan pasar keuangan dapat menjadi lebih tidak stabil. Kondisi ini juga membuat pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor melalui kebijakan ekonomi yang jelas dan pengelolaan anggaran yang hati-hati.
- Bank Indonesia menggunakan instrumen seperti DNDF, SRBI, dan Giro Wajib Minimum untuk mendukung stabilitas nilai tukar dan mengelola likuiditas. Kebijakan tersebut diperlukan karena pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan menambah tekanan inflasi. Dengan stabilitas yang lebih terjaga, pelaku usaha dan masyarakat dapat menghadapi perubahan kondisi ekonomi dengan lebih baik.
- Realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp376,8 triliun atau 84,3% dari anggaran yang tersedia. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp244,6 triliun. Jika harga energi dan nilai tukar terus menekan anggaran, pemerintah perlu mengatur belanja dengan cermat agar subsidi tetap membantu masyarakat tanpa memperbesar beban keuangan negara secara berlebihan.
- Defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85% dari PDB, lebih tinggi daripada target awal sebesar 2,68%. Tekanan tersebut antara lain berkaitan dengan tingginya harga energi dan pelemahan rupiah yang dapat meningkatkan kebutuhan subsidi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengendalikan belanja yang kurang mendesak sambil tetap melindungi program penting bagi masyarakat.
- Pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp2.660,5 triliun, sehingga APBN mencatat defisit Rp319 triliun hingga September 2026. Meskipun pendapatan tumbuh 25,5% secara tahunan, belanja juga meningkat 19%. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran perlu digunakan secara efektif agar pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.
- Pertumbuhan kredit perbankan turun menjadi 12,7%, sementara kredit UMKM hanya tumbuh 2,7% dan kredit modal kerja UMKM mengalami penurunan 2,6%. Kondisi ini dapat menyulitkan sebagian pelaku usaha kecil untuk membeli bahan baku, menambah persediaan, atau memperluas kegiatan usahanya. Karena itu, akses pembiayaan perlu diperkuat agar UMKM tetap mampu beroperasi, berkembang, dan mempertahankan tenaga kerja.
- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat mencapai Rp232,66 triliun kepada sekitar 3,61 juta debitur dan mendukung sekitar 10,83 juta pekerja hingga 23 September 2026. Pembiayaan ini dapat membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan modal dan mengembangkan kegiatan produksi. Agar manfaatnya berkelanjutan, dana KUR perlu digunakan secara produktif sesuai kebutuhan dan kemampuan usaha.
- Tingkat pengangguran nasional tercatat sebesar 4,65%, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang. Angka ini menunjukkan perkembangan positif dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, pemerintah tetap perlu memperkuat pelatihan keterampilan dan mendorong terciptanya pekerjaan yang produktif agar masyarakat tidak hanya memperoleh pekerjaan, tetapi juga memiliki peluang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
- Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD 2027 sebesar 0,18% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan ketentuan tahun 2026 sebesar 0,11%. Kebijakan ini memberi ruang pembiayaan bagi pemerintah daerah, tetapi penggunaan utang tetap harus mempertimbangkan kemampuan membayar dan kebutuhan pembangunan. Pelaporan yang tepat waktu juga penting karena ketidakpatuhan dapat mengakibatkan penundaan penyaluran DAU dan
- Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71% pada kuartal II 2026, lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional sebesar 5,29%. Namun, inflasi yang meningkat menjadi 3,18% dapat menambah

pengeluaran rumah tangga dan biaya usaha. Karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga sekaligus mendorong kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan investasi sebesar Rp110 triliun pada 2026, sementara realisasinya mencapai Rp72,54 triliun hingga September. Capaian tersebut menjadi modal untuk mengejar target investasi hingga akhir tahun. Kemudahan perizinan dan kondisi usaha yang mendukung perlu terus ditingkatkan agar investor tertarik menanamkan modal serta membuka peluang kerja baru.
- Rencana pengembangan 12 kawasan industri berpotensi menarik perusahaan baru dan meningkatkan kegiatan produksi di Jawa Tengah. Kehadiran industri juga dapat membuka peluang bagi usaha lokal untuk memasok barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan. Namun, manfaat tersebut perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai serta tenaga kerja dengan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
- Jawa Tengah memiliki 1.557 SMK dengan lebih dari 800.000 siswa serta 2.002 lembaga pelatihan. Jumlah tersebut menjadi modal untuk menyiapkan tenaga kerja bagi industri yang terus berkembang. Kerja sama antara sekolah, lembaga pelatihan, dan perusahaan perlu diperkuat agar lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan lebih mudah memperoleh pekerjaan.
- Hingga 26 Oktober 2026, realisasi investasi Temanggung mencapai Rp1,806 triliun atau sekitar 84% dari target Rp2,15 triliun. Investasi tersebut mencakup 8.791 proyek dan menyerap 22.307 tenaga kerja. Capaian ini menunjukkan pentingnya investasi bagi perekonomian daerah, sehingga kemudahan perizinan dan pelayanan kepada pelaku usaha perlu terus ditingkatkan untuk mengejar target yang tersisa.
- Octofest 2026 melibatkan 117 galeri furnitur dan ukiran kayu serta 50 stan UMKM. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk dan menjangkau calon pembeli. Jika didukung peningkatan kualitas produk dan pemasaran yang berkelanjutan, promosi tersebut dapat membantu meningkatkan penjualan serta mempertahankan usaha kerajinan lokal.
- Pemerintah Kabupaten Magelang mendorong investasi pada sektor pariwisata, pertanian, industri rumah tangga, dan industri mikro. Pengembangan sektor-sektor tersebut dapat membuka peluang usaha berdasarkan potensi daerah. Oleh karena itu, investasi perlu melibatkan masyarakat setempat dan UMKM agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan warga.
- Hingga 20 Oktober 2026, penerimaan dari retribusi pasar dan pemanfaatan kekayaan daerah mencapai Rp13,92 miliar dari target Rp27,86 miliar. Penerapan retribusi elektronik di Pasar Kliwon dan Bitingan membantu mempermudah pembayaran serta mengurangi tunggakan. Perluasan sistem ini ke pasar lainnya dapat mendukung pencatatan yang lebih tertib dan membantu pemerintah daerah mengejar target pendapatan.
- Tingkat kemiskinan Wonosobo turun dari 13,34% pada 2025 menjadi 13,12% pada 2026, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 1.620 orang. Program perbaikan rumah, pemberian beasiswa, dan penyediaan sanitasi membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Agar hasilnya bertahan, program tersebut perlu disertai pemberdayaan ekonomi sehingga keluarga dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan.
- Hingga 30 September 2026, realisasi anggaran mencapai 61% atau sekitar Rp1,8 triliun, masih di bawah target 75%. Penyerapan anggaran yang lambat dapat menyebabkan sebagian program terlambat dilaksanakan dan manfaatnya belum segera dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar anggaran digunakan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

- Ketidakpastian geopolitik, perubahan harga komoditas, dan meningkatnya biaya pengangkutan dapat memengaruhi penerimaan serta pengeluaran negara. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan APBN dan transfer ke daerah secara cermat dan transparan. Anggaran perlu diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial agar pelayanan publik tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat terjaga.

Berita Rabu, 28 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional memperlihatkan bahwa pengendalian inflasi masih menjadi tantangan utama bagi sejumlah negara, sehingga bank sentral harus menentukan kebijakan suku bunga secara hati-hati. Di Selandia Baru, Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) secara tidak terduga mempertahankan suku bunga acuan pada level 2,75 persen meskipun mayoritas ekonom memperkirakan adanya kenaikan sebesar 0,25 poin persentase. Keputusan tersebut diambil karena bank sentral mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global serta risiko melemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Meskipun demikian, RBNZ tetap membuka peluang pengetatan kebijakan moneter apabila perkembangan ekonomi dan inflasi mengharuskannya. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa bank sentral tidak hanya berfokus pada pengendalian kenaikan harga, tetapi juga memperhatikan kemampuan perekonomian untuk pulih. Sikap hati-hati tersebut semakin penting karena inflasi Selandia Baru diperkirakan kembali meningkat, sementara pelemahan mata uangnya dapat menambah tekanan harga melalui barang-barang impor. Oleh sebab itu, arah kebijakan suku bunga selanjutnya akan sangat bergantung pada perkembangan inflasi, permintaan domestik, dan kondisi ekonomi global.

Sikap hati-hati Selandia Baru tersebut juga berkaitan dengan perkembangan kebijakan moneter di Amerika Serikat, yang memiliki pengaruh besar terhadap pasar keuangan dunia. Federal Reserve atau The Fed diperkirakan mempertahankan suku bunga pada pertemuan Oktober, meskipun data inflasi konsumen dan produsen Amerika Serikat menunjukkan tekanan harga yang lebih tinggi daripada perkiraan. Para pembuat kebijakan masih membutuhkan waktu untuk menilai apakah tekanan inflasi tersebut bersifat sementara atau berpotensi bertahan lebih lama. Namun, peluang kenaikan suku bunga pada pertemuan Desember tetap menjadi perhatian investor karena kebijakan yang lebih ketat dapat memengaruhi biaya pinjaman dan pergerakan modal internasional. Pada saat yang sama, indeks keyakinan konsumen Amerika Serikat meningkat menjadi 91,7 pada Oktober, naik 7,5 poin dibandingkan bulan sebelumnya, didukung pandangan yang lebih baik terhadap kondisi bisnis dan pasar tenaga kerja. Walaupun demikian, masyarakat masih menghadapi persoalan biaya hidup yang tinggi, pertumbuhan upah yang tertinggal dari inflasi, serta meningkatnya biaya pinjaman. Keadaan ini memperlihatkan bahwa perekonomian Amerika Serikat masih memiliki daya tahan dari sisi konsumsi, tetapi belum sepenuhnya terbebas dari tekanan harga. Perkembangan tersebut menjadi penting bagi negara lain karena keputusan The Fed dapat memengaruhi kekuatan dolar AS, imbal hasil obligasi, dan daya tarik investasi di negara berkembang.

Selain Amerika Serikat dan Selandia Baru, Kanada dan Australia juga menghadapi tekanan inflasi yang mendorong pertimbangan pengetatan kebijakan moneter. Bank of Canada menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 2,5 persen, yang merupakan kenaikan pertama dalam lebih dari tiga tahun, setelah inflasi tahunan Kanada mencapai 3,2 persen pada September. Kenaikan harga energi dan biaya transportasi menjadi faktor utama yang mendorong inflasi melampaui sasaran bank sentral, sehingga kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah kenaikan harga meluas ke sektor lainnya. Sementara itu, inflasi Australia juga meningkat, dengan inflasi tahunan kuartal III mencapai 3,9 persen dan inflasi inti sebesar 3,6 persen, sehingga peluang kenaikan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia diperkirakan semakin besar. Tekanan tersebut diperkuat oleh kenaikan harga minyak

mentah dan masih tingginya inflasi barang maupun jasa. Di sisi lain, kenaikan suku bunga berisiko menekan permintaan, memperberat biaya pinjaman, dan memperlambat pemulihan ekonomi. Situasi di kedua negara ini menegaskan bahwa bank sentral harus menyeimbangkan kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga dengan upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Ketika negara-negara maju mempertahankan atau menaikkan suku bunga, kondisi keuangan global dapat menjadi lebih ketat dan memengaruhi negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama melalui arus modal, nilai tukar, dan biaya pembiayaan.

Ketidakpastian kebijakan moneter global tersebut berjalan beriringan dengan perubahan perdagangan internasional dan meningkatnya kebutuhan energi, yang turut memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi. Di Amerika Serikat, defisit perdagangan barang meningkat 2,1 persen menjadi US\$134,9 miliar pada September, sedangkan impor barang mencapai US\$344,1 miliar atau meningkat 2,4 persen. Lonjakan impor terutama didorong oleh kebutuhan barang modal untuk pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), yang mencerminkan besarnya investasi perusahaan teknologi terhadap pengembangan sektor tersebut. Meskipun pelebaran defisit perdagangan diperkirakan mengurangi kontribusi perdagangan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto, kuatnya investasi AI dan konsumsi masyarakat masih menjadi penopang aktivitas ekonomi. Pada saat yang sama, kenaikan harga energi menjadi persoalan yang dihadapi berbagai negara karena dapat meningkatkan biaya transportasi, produksi, dan distribusi barang. Ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah, juga membuat prospek harga minyak dan kondisi pasar keuangan sulit dipastikan. Perpaduan antara perdagangan yang tidak seimbang, biaya energi yang tinggi, dan kebijakan moneter yang ketat menyebabkan perekonomian global menghadapi risiko yang saling berkaitan. Dampaknya dapat menjalar ke negara lain melalui perubahan harga barang impor, permintaan ekspor, nilai tukar, dan pergerakan investasi, sehingga Indonesia perlu memperhatikan perkembangan tersebut dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Berbagai tekanan ekonomi internasional tersebut kemudian tercermin dalam kondisi pasar keuangan Indonesia, terutama melalui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan Rabu, 28 Oktober 2026, rupiah ditutup pada level Rp18.183 per dolar AS, yang dalam berita disebut sebagai posisi penutupan terlemah sepanjang sejarah, setelah sempat menyentuh Rp18.188 per dolar AS. Pelemahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh penguatan dolar AS dan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, tetapi juga oleh ketidakpastian konflik di Timur Tengah yang mempertahankan harga minyak pada tingkat tinggi. Selain itu, ekspektasi perubahan suku bunga The Fed, kekhawatiran terhadap kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI, serta meningkatnya kebutuhan valuta asing menjelang akhir bulan turut menambah tekanan. Bank Indonesia menjelaskan bahwa terbatasnya aliran modal asing menyebabkan pasokan dolar di dalam negeri tidak cukup kuat untuk mengimbangi kebutuhan yang meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas rupiah sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan domestik secara bersamaan. Jika tekanan berlangsung lama, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, dan barang konsumsi, sehingga dapat mendorong kenaikan harga di dalam negeri. Oleh karena itu, penguatan nilai tukar tidak cukup hanya mengandalkan intervensi pasar, tetapi juga memerlukan peningkatan ekspor, penguatan kepercayaan investor, serta perbaikan fundamental ekonomi nasional.

Menghadapi tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan melalui berbagai instrumen moneter dan kebijakan untuk meningkatkan daya tarik investasi domestik. Salah satu upaya yang disampaikan adalah pemberian insentif biaya lindung nilai atau hedging, yang menurut BI telah menarik dana asing sekitar US\$9 miliar atau setara Rp163,58 triliun hingga 20 Oktober 2026. Kebijakan tersebut bertujuan membantu investor mengurangi risiko perubahan nilai tukar sehingga mereka lebih bersedia menempatkan dana di Indonesia. BI juga meningkatkan insentif untuk transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), yang dapat mendukung penempatan dana pada Surat Berharga Negara, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, maupun saham. Di

samping itu, BI melakukan stabilisasi melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), DNDF, dan pasar spot, serta membeli Surat Berharga Negara di pasar sekunder. Cadangan devisa Indonesia yang mencapai US\$146,3 miliar pada akhir September 2026 juga menjadi salah satu penyangga dalam menghadapi tekanan eksternal. Namun, upaya stabilisasi tersebut perlu disertai penguatan pasar uang dan pasar valuta asing agar aktivitas transaksi, likuiditas, serta partisipasi pelaku pasar semakin berkembang. Melalui Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030, BI mendorong pengembangan instrumen pembiayaan, perluasan akses lindung nilai, peningkatan kompetensi pelaku pasar, dan penguatan infrastruktur keuangan. Dengan demikian, kebijakan jangka pendek untuk menjaga rupiah perlu berjalan bersama pembenahan struktural agar pasar keuangan Indonesia menjadi lebih kuat, efisien, dan mampu menghadapi perubahan kondisi global.

Selain stabilitas nilai tukar, persoalan lain yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia adalah risiko meningkatnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak. Hingga September 2026, defisit APBN dilaporkan telah mencapai Rp319 triliun atau sekitar 1,24 persen dari produk domestik bruto. Menurut ekonom yang dikutip dalam berita, defisit berpotensi melampaui batas 3 persen apabila penerimaan negara pada kuartal IV tidak mencapai target, sementara pemerintah tetap meningkatkan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Target penerimaan negara sebesar Rp813 triliun pada kuartal IV dinilai sulit tercapai, sedangkan rencana belanja pemerintah mencapai Rp1.300 triliun. Tekanan juga terlihat pada anggaran subsidi dan kompensasi energi yang pagunya ditetapkan sebesar Rp338 triliun, tetapi realisasinya telah mencapai Rp376 triliun hingga September. Jika harga minyak bertahan tinggi dan rupiah berada di sekitar Rp18.000 per dolar AS, biaya subsidi dan kompensasi energi sepanjang tahun diperkirakan dapat mencapai Rp566 triliun, belum termasuk kewajiban kepada PLN dan Pertamina yang disebutkan dalam berita. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal. Oleh sebab itu, pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara hati-hati melalui penentuan prioritas belanja yang produktif, peningkatan penerimaan negara, dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Di sisi lain, disiplin fiskal dan transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor, terutama ketika pemerintah juga harus bersaing mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan surat utang negara.

Tekanan terhadap rupiah dan anggaran negara juga memiliki hubungan langsung dengan kondisi sektor riil, terutama biaya produksi perusahaan, harga barang, dan daya beli masyarakat. Pelemahan mata uang domestik dapat membuat bahan baku serta barang konsumsi impor menjadi lebih mahal, sehingga perusahaan yang bergantung pada pasokan luar negeri berpotensi menghadapi kenaikan biaya operasional. Apabila kenaikan biaya tersebut diteruskan kepada konsumen, harga barang dan jasa dapat meningkat dan memperberat pengeluaran rumah tangga. Pada saat yang sama, kenaikan harga minyak dapat meningkatkan biaya transportasi dan distribusi, sekaligus menambah kebutuhan subsidi energi pemerintah. Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kelas menengah, menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya hidup. Karena itu, penguatan ekspor perlu menjadi perhatian agar Indonesia memperoleh tambahan devisa dan mengurangi ketergantungan pada pasokan valuta asing dari arus modal. Pemerintah juga perlu memperhatikan potensi ekspor yang belum tergarap serta memastikan kewajiban devisa hasil ekspor dijalankan dengan baik. Sementara itu, perlindungan sosial dan stimulus yang tepat sasaran dapat membantu menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk mempertahankan kesehatan anggaran negara. Dengan demikian, stabilitas makroekonomi perlu didukung oleh kebijakan yang mampu menjaga aktivitas usaha, memperkuat sumber pendapatan masyarakat, dan mempertahankan permintaan domestik. Persoalan ini menjadi penghubung penting antara kebijakan ekonomi nasional dan pembangunan daerah, termasuk upaya pemerintah Jawa Tengah dalam mengurangi kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja.

Di Jawa Tengah, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlihat dari keberhasilan pemerintah provinsi memperoleh Mandaya Award 2026 dalam kategori Pemerintah Provinsi Terbaik

dalam Penurunan Kemiskinan. Berdasarkan data yang diberitakan, tingkat kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta penduduk, menurun dibandingkan 9,39 persen pada September 2025. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah provinsi menekankan bahwa upaya tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan memerlukan keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, kementerian, lembaga, Baznas, sektor swasta, serta perguruan tinggi. Dalam berita tersebut disebutkan pula keterlibatan 177 kampus untuk membantu upaya pengurangan kemiskinan. Capaian di tingkat provinsi sejalan dengan perkembangan di Kabupaten Kebumen, yang jumlah penduduk miskinnya berkurang 25.410 jiwa selama 2024–2025. Tingkat kemiskinan Kebumen turun dari 15,71 persen menjadi 13,58 persen, atau dari 187.950 jiwa menjadi 162.540 jiwa. Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen menerima penghargaan nasional dalam kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan. Meskipun demikian, penurunan angka kemiskinan belum berarti persoalan tersebut selesai karena masih terdapat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, keberhasilan yang telah dicapai perlu dipertahankan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah juga perlu diperkuat melalui investasi daerah yang mampu menciptakan kegiatan ekonomi produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Magelang, sebagaimana diberitakan dalam kegiatan Magelang Growth Investment in Collaboration (MAGiC) 2026, berkomitmen membantu investor memenuhi persyaratan perizinan agar investasi dapat masuk tanpa hambatan yang tidak perlu. Namun, investasi yang diharapkan bukan hanya investasi yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, melainkan juga investasi yang membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar lokasi usaha. Kabupaten Magelang memiliki potensi di sektor pariwisata, pertanian, industri rumah tangga, dan industri mikro yang dapat dikembangkan untuk memperluas kesempatan usaha. Pengembangan kawasan seperti Tumpeng Menoreh juga disebut sebagai contoh potensi yang dapat menginspirasi pengembangan investasi di wilayah lain. Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya penurunan kemiskinan di tingkat provinsi maupun kabupaten, karena investasi yang tepat dapat memperkuat sumber penghasilan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada akhirnya, keseluruhan berita internasional, Indonesia, dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa perekonomian menghadapi tantangan yang saling berhubungan, mulai dari inflasi dan harga energi global, tekanan terhadap rupiah, risiko fiskal, hingga kebutuhan untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Ketidakpastian global menuntut pemerintah dan otoritas moneter menjaga stabilitas ekonomi, sedangkan pembangunan daerah membutuhkan investasi yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat. Dengan koordinasi kebijakan yang baik, pengelolaan anggaran yang disiplin, penguatan ekspor, dan pemerataan manfaat investasi, Indonesia dan Jawa Tengah diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ringkasan

- Keputusan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ini mengejutkan pasar karena sebagian besar ekonom sebelumnya memperkirakan kenaikan suku bunga sebesar 0,25 poin persentase. RBNZ memilih menahan suku bunga karena mempertimbangkan ketidakpastian global dan pemulihan ekonomi domestik yang masih rapuh, terutama pada konsumsi rumah tangga dan investasi. Meskipun demikian, bank sentral tetap membuka kemungkinan pengetatan kebijakan jika inflasi dan prospek ekonomi mengharuskannya.
- Pelaku pasar menunggu sinyal Federal Reserve mengenai arah kebijakan suku bunga berikutnya, khususnya peluang kenaikan pada Desember. Tekanan inflasi masih menjadi

perhatian karena data harga konsumen dan harga produsen Amerika Serikat menunjukkan kenaikan yang lebih tinggi dari perkiraan. Di sisi lain, keyakinan konsumen AS justru meningkat pada Oktober, dengan indeks Conference Board naik 7,5 poin menjadi 91,7, didukung pandangan yang lebih positif terhadap pasar tenaga kerja dan kondisi bisnis. Namun, masyarakat masih mengkhawatirkan tingginya biaya hidup, kenaikan biaya pinjaman, dan pertumbuhan upah yang belum sebanding dengan inflasi.

- Kenaikan sebesar 0,25 poin persentase ini merupakan yang pertama sejak Juli 2023, setelah inflasi tahunan Kanada mencapai 3,2% pada September dan melampaui kisaran target 1%–3%. Kenaikan harga energi dan biaya transportasi menjadi pendorong utama inflasi, sehingga bank sentral menilai pengetatan kebijakan masih mungkin diperlukan. Meskipun demikian, prospek pertumbuhan ekonomi tetap menjadi perhatian karena ekonomi Kanada diperkirakan melambat pada paruh kedua 2026 dan menghadapi tekanan dari tarif baru Amerika Serikat serta kondisi pasar tenaga kerja.
- Kenaikan harga energi, termasuk harga minyak mentah Brent yang berada di atas US\$110 per barel, dikhawatirkan mendorong kenaikan biaya barang dan jasa secara lebih luas. Inflasi barang Australia tercatat meningkat 4,6% secara tahunan pada September, sedangkan inflasi jasa mencapai 4,1%. Kondisi tersebut membuat Reserve Bank of Australia (RBA) perlu mempertimbangkan langkah pengendalian inflasi dengan hati-hati, sebab kebijakan suku bunga yang lebih ketat dapat membantu meredam kenaikan harga, tetapi juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dan permintaan masyarakat.
- Pada perdagangan 28 Oktober, won Korea Selatan dan peso Filipina menjadi mata uang yang mengalami pelemahan terdalam di antara mata uang regional yang dipantau Reuters. Rupiah Indonesia juga melemah ke sekitar Rp18.185 per dolar AS dalam perdagangan pagi, sementara baht Thailand turut tertekan. Pergerakan ini menunjukkan kuatnya pengaruh dolar AS terhadap pasar keuangan kawasan, terutama ketika investor menunggu keputusan bank sentral Amerika Serikat dan mempertimbangkan risiko ekonomi global.
- Konflik di Timur Tengah dan tingginya harga minyak menambah risiko inflasi, karena kenaikan biaya energi dapat merambat ke biaya transportasi, produksi, dan harga barang lainnya. Pada saat yang sama, ketegangan perdagangan dan perubahan kebijakan suku bunga membuat pelaku pasar lebih berhati-hati dalam menempatkan investasi. Situasi ini menjadi latar penting bagi pergerakan dolar AS dan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, serta meningkatkan kebutuhan setiap negara untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mengantisipasi perubahan pasar internasional.
- Pada penutupan perdagangan Rabu, 28 Oktober 2026, rupiah berada di sekitar Rp18.183 per dolar AS menurut laporan yang diberitakan. Bank Indonesia menjelaskan bahwa tekanan berasal dari ketidakpastian penyelesaian konflik Timur Tengah, harga minyak yang tinggi, meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS, serta penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Dari dalam negeri, kekhawatiran terhadap kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI dan kebutuhan valuta asing menjelang akhir bulan turut memengaruhi aliran dana. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh gabungan faktor eksternal dan domestik.
- Kebijakan yang mulai diterapkan pada Juni 2026 itu dilaporkan telah menarik dana asing sekitar US\$9 miliar hingga 20 Oktober 2026. Insentif ini bertujuan membantu investor mengelola risiko perubahan nilai tukar agar mereka lebih tertarik menempatkan dana di pasar keuangan Indonesia. BI juga mendorong penggunaan instrumen seperti Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan berbagai instrumen keuangan domestik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya tarik aset rupiah, memperkuat pasar keuangan, dan meredam tekanan arus modal keluar ketika kondisi global sedang tidak menentu.
- Bank Indonesia mendorong percepatan pelaksanaan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030 karena ketersediaan aturan dan infrastruktur belum cukup tanpa

peningkatan aktivitas transaksi serta partisipasi pelaku pasar. Prioritas pengembangan mencakup pasar uang, pasar valuta asing, kompetensi pelaku pasar, dan infrastruktur keuangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembentukan harga, memperluas akses lindung nilai, memperkuat transmisi kebijakan moneter, serta membantu menyediakan pembiayaan bagi sektor riil. Dengan pasar keuangan yang lebih aktif dan kuat, Indonesia diharapkan lebih siap menghadapi perubahan arus modal dan tekanan nilai tukar.

- Hingga September 2026, defisit anggaran tercatat sekitar Rp319 triliun atau 1,24% dari produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal IV, pemerintah menargetkan penerimaan Rp813 triliun dan merencanakan belanja sekitar Rp1.300 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa target penerimaan sulit dicapai, sedangkan pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi dapat meningkatkan beban subsidi serta kompensasi energi. Karena itu, sejumlah ekonom mengingatkan pentingnya menjaga disiplin fiskal, meninjau prioritas belanja, dan memastikan pengeluaran pemerintah tetap produktif agar defisit tidak melampaui batas 3% PDB.
- Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia pada 28 Oktober, harga berbagai jenis cabai dan daging ayam mengalami penurunan, begitu pula sejumlah jenis daging sapi, telur, dan bawang. Namun, beberapa jenis beras justru mengalami kenaikan, seperti beras kualitas bawah II yang naik menjadi Rp14.800 per kilogram dan beras medium II menjadi Rp16.450 per kilogram. Harga minyak goreng curah dan gula pasir lokal juga mengalami kenaikan tipis. Perbedaan pergerakan harga tersebut menunjukkan bahwa kondisi pangan perlu terus dipantau karena harga beras dan kebutuhan pokok lainnya berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.
- Pemerintah menilai penurunan tersebut mencerminkan peran investasi dan penguatan sektor riil dalam menyerap tenaga kerja, bahkan ketika jumlah angkatan kerja telah meningkat menjadi sekitar 155,41 juta orang pada 2026. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa tingkat pengangguran saja belum cukup untuk menggambarkan kesejahteraan pekerja. Sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan harus segera mencari pekerjaan lain, meskipun pekerjaan yang tersedia bersifat informal, berupah rendah, atau kurang memberikan kepastian. Oleh sebab itu, peningkatan pelatihan vokasi, keterampilan tenaga kerja, dan kualitas lapangan kerja tetap dibutuhkan agar penurunan pengangguran juga diikuti perbaikan kesejahteraan.
- Nilai cadangan emas Indonesia pada September 2026 tercatat US\$11,74 miliar, turun 5,68% dibandingkan Agustus yang sebesar US\$12,45 miliar. Ekonom yang dikutip dalam berita menilai penurunan itu lebih disebabkan oleh koreksi harga emas global, yang dipengaruhi penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi, dan aksi ambil untung investor. Pada periode yang sama, total cadangan devisa Indonesia tercatat sekitar US\$146,32 miliar. Berita tersebut menekankan bahwa pengelolaan cadangan devisa perlu mempertimbangkan keamanan aset, kecukupan likuiditas, dan diversifikasi, terutama ketika Indonesia menghadapi tekanan terhadap rupiah serta ketidakpastian geopolitik.
- Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut diberikan sebagai pengakuan atas upaya pemerintah provinsi dalam mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan data yang diberitakan, tingkat kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21% atau sekitar 3,29 juta penduduk, turun dibandingkan September 2025 yang mencapai 9,39%. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi upaya lanjutan tetap diperlukan agar semakin banyak masyarakat memperoleh pekerjaan, penghasilan, dan akses terhadap kebutuhan dasar.
- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kebumen turun dari 187.950 orang pada 2024 menjadi 162.540 orang pada 2025, sedangkan tingkat kemiskinannya berkurang dari 15,71% menjadi 13,58%. Capaian tersebut mengantarkan Pemerintah

Kabupaten Kebumen meraih Mandaya Award 2026 dalam kategori pemerintah kabupaten terbaik dalam penurunan tingkat kemiskinan. Pemerintah daerah menjalankan berbagai upaya melalui perlindungan sosial, perluasan kesempatan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat 162.540 penduduk miskin pada 2025, sehingga keberlanjutan program dan ketepatan penyaluran bantuan tetap penting untuk memperbaiki pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

- Pemerintah daerah berkomitmen mendampingi investor dalam memenuhi persyaratan perizinan agar kegiatan investasi dapat berjalan tanpa hambatan yang tidak perlu. Melalui kegiatan Magelang Growth Investment in Collaboration (MAGiC) 2026, pemerintah menegaskan bahwa investasi tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan usaha, tetapi juga perlu membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sektor pariwisata, pertanian, industri rumah tangga, dan industri mikro dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan mengarahkan investasi sesuai rencana pembangunan daerah dan melibatkan pelaku usaha lokal, potensi ekonomi Magelang diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Implikasi

- Kebijakan suku bunga Selandia Baru yang tetap berada di angka 2,75% menunjukkan bahwa bank sentral masih mempertimbangkan keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi. Keputusan ini dapat memengaruhi ekspektasi pelaku pasar terhadap kebijakan suku bunga berikutnya, sekaligus menunjukkan bahwa ketidakpastian global dan lemahnya konsumsi serta investasi masih menjadi pertimbangan penting.
- Penguatan dolar AS menjelang keputusan The Fed berpotensi memberikan tekanan terhadap mata uang negara lain, terutama negara berkembang yang masih bergantung pada pembiayaan dan perdagangan internasional. Jika kondisi ini berlanjut, biaya impor dan pembayaran kewajiban dalam dolar dapat meningkat sehingga pemerintah dan pelaku usaha perlu lebih berhati-hati dalam mengelola risiko nilai tukar.
- Inflasi Amerika Serikat yang masih berada di atas perkiraan menunjukkan bahwa tekanan kenaikan harga belum sepenuhnya terkendali, meskipun kepercayaan konsumen mengalami peningkatan pada Oktober. Keadaan ini dapat memengaruhi keputusan bank sentral dalam menentukan suku bunga, sementara tingginya biaya hidup dan pinjaman berpotensi membatasi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi.
- Kenaikan suku bunga Bank Sentral Kanada menjadi 2,5% merupakan upaya untuk mengendalikan inflasi yang mencapai 3,2% pada September. Namun, kenaikan suku bunga juga dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi rumah tangga dan perusahaan, sehingga pertumbuhan konsumsi dan investasi berisiko melambat apabila masyarakat serta pelaku usaha mengurangi pengeluarannya.
- Tekanan inflasi di Australia akibat kenaikan harga barang, jasa, dan energi membuat bank sentral perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas harga. Apabila tekanan inflasi terus meningkat, kebijakan moneter yang lebih ketat mungkin diperlukan, tetapi langkah tersebut juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktivitas dunia usaha.
- Melemahnya sejumlah mata uang Asia terhadap dolar AS dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, dan barang modal yang dibayar menggunakan mata uang asing. Kondisi ini juga dapat menambah beban perusahaan yang memiliki kewajiban dalam dolar, sehingga negara-negara di kawasan Asia perlu memperkuat pengelolaan risiko nilai tukar dan menjaga kepercayaan pasar keuangan.
- Kenaikan harga minyak dunia dan ketegangan geopolitik berpotensi meningkatkan biaya transportasi, produksi, serta distribusi barang di berbagai negara. Apabila kenaikan tersebut

berlangsung dalam waktu lama, tekanan biaya dapat merambat ke harga barang dan jasa, sehingga inflasi meningkat dan daya beli masyarakat berpotensi mengalami penurunan.

- Perubahan kebutuhan impor barang modal yang berkaitan dengan teknologi dan kecerdasan buatan dapat memengaruhi perkembangan neraca perdagangan suatu negara. Peningkatan impor memang dapat menambah kebutuhan valuta asing dalam jangka pendek, tetapi dampak akhirnya perlu dilihat dari kemampuan investasi tersebut dalam meningkatkan produktivitas, kapasitas produksi, dan pertumbuhan ekonomi.
- Pelemahan rupiah hingga sekitar Rp18.183 per dolar AS dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, mesin, dan barang kebutuhan lainnya yang berasal dari luar negeri. Jika kenaikan biaya tersebut diteruskan kepada konsumen melalui harga jual, masyarakat berpotensi menghadapi kenaikan pengeluaran sehari-hari, sedangkan perusahaan perlu menyesuaikan strategi produksi dan penjualannya.
- Tekanan dari penguatan dolar AS dan ketidakpastian ekonomi global membuat upaya menjaga stabilitas rupiah menjadi semakin penting bagi perekonomian Indonesia. Bank Indonesia perlu terus memantau perkembangan pasar keuangan dan menjaga kestabilan nilai tukar, sementara pelaku usaha perlu mengatur kebutuhan valuta asing agar perubahan kurs tidak terlalu membebani kegiatan operasional.
- Insentif lindung nilai yang menarik dana sekitar US\$9 miliar hingga 20 Oktober menunjukkan adanya minat terhadap instrumen keuangan domestik yang dapat membantu mengelola risiko nilai tukar. Jika kebijakan ini terus didukung oleh kepercayaan pasar dan pengelolaan risiko yang baik, arus dana tersebut berpotensi memperkuat pasar keuangan dalam negeri serta mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal.
- Pendalaman pasar uang dan valuta asing melalui Blueprint 2030 Bank Indonesia dapat memperluas pilihan instrumen keuangan dan meningkatkan aktivitas transaksi di dalam negeri. Pasar yang semakin berkembang juga dapat membantu perusahaan melakukan lindung nilai, mempermudah pengelolaan pembiayaan, dan mendukung efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi.
- Defisit APBN sebesar Rp319 triliun atau 1,24% dari PDB hingga September menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan target penerimaan Rp813 triliun dan rencana belanja Rp1.300 triliun pada kuartal IV, pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan dapat dioptimalkan dan belanja diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- Besarnya kebutuhan belanja pemerintah pada kuartal IV menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar pengeluaran negara tetap efektif dan sesuai prioritas. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan penggunaan anggaran, meningkatkan kualitas belanja produktif, serta menjaga disiplin fiskal agar kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara.
- Pelemahan rupiah yang terjadi bersamaan dengan kenaikan harga energi dunia berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhitungkan perubahan harga minyak dan nilai tukar secara hati-hati agar anggaran tetap mampu mendukung kebutuhan energi masyarakat tanpa mengurangi ruang pembiayaan untuk program pembangunan lainnya.
- Perubahan harga pangan yang berbeda-beda antarkomoditas menunjukkan bahwa perkembangan pasokan dan harga perlu terus dipantau secara terperinci. Penurunan harga beberapa jenis cabai, daging, telur, dan bawang dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi kenaikan harga beras tetap perlu diperhatikan karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
- Penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,65% menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Meskipun demikian, peningkatan jumlah penduduk yang bekerja perlu diikuti dengan perbaikan kualitas pekerjaan, termasuk peningkatan upah,

kepastian pendapatan, dan akses terhadap pelatihan agar masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan produktif.

- Penurunan nilai cadangan emas moneter menjadi sekitar US\$11,74 miliar pada September perlu dipahami dengan mempertimbangkan perubahan harga emas di pasar global. Penurunan nilai tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya penjualan emas, sehingga kondisi cadangan devisa perlu dinilai secara menyeluruh dengan memperhatikan komposisi aset, kecukupan likuiditas, dan kemampuan negara menghadapi tekanan eksternal.
- Penghargaan Mandaya Award 2026 yang diterima Jawa Tengah menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Capaian ini dapat menjadi dorongan untuk memperkuat program yang sudah berjalan, terutama melalui peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan perluasan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.
- Penurunan tingkat kemiskinan Jawa Tengah menjadi 9,21% pada Maret 2026, dari 9,39% pada September 2025, menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Namun, jumlah penduduk miskin yang masih sekitar 3,29 juta orang menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu melanjutkan program pengentasan kemiskinan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
- Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen sebanyak 25.410 orang menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini perlu dipertahankan melalui kombinasi bantuan sosial, perluasan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat yang telah keluar dari kemiskinan tidak kembali mengalami kesulitan ekonomi.
- Penurunan tingkat kemiskinan Kebumen dari 15,71% menjadi 13,58% menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, pemerintah perlu memperluas akses terhadap pekerjaan dan kegiatan usaha agar masyarakat memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil.
- Penghargaan dalam penanggulangan kemiskinan perlu diikuti dengan program yang berkelanjutan, sehingga keberhasilan tidak hanya terlihat dari penurunan angka kemiskinan dalam jangka pendek. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi efektivitas program dan memastikan masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, pendapatan, serta kemandirian ekonomi.
- Upaya Kabupaten Magelang menarik investasi berkelanjutan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Penyederhanaan perizinan serta dukungan kepada investor dapat membantu meningkatkan aktivitas usaha, tetapi pelaksanaannya perlu tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
- Pengembangan sektor pariwisata, pertanian, industri rumah tangga, dan UMKM di Magelang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Jika dikelola dengan baik, sektor-sektor tersebut dapat membuka peluang usaha baru, memperluas pemasaran produk lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan kegiatan ekonomi.
- Investasi yang melibatkan masyarakat setempat dapat memberikan manfaat yang lebih luas apabila disertai penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima dampak pembangunan, tetapi juga dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan usaha yang berkembang di daerahnya.
- Kolaborasi antara pemerintah daerah, investor, dan pelaku UMKM penting untuk memperkuat hubungan antara investasi dan perekonomian masyarakat. Kerja sama tersebut dapat membantu pelaku usaha kecil memperoleh akses pasar, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan kemampuan usaha agar dapat berkembang bersama dengan kegiatan investasi yang lebih besar.

- Pengembangan investasi dan program pengentasan kemiskinan perlu berjalan secara beriringan agar pertumbuhan ekonomi daerah memberikan manfaat yang lebih merata. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa investasi mampu menciptakan pekerjaan yang layak, mendukung usaha lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berita Kamis, 29 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada Kamis, 29 Oktober 2026, menunjukkan bahwa ketidakpastian global masih menjadi perhatian utama, terutama karena tekanan inflasi, kebijakan suku bunga, dan ketegangan geopolitik yang memengaruhi aktivitas ekonomi berbagai negara. Salah satu perkembangan penting terlihat dari keputusan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed) yang mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,75–4 persen melalui pemungutan suara dengan hasil 10 suara setuju dan 2 suara menolak. Dua pejabat, yaitu Lisa Cook dan Beth Hammack, menginginkan kenaikan suku bunga sebesar 0,25 poin persentase karena menilai tekanan inflasi masih cukup tinggi. Meskipun suku bunga belum dinaikkan kembali, The Fed menegaskan bahwa kebijakan selanjutnya akan bergantung pada perkembangan data ekonomi, khususnya inflasi, yang ditargetkan kembali ke tingkat 2 persen. Ketua The Fed, Kevin Warsh, juga menyampaikan bahwa aktivitas ekonomi Amerika Serikat masih berkembang cukup kuat, didukung oleh belanja masyarakat dan investasi perusahaan. Namun, kenaikan harga energi akibat konflik di Timur Tengah serta meluasnya tekanan harga pada barang dan jasa membuat pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas. Dengan demikian, keputusan mempertahankan suku bunga bukan berarti tekanan ekonomi telah berakhir, melainkan menunjukkan bahwa The Fed masih membutuhkan informasi tambahan sebelum menentukan langkah kebijakan berikutnya.

Kondisi tersebut kemudian terlihat berdampingan dengan perkembangan ekonomi Amerika Serikat yang masih menunjukkan pertumbuhan cukup kuat pada kuartal III 2026. Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat tumbuh sebesar 3,4 persen secara tahunan pada periode Juli hingga September 2026, lebih tinggi dibandingkan perkiraan ekonom sebesar 3,2 persen. Pertumbuhan ini terutama didukung oleh belanja konsumen yang meningkat 3,8 persen serta investasi perusahaan pada sektor kecerdasan buatan yang masih memberikan dorongan terhadap kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat karena sentimen konsumen justru mengalami penurunan tajam. Kenaikan harga kebutuhan energi, termasuk bensin yang rata-rata masih berada di atas US\$4 per galon, turut menambah beban pengeluaran rumah tangga. Bahkan, sebagian masyarakat mulai menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika kenaikan upah belum sepenuhnya mampu mengimbangi inflasi. Di sisi lain, investasi kecerdasan buatan memang menjadi salah satu penopang pertumbuhan, tetapi besarnya biaya proyek dan ketidakpastian keuntungan pada masa mendatang tetap perlu diperhatikan. Oleh karena itu, meskipun perekonomian Amerika Serikat masih tumbuh lebih baik dari perkiraan, pemerintah dan bank sentral tetap menghadapi tantangan untuk menjaga pertumbuhan tersebut agar tidak disertai peningkatan tekanan harga dan penurunan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Selain perkembangan ekonomi Amerika Serikat, hubungan perdagangan antara negara-negara besar juga menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dunia. Hal ini terlihat dari peringatan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier kepada China agar upaya memperkuat kemandirian ekonominya tidak justru menimbulkan ketergantungan negara lain terhadap kebijakan Beijing. Peringatan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara China dan Uni Eropa akibat ketidakseimbangan perdagangan, terbatasnya akses perusahaan Eropa ke pasar China, serta banyaknya produk impor China yang memperoleh dukungan subsidi pemerintah. Uni Eropa juga

menyoroti kebijakan pembatasan ekspor bahan baku oleh China karena dapat mengganggu kebutuhan industri Eropa terhadap pasokan bahan produksi. Kondisi ini mendorong Jerman dan Prancis mengusulkan mekanisme respons cepat di tingkat Uni Eropa untuk menghadapi kebijakan perdagangan negara lain yang dinilai merugikan kepentingan kawasan. Meskipun demikian, Steinmeier tetap menekankan pentingnya penyelesaian melalui dialog agar persoalan perdagangan tidak berkembang menjadi konfrontasi baru yang merugikan semua pihak. Sementara itu, perhatian terhadap kebijakan moneter global juga terlihat di Jepang, ketika pasar obligasi pemerintah bergerak relatif stabil menjelang keputusan suku bunga Bank of Japan. Permintaan yang kuat dalam lelang obligasi pemerintah Jepang tenor dua tahun serta penguatan obligasi pemerintah Amerika Serikat turut mendukung kondisi pasar. Perkembangan ini menunjukkan bahwa keputusan bank sentral negara-negara besar dan hubungan perdagangan internasional saling berkaitan dalam memengaruhi pergerakan pasar keuangan, sehingga setiap negara perlu memperhatikan perubahan kebijakan global dalam menjaga stabilitas ekonominya.

Pengaruh perkembangan ekonomi internasional tersebut selanjutnya turut dirasakan Indonesia, terutama melalui tekanan terhadap nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Indonesia menyampaikan bahwa rupiah mengalami pelemahan sekitar 7,9 persen dan berada pada posisi Rp18.137 per dolar Amerika Serikat pada Kamis, 29 Oktober 2026. Tekanan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya minat investor terhadap aset yang dianggap lebih aman, seperti dolar Amerika Serikat, sehingga aliran modal portofolio ke pasar keuangan Indonesia ikut mengalami penurunan. Meskipun demikian, Bank Indonesia menilai tingkat gejolak rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang negara lain. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar, Bank Indonesia mendorong peningkatan ekspor, khususnya ekspor nonmigas, agar pasokan valuta asing di dalam negeri semakin kuat. Kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti batu bara, minyak sawit mentah, dan nikel, memang dapat mendukung nilai ekspor, tetapi peningkatan nilai tersebut belum tentu menunjukkan bertambahnya volume barang yang diekspor. Oleh karena itu, peningkatan ekspor perlu diikuti dengan penguatan produksi dan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang pasar. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya menarik kembali modal asing agar pasokan valuta asing dan kepercayaan investor terhadap pasar domestik dapat terjaga. Dengan demikian, kestabilan rupiah tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga membutuhkan dukungan dari peningkatan ekspor dan penguatan sektor ekonomi dalam negeri.

Upaya menjaga stabilitas rupiah tersebut kemudian diperkuat melalui kebijakan Bank Indonesia yang memberikan insentif transaksi swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk menarik aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Melalui kebijakan ini, Bank Indonesia telah berhasil menghimpun hampir US\$12 miliar, yang terdiri atas sekitar US\$10 miliar melalui transaksi swap dan sekitar US\$2 miliar melalui DNDF. Insentif tersebut mulai diterapkan pada Juni 2026 dan berjalan lebih efektif pada Juli, kemudian kembali ditingkatkan pada Oktober setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Bank Indonesia memberikan potongan biaya lindung nilai hingga 30 persen untuk transaksi swap dan meningkatkan insentif DNDF hingga 45 persen. Kebijakan ini bertujuan mengurangi biaya yang harus ditanggung investor ketika melindungi investasinya dari risiko perubahan nilai tukar. Langkah tersebut juga menjadi alternatif untuk menarik investasi asing tanpa harus selalu menaikkan suku bunga, karena kenaikan suku bunga dapat memberikan dampak lebih luas terhadap kegiatan ekonomi dan pembiayaan masyarakat. Kebijakan ini menjadi semakin penting karena prospek ekonomi Indonesia pada 2027 masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari arah suku bunga negara maju, gejolak nilai tukar, ketegangan geopolitik, hingga perubahan harga energi dan komoditas. Dana Moneter Internasional memperkirakan ekonomi global tumbuh 3,4 persen pada 2027, sedangkan ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,1 persen. Walaupun peluang pertumbuhan tersebut cukup baik, Indonesia tetap perlu memperbaiki iklim investasi melalui peningkatan permintaan pasar, ketersediaan pemasok, keandalan listrik dan logistik, kepastian perizinan, serta kualitas tenaga kerja agar potensi pertumbuhan dapat benar-benar menarik minat investor.

Di samping menjaga kestabilan nilai tukar dan meningkatkan investasi, penguatan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hingga September 2026, kredit UMKM tercatat tumbuh 2,7 persen secara tahunan menjadi Rp1.539,2 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Agustus yang sebesar 2,3 persen. Meskipun menunjukkan perbaikan, pertumbuhan tersebut masih berada di bawah target pemerintah sebesar 7–9 persen hingga akhir tahun. Untuk mendorong penyaluran pembiayaan pada 2027, pemerintah berencana menambah plafon kredit UMKM sebesar Rp400 triliun hingga Rp500 triliun, sehingga total plafon diperkirakan meningkat menjadi Rp1.900 triliun hingga Rp2.000 triliun. Sejumlah perbankan juga telah menunjukkan peningkatan penyaluran kredit kepada pelaku usaha, seperti Bank Mandiri, Bank Central Asia, dan Bank Permata yang mencatat pertumbuhan pembiayaan pada segmen usaha kecil dan menengah. Penyaluran kredit tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan modal kerja, melakukan investasi, memperluas kegiatan produksi, dan mengembangkan pasar. Namun, peningkatan jumlah pembiayaan tetap perlu memperhatikan kemampuan usaha dalam mengelola pinjaman serta prinsip kehati-hatian perbankan. Selain pembiayaan, pemerintah juga perlu memperhatikan besarnya kegiatan ekonomi yang belum tercatat secara resmi agar potensi penerimaan negara dan aktivitas ekonomi dapat tergambarkan dengan lebih baik. Dengan demikian, penguatan UMKM tidak cukup hanya dilakukan melalui penambahan plafon kredit, tetapi juga perlu didukung oleh akses pasar, pendampingan usaha, pengelolaan keuangan, dan kebijakan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi nasional juga berkaitan erat dengan kondisi harga kebutuhan pokok karena perubahan harga dapat memengaruhi daya beli dan pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan perkembangan harga pangan yang diberitakan, sebagian besar komoditas menunjukkan kecenderungan penurunan sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, penurunan tersebut belum terjadi pada seluruh komoditas karena masih terdapat sejumlah bahan pangan yang mengalami kenaikan harga, salah satunya gula pasir lokal yang naik 1,29 persen atau Rp250 menjadi Rp19.600 per kilogram. Perbedaan pergerakan harga ini menunjukkan bahwa kestabilan pangan masih perlu diperhatikan, terutama karena perubahan harga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan kondisi produksi di berbagai daerah. Pemerintah perlu memastikan bahwa pasokan bahan pangan tetap tersedia dan distribusinya berjalan lancar agar penurunan harga dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap perkembangan harga juga penting dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan komoditas tertentu yang dapat menambah beban pengeluaran rumah tangga. Kondisi ini menjadi semakin penting ketika perekonomian masih menghadapi tekanan dari nilai tukar, inflasi, dan ketidakpastian global. Oleh sebab itu, upaya menjaga daya beli masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh, baik melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, penguatan distribusi pangan, maupun peningkatan kegiatan ekonomi yang dapat membuka kesempatan kerja dan menambah pendapatan masyarakat.

Dampak penguatan ekonomi tersebut juga terlihat pada perkembangan sektor pertanian di Jawa Tengah, khususnya melalui kegiatan panen raya jagung di Desa Wlahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Brebes, Wurja, tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi pertanian sekaligus mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Pemerintah Kabupaten Brebes menilai bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan. Harga jagung yang sedang berada pada posisi baik dapat menjadi peluang bagi petani untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi, tetapi peluang tersebut perlu didukung oleh pengelolaan usaha tani yang efisien. Petani juga diharapkan mampu menjaga kualitas hasil panen, memperhatikan biaya produksi, dan memanfaatkan peluang pemasaran agar peningkatan hasil produksi dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Melalui kegiatan Expo Jagung Pendekar Sakti, potensi pertanian Desa Wlahar diharapkan semakin dikenal dan mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian secara berkelanjutan. Dengan adanya kerja sama antara petani, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, pengembangan pertanian jagung diharapkan tidak hanya

meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga memperkuat pendapatan keluarga petani serta mendorong kemandirian ekonomi desa. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dapat dimulai dari pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki setiap daerah, termasuk sektor pertanian yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pedesaan.

Selain pengembangan sektor pertanian, perhatian pemerintah daerah di Jawa Tengah juga tertuju pada percepatan pembangunan melalui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti yang terlihat di Kabupaten Tegal. Hingga 30 September 2026, realisasi keuangan APBD Kabupaten Tegal baru mencapai sekitar 61 persen atau Rp1,8 triliun, sedangkan realisasi fisiknya telah mencapai sekitar 68 persen. Capaian tersebut masih berada di bawah target rencana kerja operasional yang seharusnya mencapai sekitar 75 persen pada akhir triwulan III. Kondisi ini mendorong Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan, terutama proyek strategis dan program yang memiliki anggaran besar. Percepatan diperlukan agar kegiatan pembangunan tidak menumpuk menjelang akhir tahun dan anggaran dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana. Namun, pemerintah daerah juga menegaskan bahwa peningkatan penyerapan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pekerjaan maupun mengabaikan ketentuan yang berlaku. Setiap perangkat daerah perlu mengevaluasi hambatan administrasi, teknis, dan pengadaan, sekaligus memperkuat pemantauan terhadap perkembangan pekerjaan, pembayaran, serta pelaporan keuangan. Selain itu, integritas dalam pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek harus tetap dijaga agar penggunaan anggaran berlangsung secara transparan dan bebas dari penyimpangan. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari ketepatan waktu, kualitas hasil pembangunan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tegal.

Upaya memperbaiki pelaksanaan anggaran tersebut selanjutnya menjadi bagian penting dalam persiapan penyusunan APBD Jawa Tengah Tahun 2027. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar mengutamakan integritas, kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap peraturan dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Setiap keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran harus melalui pertimbangan yang matang, termasuk penilaian terhadap aspek hukum, administrasi, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diperlukan karena anggaran daerah bersumber dari uang publik sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam penyusunan APBD 2027, pemerintah daerah juga perlu memahami ketentuan mengenai hibah, insentif digital, dan pendapatan asli daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam pengalokasian maupun pelaksanaan anggaran. Melalui Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah Jawa Tengah, para sekretaris daerah bersama unsur perangkat daerah terkait diharapkan dapat menyamakan pemahaman mengenai regulasi dan mekanisme penganggaran. Koordinasi tersebut juga penting untuk memperkuat keselarasan antara tim anggaran pemerintah daerah, inspektorat, badan pengelola keuangan dan aset daerah, serta badan perencanaan pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang lebih cermat, pengawasan yang kuat, dan pelaksanaan yang transparan, APBD 2027 diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, berbagai berita internasional, nasional, dan Jawa Tengah pada 29 Oktober 2026 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian masih dipengaruhi oleh hubungan yang erat antara perkembangan global, kebijakan pemerintah, aktivitas dunia usaha, dan pengelolaan ekonomi daerah. Di tingkat internasional, tingginya inflasi membuat The Fed tetap berhati-hati dalam menentukan suku bunga, sementara pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, perkembangan investasi kecerdasan buatan, hubungan perdagangan China dan Uni Eropa, serta kebijakan moneter Jepang turut memengaruhi arah pasar dunia. Perkembangan tersebut memberikan dampak terhadap Indonesia, terutama melalui tekanan nilai tukar rupiah dan kebutuhan untuk memperkuat arus modal asing, meningkatkan ekspor, menjaga harga kebutuhan pokok, serta memperluas pembiayaan UMKM. Meskipun prospek pertumbuhan

ekonomi Indonesia pada 2027 masih cukup baik, pencapaiannya membutuhkan perbaikan iklim investasi, penguatan daya saing, dan peningkatan kemampuan sektor usaha dalam menghadapi ketidakpastian. Di Jawa Tengah, pengembangan pertanian jagung di Brebes menunjukkan pentingnya pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sedangkan evaluasi APBD Kabupaten Tegal dan persiapan APBD Provinsi Jawa Tengah 2027 memperlihatkan perlunya pengelolaan anggaran yang tepat waktu, berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu didukung oleh kestabilan ekonomi global dan nasional, peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Ringkasan

- Bank Sentral Amerika Serikat memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada kisaran 3,75–4 persen karena tekanan inflasi masih menjadi perhatian. Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara dengan hasil 10 suara setuju dan 2 suara menolak. Dua pejabat yang berbeda pendapat menginginkan kenaikan suku bunga sebesar 0,25 persen karena menilai tekanan harga masih cukup kuat, terutama akibat kenaikan harga energi. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank sentral masih berhati-hati dalam menentukan kebijakan suku bunga agar inflasi dapat kembali menuju target 2 persen.
- Perekonomian Amerika Serikat tumbuh sebesar 3,4 persen pada kuartal III 2026 secara tahunan, terutama didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat sebesar 3,8 persen dan investasi di bidang kecerdasan buatan. Meskipun pertumbuhan ekonomi masih cukup kuat, kondisi masyarakat mulai menghadapi tekanan akibat kenaikan harga kebutuhan, termasuk bahan bakar minyak yang telah melampaui 4 dolar Amerika Serikat per galon. Keadaan tersebut menyebabkan kepercayaan konsumen menurun dan sebagian rumah tangga mulai menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Pemerintah Jerman menilai hubungan perdagangan dengan Tiongkok perlu diperhatikan karena ketergantungan yang terlalu besar dapat menimbulkan risiko bagi perekonomian Eropa. Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketidakseimbangan perdagangan, terbatasnya akses pasar bagi perusahaan Eropa, pemberian subsidi kepada industri Tiongkok, serta pembatasan ekspor bahan baku tertentu. Oleh karena itu, Jerman mendorong hubungan perdagangan yang lebih seimbang melalui dialog dan kerja sama agar kepentingan ekonomi kedua pihak tetap terjaga.
- Obligasi pemerintah Jepang menunjukkan pergerakan yang relatif stabil menjelang pengumuman kebijakan Bank Sentral Jepang. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor dua tahun berada di angka 1,895 persen, sementara permintaan dalam lelang obligasi juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan suku bunga Jepang. Bank Sentral Jepang diperkirakan mempertahankan suku bunga dalam waktu dekat, meskipun peluang kenaikan sebesar 0,25 persen pada Desember tetap menjadi perhatian pasar.
- Nilai tukar rupiah mengalami tekanan hingga berada di sekitar Rp18.137 per dolar Amerika Serikat atau melemah sekitar 7,9 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan terhadap dolar Amerika Serikat sebagai aset yang dianggap lebih aman di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pelemahan rupiah menjadi perhatian karena dapat meningkatkan biaya impor dan menambah tekanan terhadap perekonomian dalam negeri. Oleh sebab itu, Bank Indonesia terus berupaya menjaga kestabilan nilai tukar sekaligus mendorong peningkatan ekspor dan masuknya investasi asing.
- Setelah Bank Sentral Amerika Serikat mempertahankan suku bunganya, nilai tukar rupiah mengalami penguatan sebesar 0,28 persen hingga ditutup pada Rp18.132 per dolar Amerika Serikat. Penguatan tersebut didukung oleh melemahnya dolar Amerika Serikat dan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, sehingga memberikan ruang bagi mata uang negara-

negara Asia untuk mengalami pemulihan. Meskipun demikian, pergerakan rupiah masih perlu diperhatikan karena ketidakpastian mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat pada Desember dapat kembali memengaruhi pasar keuangan.

- Bank Indonesia melalui Deputy Gubernur Senior Destry Damayanti menanggapi perkiraan Hashim Djojohadikusumo mengenai kemungkinan rupiah melemah apabila kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia menurun. Bank Indonesia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan kepercayaan pasar melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi. Selain itu, Hashim juga mengingatkan pentingnya mencegah praktik manipulasi di pasar saham karena tindakan tersebut dapat merusak kepercayaan investor dan mengganggu stabilitas pasar keuangan.
- Bank Indonesia mendorong peningkatan ekspor agar ketersediaan valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat, dapat semakin kuat dan membantu menjaga nilai tukar rupiah. Kenaikan harga sejumlah komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit mentah, dan nikel memberikan peluang bagi peningkatan nilai ekspor Indonesia. Namun, kenaikan nilai ekspor belum tentu menunjukkan peningkatan jumlah barang yang dikirim ke luar negeri. Oleh karena itu, perbaikan kinerja ekspor perlu terus didorong agar tidak hanya bergantung pada kenaikan harga komoditas, tetapi juga didukung oleh peningkatan volume penjualan ke pasar internasional.
- Kebijakan Bank Indonesia dalam memberikan insentif biaya lindung nilai telah menarik aliran modal sekitar 12 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut berasal dari transaksi swap yang hampir mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat dan transaksi Domestic Non-Deliverable Forward sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Insentif ini diberikan melalui pengurangan biaya transaksi swap hingga 30 persen dan pemberian insentif untuk transaksi Domestic Non-Deliverable Forward hingga 45 persen. Kebijakan yang mulai diterapkan pada Juni dan diperluas pada Oktober tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk menempatkan dananya di Indonesia serta membantu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
- Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,4 persen pada 2027, lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan sebesar 3,1 persen pada 2026. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,1 persen. Meskipun prospeknya masih cukup baik, perekonomian Indonesia tetap menghadapi tantangan berupa perubahan suku bunga global, tekanan nilai tukar, ketegangan geopolitik, kenaikan harga energi, dan gangguan perdagangan internasional. Untuk menjaga pertumbuhan tersebut, pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi, infrastruktur, sistem logistik, ketersediaan listrik, perizinan, serta kondisi ketenagakerjaan.
- Penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah tercatat tumbuh sebesar 2,7 persen secara tahunan menjadi Rp1.539,2 triliun pada September 2026. Meskipun mengalami pertumbuhan, angka tersebut masih berada di bawah target pertumbuhan kredit sebesar 7–9 persen. Untuk memperkuat pembiayaan pada 2027, terdapat rencana penambahan plafon kredit sebesar Rp400–Rp500 triliun sehingga totalnya dapat mencapai Rp1.900–Rp2.000 triliun. Peningkatan pembiayaan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
- Harga sejumlah kebutuhan pangan seperti berbagai jenis beras, cabai, daging ayam, telur, dan daging sapi tercatat mengalami penurunan. Namun, beberapa komoditas lain, seperti minyak goreng, bawang putih, dan gula pasir lokal, masih mengalami kenaikan harga. Perbedaan pergerakan harga tersebut menunjukkan bahwa kestabilan pasokan dan kelancaran distribusi masih menjadi hal penting dalam menjaga harga kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memantau ketersediaan bahan pangan agar perubahan harga tidak terlalu membebani daya beli masyarakat.

- Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa sekitar 35–40 persen kegiatan ekonomi Indonesia belum tercatat secara resmi dengan perkiraan nilai mencapai Rp10.000 triliun. Kegiatan tersebut antara lain berasal dari usaha pangkas rambut, tempat pijat, warung makan, salon, dan berbagai usaha kecil yang sebagian besar masih menggunakan transaksi tunai. Banyaknya kegiatan ekonomi yang belum tercatat menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memperluas pendataan dan pengawasan aktivitas usaha. Apabila pencatatan ekonomi dapat diperbaiki, pemerintah akan memiliki gambaran kegiatan ekonomi yang lebih lengkap sehingga kebijakan perpajakan dan penerimaan negara dapat dijalankan secara lebih optimal.
- Kegiatan panen jagung di Desa Wlahar, Kabupaten Brebes, yang disertai dengan Expo Jagung Pendekar Sakti menjadi salah satu upaya untuk memperkuat sektor pertanian daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya menunjukkan hasil produksi jagung, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hasil panen, efisiensi biaya produksi, dan perluasan akses pasar bagi petani. Melalui kegiatan ini, petani diharapkan dapat memperoleh nilai jual yang lebih baik sehingga pendapatan mereka meningkat. Selain itu, pengembangan komoditas jagung juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat desa.
- Hingga 30 September 2026, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tercatat sebesar 61 persen atau sekitar Rp1,8 triliun. Sementara itu, realisasi fisik telah mencapai 68 persen, tetapi masih berada di bawah target pelaksanaan sebesar 75 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dan penyelesaian kegiatan pembangunan masih perlu dipercepat. Pemerintah daerah perlu mengatasi berbagai hambatan administrasi dan teknis agar program dapat diselesaikan sesuai jadwal, tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan serta prinsip transparansi dan integritas dalam penggunaan anggaran.
- Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menekankan pentingnya menjaga integritas dan ketelitian dalam proses penyusunan anggaran daerah tahun 2027. Setiap perencanaan dan penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. Selain itu, koordinasi antara perangkat daerah yang menangani keuangan, perencanaan, dan pengawasan perlu diperkuat agar pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik. Dengan perencanaan yang cermat dan pengawasan yang memadai, anggaran daerah diharapkan dapat digunakan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pembangunan Jawa Tengah.

Implikasi

- Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dapat memengaruhi pergerakan pasar keuangan dunia. Keputusan Bank Sentral Amerika Serikat untuk mempertahankan suku bunga pada kisaran 3,75–4 persen menunjukkan bahwa pengendalian inflasi masih menjadi perhatian utama. Meskipun suku bunga belum dinaikkan, adanya perbedaan pendapat dari dua pejabat yang menginginkan kenaikan menunjukkan bahwa peluang pengetatan kebijakan masih terbuka. Kondisi ini membuat investor perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena perubahan suku bunga Amerika Serikat dapat memengaruhi arus modal, nilai tukar, dan pasar keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
- Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat memberikan gambaran bahwa konsumsi dan investasi masih menjadi penopang kegiatan ekonomi. Pertumbuhan sebesar 3,4 persen pada kuartal III 2026 menunjukkan bahwa belanja masyarakat dan investasi perusahaan, terutama di bidang kecerdasan buatan, masih mampu mendukung perekonomian meskipun harga energi meningkat. Namun, kenaikan harga bahan bakar dan penurunan kepercayaan konsumen menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat belum sepenuhnya menghilangkan tekanan biaya hidup. Keadaan ini dapat menjadi perhatian bagi pelaku usaha dan pemerintah karena apabila pengeluaran masyarakat semakin terbebani, kemampuan konsumsi dapat melemah dan memengaruhi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

- Ketergantungan perdagangan terhadap satu negara dapat meningkatkan risiko bagi kestabilan ekonomi negara lain. Peringatan Jerman kepada Tiongkok menunjukkan bahwa hubungan perdagangan perlu dibangun secara seimbang agar suatu negara tidak terlalu bergantung pada pasokan barang, bahan baku, maupun kebijakan ekonomi negara mitra. Ketidakseimbangan perdagangan dan pembatasan akses pasar dapat menimbulkan kesulitan bagi perusahaan yang bergantung pada hubungan tersebut. Oleh karena itu, negara-negara perlu memperluas kerja sama perdagangan, mencari sumber pasokan alternatif, dan memperkuat kemampuan industri dalam negeri agar lebih siap menghadapi perubahan kebijakan perdagangan internasional.
- Perkembangan imbal hasil obligasi Jepang dapat memengaruhi pertimbangan investor terhadap arah kebijakan moneter. Kondisi pasar obligasi Jepang yang relatif stabil menjelang keputusan bank sentral menunjukkan bahwa pelaku pasar masih menunggu kepastian mengenai suku bunga. Apabila Bank Sentral Jepang menaikkan suku bunga pada waktu berikutnya, perubahan tersebut dapat memengaruhi keputusan investor dalam memilih instrumen investasi dan menempatkan modalnya. Dengan demikian, perkembangan kebijakan moneter Jepang perlu diperhatikan karena perubahan kondisi pasar keuangannya dapat memengaruhi pergerakan investasi dan mata uang di kawasan Asia.
- Pelemahan rupiah menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia terhadap tekanan dari luar negeri. Depresiasi rupiah sekitar 7,9 persen hingga berada di level Rp18.137 per dolar Amerika Serikat memperlihatkan bahwa ketidakpastian global dapat memberikan tekanan besar terhadap nilai tukar. Peralihan investor ke aset yang dianggap lebih aman juga dapat mengurangi aliran modal ke pasar keuangan Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya pembelian barang impor dan menambah beban bagi perusahaan yang membutuhkan bahan baku dari luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus memperkuat sektor ekspor agar perekonomian tidak terlalu rentan terhadap perubahan kondisi global.
- Penguatan rupiah setelah keputusan Bank Sentral Amerika Serikat menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih dipengaruhi oleh kebijakan negara lain. Penguatan rupiah sebesar 0,28 persen hingga mencapai Rp18.132 per dolar Amerika Serikat memberikan gambaran bahwa meredanya tekanan dari luar negeri dapat membantu memperbaiki pergerakan mata uang domestik. Namun, penguatan tersebut belum berarti bahwa tekanan terhadap rupiah telah berakhir karena arah suku bunga Amerika Serikat masih dapat berubah mengikuti perkembangan inflasi. Oleh sebab itu, pemerintah dan pelaku pasar perlu tetap memperhatikan perkembangan ekonomi global serta menjaga kepercayaan investor agar pergerakan nilai tukar tidak mudah terganggu oleh perubahan sentimen pasar.
- Kepercayaan investor menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar dan pasar keuangan Indonesia. Tanggapan Bank Indonesia terhadap perkiraan pelemahan rupiah hingga Rp20.000–Rp22.000 per dolar Amerika Serikat menunjukkan bahwa kondisi kepercayaan pasar perlu terus dijaga. Apabila investor kehilangan keyakinan terhadap perekonomian nasional, arus modal dapat semakin tertekan dan memperbesar ketidakstabilan nilai tukar. Selain itu, peringatan mengenai praktik manipulasi pasar saham menunjukkan perlunya pengawasan yang kuat agar kegiatan investasi berjalan secara wajar dan transparan. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga terkait perlu menjaga kepastian kebijakan, memperkuat pengawasan pasar, serta membangun kepercayaan investor melalui pengelolaan ekonomi yang konsisten.
- Peningkatan ekspor perlu menjadi perhatian untuk memperkuat pasokan dolar Amerika Serikat di dalam negeri. Dorongan Bank Indonesia agar ekspor ditingkatkan menunjukkan bahwa kestabilan rupiah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan di pasar keuangan. Kenaikan harga batu bara, minyak sawit mentah, dan nikel memang dapat meningkatkan nilai ekspor, tetapi peningkatan tersebut perlu diikuti oleh pertumbuhan jumlah barang yang dijual ke luar negeri. Apabila volume ekspor meningkat, penerimaan valuta asing berpotensi menjadi lebih

kuat sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan dolar Amerika Serikat di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu memperkuat produksi, menjaga kualitas komoditas, dan memperluas pasar ekspor agar sektor perdagangan dapat memberikan dukungan yang lebih berkelanjutan terhadap nilai tukar rupiah.

- Insentif biaya lindung nilai dapat menjadi alternatif untuk menarik investasi asing tanpa harus terus menaikkan suku bunga. Masuknya aliran modal asing sekitar 12 miliar dolar Amerika Serikat melalui transaksi swap dan Domestic Non-Deliverable Forward menunjukkan bahwa pengurangan biaya lindung nilai dapat meningkatkan daya tarik pasar keuangan Indonesia. Kebijakan ini memberikan pilihan bagi investor untuk mengelola risiko perubahan nilai tukar dengan biaya yang lebih rendah. Bagi perekonomian Indonesia, masuknya modal asing dapat membantu memperkuat pasokan valuta asing dan mendukung kestabilan rupiah. Namun, kebijakan tersebut tetap perlu disertai dengan kondisi pasar yang sehat dan kepastian ekonomi agar investor tidak hanya tertarik pada insentif sementara, tetapi juga memiliki kepercayaan untuk menanamkan modal dalam jangka lebih panjang.
- Ketidakpastian ekonomi global mengharuskan Indonesia memperkuat kesiapan menghadapi tantangan pada 2027. Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan masih terbuka, tetapi risiko dari perubahan suku bunga, nilai tukar, konflik geopolitik, dan harga energi tetap perlu diwaspadai. Tekanan tersebut dapat memengaruhi biaya produksi, daya beli masyarakat, serta keputusan perusahaan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki iklim usaha melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas logistik, kepastian perizinan, ketersediaan listrik, dan kondisi ketenagakerjaan yang mendukung. Langkah tersebut penting agar kegiatan usaha tetap berkembang dan perekonomian Indonesia memiliki dasar yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan kondisi dunia.
- Peningkatan penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diikuti dengan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Pertumbuhan kredit sebesar 2,7 persen hingga September 2026 menunjukkan bahwa pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah mulai meningkat, tetapi masih belum mencapai target 7–9 persen. Rencana penambahan plafon kredit pada 2027 dapat memberikan kesempatan bagi lebih banyak pelaku usaha untuk memperoleh modal kerja dan mengembangkan kegiatan produksinya. Namun, peningkatan plafon saja belum cukup apabila pelaku usaha masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan pembiayaan atau mengembangkan usahanya. Karena itu, perbankan dan pemerintah perlu memperluas akses kredit, meningkatkan pendampingan usaha, serta memastikan pembiayaan diberikan kepada kegiatan produktif agar dapat mendorong pertumbuhan usaha dan membuka peluang kerja.
- Perubahan harga bahan pangan menunjukkan pentingnya menjaga kelancaran pasokan dan distribusi kebutuhan masyarakat. Penurunan harga sejumlah komoditas seperti cabai, daging ayam, telur, dan daging sapi dapat membantu meringankan pengeluaran rumah tangga. Namun, kenaikan harga minyak goreng, bawang putih, dan gula pasir lokal menunjukkan bahwa belum semua kebutuhan pangan mengalami kestabilan harga. Apabila kenaikan harga terjadi secara terus-menerus, daya beli masyarakat dapat terganggu, terutama bagi kelompok yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memantau perkembangan harga, menjaga ketersediaan barang, dan memperbaiki distribusi dari daerah produksi ke pasar konsumen agar harga pangan tetap terkendali.
- Besarnya kegiatan ekonomi yang belum tercatat menunjukkan perlunya memperbaiki pendataan usaha dan pengelolaan penerimaan negara. Perkiraan bahwa sekitar 35–40 persen kegiatan ekonomi belum tercatat dengan nilai mencapai Rp10.000 triliun menunjukkan masih adanya aktivitas usaha yang belum sepenuhnya masuk dalam pencatatan resmi. Kondisi ini dapat menyebabkan pemerintah kesulitan memperoleh gambaran yang utuh mengenai kegiatan

ekonomi masyarakat dan potensi penerimaan pajak. Oleh karena itu, pendataan usaha perlu diperluas, terutama terhadap kegiatan ekonomi berskala kecil yang masih banyak menggunakan transaksi tunai. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui perbaikan administrasi dan pengawasan serta pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, sehingga kegiatan ekonomi dapat tercatat dengan lebih baik dan penerimaan negara dapat dioptimalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Pengembangan pertanian jagung di Brebes dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian desa. Kegiatan panen raya dan Expo Jagung Pendekar Sakti di Desa Wlahar menunjukkan bahwa potensi pertanian perlu terus dikembangkan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen. Harga jagung yang sedang tinggi dapat memberikan kesempatan bagi petani untuk memperoleh pendapatan lebih baik, tetapi keuntungan tersebut perlu didukung oleh pengelolaan biaya produksi yang efisien. Selain itu, kerja sama antara petani, pemerintah daerah, dan pihak terkait diperlukan agar hasil panen memiliki akses pasar yang lebih luas. Dengan pengelolaan yang baik, pertanian jagung tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani, tetapi juga memperkuat kegiatan ekonomi dan kemandirian masyarakat desa.
- Percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal diperlukan agar program pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi keuangan yang baru mencapai 61 persen atau sekitar Rp1,8 triliun hingga 30 September 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran masih perlu ditingkatkan, terutama karena realisasi fisik telah mencapai 68 persen. Perbedaan tersebut juga memperlihatkan perlunya memperbaiki kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan, penyelesaian administrasi, dan proses pembayaran. Setiap perangkat daerah perlu segera mengevaluasi kegiatan yang belum mencapai target serta menyelesaikan hambatan teknis, administrasi, dan pengadaan. Namun, percepatan anggaran harus tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan dana, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Selain itu, pengawasan dan keterbukaan dalam pelaksanaan proyek perlu diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Tengah tahun 2027 perlu mengutamakan integritas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap aturan. Penekanan Sekretaris Daerah Jawa Tengah mengenai pentingnya integritas menunjukkan bahwa setiap keputusan anggaran harus melalui penilaian yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting karena penggunaan anggaran daerah berkaitan langsung dengan uang publik yang harus diarahkan pada program dan kebutuhan masyarakat. Selain memperhatikan ketentuan hukum dan administrasi, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa setiap keputusan memiliki dokumen dan data yang jelas sehingga dapat diperiksa kembali apabila diperlukan. Koordinasi antara sekretaris daerah, perangkat daerah, dan pemerintah pusat juga perlu diperkuat agar pemahaman mengenai aturan penganggaran menjadi lebih baik. Dengan demikian, penyusunan anggaran dapat berjalan secara tertib, transparan, dan menghasilkan program pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah.
- Secara keseluruhan, berita internasional, nasional, dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi perlu dibangun melalui kebijakan yang tepat, penguatan kegiatan usaha, serta pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Tekanan ekonomi global dapat memengaruhi nilai tukar, investasi, dan perdagangan Indonesia, sehingga diperlukan upaya memperkuat ekspor, memperluas pembiayaan usaha, dan menjaga daya beli masyarakat. Di tingkat daerah, peningkatan produktivitas pertanian serta pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran menjadi bagian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.